

MOESLIM CHOICE

ISSN_2614-2783



Rp 75.000

PEMILU DAMAI UNTUK MEREKATKAN SILAHTUHRAHMI

ROKHMIN DAHURI
MELAJU
DI CIREBON
INDRAMAYU

DINAMIKA
JELANG
PILKADA
2024

EKONOMI
SYARIAH
TETAP TUMBUH
DI TAHUN POLITIK

CALON
SENATOR DPD
KIAN
BERKURANG

MOESLIM CHOICE .COM

PORTAL NEWS



ALAMAT REDAKSI/IKLAN
PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No. 8,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :
moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :
[moeslimchoice](https://www.facebook.com/moeslimchoice)

TWITTER :
[@moeslimchoice](https://twitter.com/moeslimchoice)
you tube channel:
[moeslimchoice tv](https://www.youtube.com/moeslimchoice)

MCTV
MOESLIMCHOICE.TV

MOESLIM CHOICE
MAGAZINE

moeslimchoice.com

PENANGGUNG JAWAB

H. Usman Rizal

DIREKTUR

HM. Kamel Fahresy SH

PEMIMPIN PERUSAHAAN

Zulfahmi Jamba

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Hj. Melati Tagore

REDAKTUR PELAKSANA

Rahmat Romli

SEKRETARIS REDAKSI

Niken Rizky Apriandani

REDAKTURIrmayani, Rosyidah Rozali,
Fahmi Jamba, M. Rahmat,
M. Husnie**REDAKTUR BISNIS**.H. M Firmansyah
Muhammad Rizky,
Muhammad Raden Solehin**REPORTER**Aldi Rinaldi,
M. Iqbal, Ida Iryani, M. Yadhil,
Muhammad Fiqri,
Muhammad Khaidir**KEPALA BIRO SUMSEL**

Rahmat Romli

FOTOGRAFER & VIDEOGRAFER

Al Amin

TATA LETAK/COVER

Kosasih Chiko

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Dra. Nur Khamidah

DIVISI PENGEMBANGAN IT

Irvan, Wahyu, M. Fikri

DISTRIBUSI

Itang AB, M. Isro

PERCETAKAN

PT. RESPATIH SAHABAT SEJATI

Isi di luar tanggung jawab
percetakan

>>SALAM REDAKSI

JUMADIL ULA

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Almanak hijri segera memasuki bulan kelima, Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1445. Beriringan dengan itu kalender gregorian memasuki November 2023.

Di Indonesia, titik temu Jumadil Awal dan November kali ini sama-sama akan bersuasana lebih dingin. Sementara Jumadil Awal, berasal dari kata jumud (beku), November di wilayah dengan iklim tropis pada umumnya berada di awal musim penghujan. Sama-sama dingin.

Namun, dingin atau beku dalam konteks cuaca tampaknya berseberangan dengan dinamika sosial-politik di dalam negeri yang bolehlah dibilang menghangat. Harap maklum, November seiring Jumadil Ula kali ini berada dalam siklus menjelang puncak perhelatan politik yang terjadwal pada Februari 2024 seiring Sya'ban 1445. Sekitar 100 hari ke depan.

Maka suhu politik menghangat seiring dengan siklus cuaca mendingin kita harapkan akan membentuk keseimbangan untuk umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Namun, harapan yang mencakup pula doa, hendaknya seiring-sejalan dengan upaya mencapai keseimbangan itu.

Keseimbangan atau equilibrium di sini dapat dimaknai sebagai kesadaran penuh bahwa politik bukanlah satu-satunya ranah atau bidang yang memerlukan perhatian. Masih banyak bidang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan perhatian serius yang melekat dengan dinamika politik. Pada politik, tercakup setidaknya urusan bernegara, kekuasaan, pengambilan keputusan dan kebijakan publik, kompromi dan konsensus, serta distribusi dan alokasi.

Nah, karena cakupan politik itu, maka melekat di dalamnya urusan lain yang tak kalah penting seperti pendidikan, juga ekonomi dan bisnis. Bagaimana politik menghadapi persoalan kualitas sumber daya manusia di tengah persaingan bangsa-bangsa secara global. Salah satu contohnya, bagaimana meningkatkan kualitas melalui kebijakan yang tepat dalam kondisi nyata sekarang juga meningkatkannya pada periode mendatang.

Di bidang ekonomi, banyak yang memaklumi bahwa Indonesia mengalami deindustrialisasi, proses menurunnya peran sektor industri dalam meningkatkan penghasilan di tingkat perorangan, keluarga, hingga negara. Pada saat yang sama, kita menginginkan peningkatan penghasilan yang setara dengan masyarakat industri yang lebih maju. Bagaimana harapan dan kenyataan yang saling bertentangan itu dapat menemukan titik temu dalam konteks mencapai tujuan bernegara, pada akhirnya kembali lagi ke ranah politik, khususnya perumusan kebijakan oleh para penyelenggara negara.

Bernegara memang bukan persoalan sederhana. Melihat dinamika sosial politik global yang mencolok pada akhir 2023 masehi seiring pertengahan 1415 hijriah, dengan rangkaian konflik bahkan perang berlarut di Ukraina, juga situasi di Jalur Gaza, misalnya, maka umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan menghadapi tantangan di tingkat nasional maupun global. Pada saatnya semuanya akan menjadi kisah. Namun, kita masih berkesempatan memilih peran dalam perjalanan sejarah itu. Selamat memilih. ♦

>>COVER EDISI INI

**ALAMAT REDAKSI/IKLAN**

PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No.
8, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12750

Telepon : (021) 791 96781

FAX : (021) 791 96786

EMAIL :

moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :

moeslimchoice

TWITTER :

@moeslimchoice

YOU TUBE CHANNEL:

moeslimchoice TV

>>DAFTAR ISI



06 **LAPORAN UTAMA**
Apapun, Gibran Rakabuming Raka akan maju sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2024. Selanjutnya, bagaimana hasil Pilpres 2024 dan pasca Pilpres?

20 **EKONOMI SYARIAH**
Ekonomi di tahun menjelang Pemilihan Umum lazimnya menghadapi banyak kendala. Namun, alhamdulillah, transaksi bisnis pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023, justru tetap meningkat.

30 **SUMSEL SYARIAH**
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni mengharapkan, Ikatan Istri Pegawai dan Karyawan (IIPK) Bank Sumsel Babel (BSB) lebih maksimal dalam membantu Pemerintah Daerah (Pemda) menurunkan angka stunting.

36 **MENUJU SENAYAN**
Empat senator, anggota Dewan Perwakilan Daerah, asal Sumatera Selatan periode 2019-2024 merupakan perempuan politisi. Bagaimana peta persaingan pada Pemilu 2024?



44

COVER STORY

Telahir dan besar dari keluarga nelayan tradisional dengan latar belakang pendidikan yang rendah, tidak membuat Prof. Rokhmin Dahuri tertinggal dalam bidang akademik.

54

BIROKRASI

Pondok pesantren kini lebih bebas memilih bentuk pendidikan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan santrinya, tanpa harus mendirikan sekolah formal. Dengan pengakuan pemerintah secara penuh kepada pesantren, maka apapun pendidikan yang dimilikinya akan dapat meluluskan santri yang siap kuliah atau masuk ke dunia kerja.

90

LAPORAN KHUSUS

Karena Calon Presiden bersaing untuk terpilih, kalangan pendukungnya pun berjuang meraih kemenangan. Bagaimana dengan Pilpres 2024?

52

COVER STORY 2

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si meyakini bahwa dengan maju Prof Rokhmin Dahuri sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI mewakili Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu akan berdampak positif bagi perkembangan pemerintah dan masyarakat di ketiga daerah tersebut.



REGULER

- 3 | SALAM REDAKSI
- 18 | UFUK
- 62 | CALEG
- 66 | KOLOM 1
- 74 | KAJIAN
- 78 | MUALAF
- 80 | KESEHATAN
- 82 | POLITIK
- 86 | RESENSI
- 88 | KISAH INSPIRATIF
- 98 | KOLOM 2

PEMILU DAMAI UNTUK INDONESIA

Tibalah kita di
ini masa periode
kampanye Pemili-
han Presiden dan
Pemilihan Ang-
gota Legislatif
(DPRD kabupaten-
kota, provinsi,
DPR, serta DPD)
yang terjadwal
mulai 28 Novem-
ber 2023 berdasar-
kan peraturan
Komisi Pemilihan
Umum (KPU).
Berlanjut kelak
dengan kampanye
pemilihan kepala
daerah.



Hari H rangkaian pemilihan itu semuanya berlangsung pada 2024. Hari H Pilpres dan Pileg berlangsung serentak, terjadwal pada 14 Februari 2024. Sedangkan Hari H Pilkada untuk semua tingkatan kepala daerah berlangsung serentak pula berselang sekitar 10 bulan setelah Pilpres dan Pileg.

Dalam konteks politik dalam negeri, kita mengenal idiom mencuri start kampanye. Pengertiannya, para kandidat sudah berkampanye sebelum jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Namun, pengertian mencuri start itu sebenarnya menjadi buram karena salah satu pengertian kampanye adalah upaya mempengaruhi keputusan (memilih) pada kelompok tertentu. Kampanye dapat berada dalam konteks pemilihan politik yang demokratis, malah dalam promosi atau sosialisasi produk dan jasa yang ditawarkan kepada kelompok atau segmen pasar tertentu. Dalam pemilihan politik segmen pasar sepadan dengan kelompok konstituen atau target elektoral.

Nah, dengan pengertian seperti itu, agak sulit membatasi kampanye berdasarkan jadwal resmi. Kampanye dapat berlangsung tanpa jadwal, 24 jam sehari, tujuh hari sepekan, dan seterusnya dari sisi pemilahan waktu.

Ambil contoh kasus pembentukan tim kampanye masing-masing pasangan calon Capres-Cawapres. Tentu saja susunan tim akan mempengaruhi (sedikit atau banyak) keputusan para pemilih ketika Hari H tiba. Demikian pula, kesigapan

dalam pembentukan tim hingga susunan finalnya masuk ke KPU akan menjadi kampanye tersendiri bagi masing-masing pasangan calon Capres-Cawapres.

Apakah proses pembentukan dan susunan tim kampanye merupakan bagian

dari kampanye? Dengan lugas dan mudah memang ya jawabnya. Apakah pembentukan tim yang melekat dengan kampanye paslon melanggar ketentuan KPU dan Undang-Undang Pemilu? Tentu saja tidak, Dengan pemahaman seperti ini



maka mencuri start kampanye boleh dibilang kampanye negatif untuk melabel atau memberi cap buruk terhadap yang dituduh sebagai pencuri start kampanye.

Jadi, pengertian mencuri start kampanye adalah hal yang absurd, konyol, atau bertentangan dengan akal sehat. Terlebih jika melihat lini masa global bahwa umat manusia sudah memasuki masa Revolusi Industri IV yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Wujud kampanye tanpa henti dapat terlihat di media sosial berdasarkan pelaku kampanyenya dan sasaran atau targetnya.

Jadi, akan lebih tepat menggunakan pengertian melanggar aturan kampanye KPU dibandingkan dengan mencuri start kampanye. Kalaupun dianggap memenuhi syarat melanggar peraturan KPU, han-

ya otoritas pemangku kebijakan pemilu -katakanlah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dapat membuat assessment atau penilaian pada awalnya.

Dalam perkembangan ingar-bingar menjelang masa kampanye versi KPU yang terjadwal pada 28 November misalnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto malah mengumumkan nama sejumlah tokoh yang akan diusung sebagai bakal calon gubernur (Cagub) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Apakah yang dilakukan Airlangga itu kampanye? Tentu saja ya.

Tapi, apakah Airlangga mencuri start kampanye Pilkada? Yang menjawab ya tentu saja dapat menjadi bahan tertawaan

Nah, pengumuman Airlangga itu jus-

tru menunjukkan upaya menghindari stigma tentang politik uang atau mahar untuk kandidat calon kepala daerah. Dengan pengumuman itu, lebih sedikit kemungkinan Ketua Umum dan atau Partai Golkar meminta mahar kepada kadernya sendiri.

Baiklah, untuk Provinsi Banten, Golkar akan mengusung mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany. "Kalau untuk Banten di sini ada Ibu Airin sekaligus ketua TKD (Tim Kampanye Daerah)," kata Airlangga saat konferensi pers usai pembekalan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 21 November 2023.

Kemudian di Jawa Barat, Golkar akan mengusung petahana Ridwan Kamil. Begitu juga di Jawa Timur, Golkar akan



Nah, dengan pengertian seperti itu, agak sulit membatasi kampanye berdasarkan jadwal resmi. Kampanye dapat berlangsung tanpa jadwal, 24 jam sehari, tujuh hari sepekan, dan seterusnya dari sisi pemilahan waktu.

mengusung Khofifah Indar Parawansa untuk periode keduanya.

"Pak Ridwan Kamil di Jabar. Bu Khofifah Jawa Timur," kata Airlangga.

Sedangkan, untuk Pilgub DKI Jakarta, Golkar akan mengusung Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar. Kandidat ini sudah dikenal pernah menjadi Bupati Tangerang, Banten.

Namun Airlangga masih merahasiakan siapa yang akan diusung di Pilgub Jawa Tengah. Ia hanya memberikan bocoran sosoknya adalah anak muda. "Cagubnya nanti bacagubnya nanti pokoknya ada anak muda," katanya.

Pada kesempatan itu, Airlangga juga memperkenalkan mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw sebagai bakal calon gubernur Papua Barat. "Pak Paulus yang akan kita dukung untuk menjadi

bakal calon di Papua Barat untuk gubernur," kata Ketua Umum Partai Golkar ini.

Dengan sendirinya Partai Golkar sedang berkampanye menunjukkan politik terencana dan transparan dalam konteks Pilkada. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, Partai Golkar tampak berusaha mempertahankan reputasinya sebagai partai politik berpengalaman sejak kelahirannya pada 1967.

Eh, apakah ini kampanye Partai Golkar? Tentu saja bukan. Media massa memiliki koridor yang lebih ketat dalam memilih atau memilah konten. Jadi, apa yang dikemukakan di halaman ini dan selanjutnya merupakan informasi faktual, sesuatu yang mengurangi ketidakpastian berdasarkan himpunan fakta yang tersedia. ♦



MENANG KALAH TETAP CERAH

Sebenarnya masa depan Gibran tetap cerah. Meski tak menjadi Wapres, banyak peluang terbuka dan mempesona.

Tapi, mengapa Gibran sepertinya keukeuh menjadi Cawapres? Dengan berbagai risikonya.

Simak saja apa yang dikemukakan oleh ilmuwan politik di Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Wasisto Raharjo Jati di Jurnal New Mandala. Jauh hari sebelum Gibran resmi menjadi Cawapres, Wasisto melihat prospek Gibran (dan adiknya, Kaesang Pangarep) akan memiliki akses sebagai politisi yang berperan di jajaran pemerintah. Termasuk menantu Presiden Jokowi Bobby Nasution.

Menurut Wasisto, yang artikelnya dapat diakses secara daring sejak Juni 2023, dua putra Presiden Joko Widodo itu tampak sedang merancang masa depan politik mereka, karena ayah mereka akan memasuki masa pensiun setelah Pilpres pada Februari 2024. Toh Wasisto mengemukakan pula, risiko rancangan itu adalah penguatan persepsi bahwa Jokowi sedang berupaya membangun sebuah dinasti politik. Performa kedua putra Jokowi di kancah politik, kata Wasisto, akan berdampak pada legacy

(warisan) Presiden dan keluarganya pasca-2024.

Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden dan petahana Wali Kota Surakarta (Solo), mengincar jabatan politik yang lebih tinggi: gubernur Jakarta atau Jawa Tengah. Adik laki-laki Gibran, Kaesang Pangarep, dikatakan mengincar peluang untuk terjun ke dunia politik dengan berkampanye untuk jabatan wali kota Depok atau Tangerang Selatan, keduanya merupakan kota penting secara ekonomi di Jabodetabek. (Bobby



Nasution, menantu presiden, saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan, kota terbesar keempat di Indonesia.)

Menurut Wasisto, Gibran sedang mempertimbangkan untuk memanfaatkan posisinya sebagai Wali Kota Solo untuk mencalonkan diri sebagai gubernur pada tahun 2024. Ia mungkin mengincar jabatan gubernur di Jawa Tengah—jabatan yang saat ini dipegang oleh Ganjar Pranowo, yang telah mengamankan kursi pencalonan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pilpres 2024.

Opsi kedua adalah Gibran mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Jika Gibran memutuskan untuk mencalonkan diri di sana, dia akan mampu meneruskan warisan ayahnya. Selama masa jabatannya sebagai gubernur dari tahun 2012 hingga 2014, Jokowi

politik-budaya dan persaingan berbasis aliran masih berpengaruh dalam menentukan perilaku memilih.

Sementara itu, masih kata Wasisto, Jakarta memiliki demografi yang lebih heterogen dan politik yang lebih kompleks—dan bukan merupakan basis PDIP seperti halnya Jawa Tengah. “Ibu kota, apalagi sejak naiknya Anies Baswedan pada Pilgub 2017, belakangan menjadi basis pemilih muslim konservatif yang tentu menjadi kendala bagi Gibran,” ungkapnya.

Meraih kursi Gubernur Jawa Tengah bisa berarti banyak bagi Gibran, karena dapat menjadi landasan untuk menjadi presiden, dengan provinsi ini menjadi rumah bagi hampir 28 juta pemilih terdaftar. Jika Gibran berhasil di Jawa Tengah, hal ini akan memperkuat pengaruh PDIP yang sudah kuat di provinsi tersebut.

bantu pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menuju kemenangan di Pilpres 2024.

Capres Prabowo Subianto mengaku beberapa kali mendapat dukungan dari Jokowi. Tidak hanya itu, Prabowo menyebut Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mendukungnya.

Sejauh ini Jokowi tidak terang-terangan mendukung Prabowo. Toh dalam beberapa event yang melibatkan Jokowi dan Prabowo, dukungan tersebut bisa dilihat.

“Dukungan itu tampak semakin kuat dengan dipilihnya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya Prabowo. Hal itu diperkuat lagi dengan adanya dukungan Kaesang Pangarep yang mewakili PSI, dan menantu Jokowi, Bobby Nasution kepada pasangan Prabowo-Gibran,” ungkap Ritonga, Selasa, 21 No-

Berarti ada pengalaman 20 tahun. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Dan insya Allah kita akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita

mempercepat pembangunan sistem transportasi massal di ibu kota, meningkatkan sistem pengelolaan banjir, dan memulai program perbaikan permukiman informal.

Berdasarkan hasil survei, Gibran unggul di antara kandidat potensial untuk pemilu di Jawa Tengah yang dijadwalkan pada akhir 2024. Di sisi lain, belum ada survei publik yang mengukur prospek Gibran untuk pemilu di Jakarta hingga pertengahan 2023.

Prospek Gibran, lanjut Wasisto, lebih besar untuk mencalonkan diri di Jawa Tengah dibandingkan dengan di Jakarta. Solo, yang merupakan bagian dari provinsi Jawa Tengah, mempunyai demografi etnis Jawa yang relatif homogen dan minoritas Kristen yang besar. Hal ini akan menguntungkan seseorang dengan latar belakang Jawa dan sekuler seperti Gibran, dalam konteks identitas



Selain Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan beberapa daerah di Indonesia Timur, melanjutkan rekor kemenangan telak di Jawa Tengah sangat penting untuk membantu PDIP mempertahankan jumlah kursinya di DPR dan DPRD, dan membantu melestarikan nasionalisme dan citra partai yang pluralistik.

Namun, setelah artikel Wasisto itu dipublikasikan, dinamika politik tampak berubah lebih cepat. Alhasil, Gibran malah menjadi Cawapres yang berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto.

Dalam konteks ini, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dengan mudah mem-

percepat pembangunan sistem transportasi massal di ibu kota, meningkatkan sistem pengelolaan banjir, dan memulai program perbaikan permukiman informal.

Menurut dia, banyak indikasi lain menguatkan adanya dukungan Jokowi kepada pasangan Prabowo-Gibran. Namun, tambahnya dukungan itu dilakukan Jokowi secara tidak langsung, mengingat posisinya saat ini sebagai Presiden dan kader PDI-P.

Sebaliknya, SBY sudah sangat tegas mendukung Prabowo. SBY pun membantu meng-endorse Prabowo. “Dukungan dari Jokowi dan SBY tentu berpeluang besar meningkatkan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran. Baik Jokowi maupun SBY masih memiliki pendukung loyal yang siap diarahkan untuk memilih Prabowo-Gibran,” ujarnya.

Jokowi sendiri, di mata Ritonga, me-

miliki pendukung yang fanatik dan relawan yang kuat. Alhasil, Jokowi bisa dengan mudah mengalihkan suaranya ke Prabowo-Gibran.

"Belum lagi keunggulan kapital yang dimilikinya sebagai presiden. Tentu tidak terlalu sulit baginya untuk memenangkan Prabowo-Gibran," kata Ritonga.

"SBY juga masih memiliki pendukung yang relatif besar. Dengan jaringan yang dimilikinya, khususnya di Jawa Timur, setidaknya SBY dapat membantu meningkatkan elektoral Prabowo-Gibran," sambungnya.

Ritonga melihat SBY juga akan dengan mudah menggerakkan kader Demokrat untuk mengarahkan dukungan ke Prabowo-Gibran. Mesin politik

mendekati hari pencoblosan. Elektabilitas Prabowo-Gibran diperkirakan akan meninggalkan kompetitornya," tandasnya.

Sedangkan Prabowo tampak optimistik pasangan dengan nomor urut 2 dalam Pilpres 2024 itu memang mendapat dukungan Presiden Jokowi dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Presiden ke-enam mendukung dan berada di sebelah saya, dengan Presiden ketujuh juga mendukung berada di sebelah saya," ujar Prabowo dalam acara konsolidasi kemenangan Partai Demokrat di Hotel Aston Madiun, Jawa Timur, Senin, 20 November 2023.

Prabowo menyampaikan, dengan kehadiran SBY dan Jokowi yang men-

RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dukungan penuh untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. "Lewat momen ini saya berikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto untuk capres dan Insyaallah jadi presiden Indonesia kedelapan," ujar SBY.

SBY mengharapkan bila Prabowo memimpin Indonesia dalam lima atau sepuluh tahun ke depan untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Selain itu, Prabowo diharapkan bisa menyejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. "Utamakanlah kepentingan rakyat.



yang dimiliki Demokrat akan dengan cepat bergerak untuk memperoleh pundi-pundi suara dengan kemenangan Prabowo-Gibran.

Ia menduga pula elektabilitas Prabowo-Gibran akan terus meningkat, khususnya menjelang hari pencoblosan Pilpres 2024. "Jadi, dukungan Jokowi dan SBY tampaknya akan terus meningkatkan elektoral Prabowo-Gibran. Indikasi itu akan semakin terlihat saat nanti

dukungnya maka terdapat pengalaman 20 tahun kepemimpinan sebagai Presiden di sisinya. Dia pun berkomitmen untuk terus melakukan yang terbaik untuk bangsa.

"Berarti ada pengalaman 20 tahun. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Dan insya Allah kita akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita," ucap Prabowo.

Di acara yang sama, Presiden ke-enam

Majukan dan sejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia," ungkap SBY.

SBY menyatakan, tekadnya mendukung dan memenangkan Prabowo dalam Pilpres 2024 lantaran sudah mengenal Menhan itu sejak 53 tahun lalu. Saat itu, keduanya sama-sama duduk di bangku pendidikan AKABRI Angkatan Darat yang kemudian berubah nama menjadi Akmil pada 1970-an.

Tak hanya itu, SBY juga pernah sama-

sama bertugas di Timor Timur dengan Prabowo Subianto. Saat itu, Prabowo bertugas di Kopassus dan SBY di Kostrad. Selama bertugas di TNI, kata SBY, dia bersama Prabowo sering mendiskusikan dan memikirkan bagaimana TNI semakin maju dan profesional.

Usai pensiun dari TNI, SBY dan Prabowo sama-sama mendirikan partai politik. SBY mendirikan Partai Demokrat dan Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Selama berkiprah di parpol dan pemerintahan, SBY mengakui Prabowo memiliki wawasan dan pengetahuan yang kuat tentang dasar dan pilar bernegara.

"Pak Prabowo juga mengerti manajemen kepemimpinan, visi dan misi untuk Indonesia masa kini dan masa depan.

"Jangan meremehkan intelegensia akal sehat budi nurani kemanusiaan rakyat Indonesia. Pasti mereka (rakyat) mengerti mana yang baik buat negara dan mana yang tidak, jadi belum tentu menang," ujar Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio di Lembaga Survei Kedai-Kopi, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 16 November 2023.

Toh Hensat, nama ringkas Hendri, melihat cawe-cawe Presiden Jokowi tampaknya dimaklumi oleh sebagian besar warga. "Susah tak cawe-cawe, kita saja di sini coba kalau ada anak kita ikut pertandingan kira-kira bakal diizinkan untuk kalah atau dibantukan untuk menang, itu saja jawabannya?" katanya.

Jadi, sambung Hensat, seluruh Indo-

ka penguasa ikut serta dalam pemilu, tapi harusnya bisa.

"Pada siapa kita bersandar, pada KPU, Bawaslu, DKPP, belum lagi para peserta pemilu, partai politik, dan tentu saja punggawa paling depan, calon-calon pemimpin kita Capres dan Cawapres yang sudah mendapatkan nomor urut," ujar Hendri.

Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan perlu optimistik Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil sampai akhir. Alasannya, saat ada kecurangan hukumannya langsung datang dari rakyat.

Menurut Hensat, sulit membayangkan Presiden dan Wakil Presidennya terpilih ternyata rakyat tak percaya itu hasil pemilu jujur dan adil, sehingga keadaan



Selain itu mengetahui perkembangan wawasan internasional dan apa yang dihadapi dan tantangan bangsa Indonesia," jelas SBY.

Namun, kembali ke masa depan politik Gibran, di mata pengamat politik Hendri Satrio, meski pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun belum tentu memenangi Pilpres 2024.

nesia tahu jawabannya. "Sehingga kita perlu, kalau kata Bung Karno itu, budi nurani kemanusiaan untuk menentukan siapa Presiden kita di 2024, tidak mudah tapi pasti bisa," sambungnya.

Dalam menghadapi situasi politik dewasa ini, masyarakat diimbau meningkatkan kepercayaannya pada negara ini. Lalu, para penyelenggara negara harus membuktikan mereka bisa bersikap netral meski sulit memang kondisinya keti-

negara menjadi gawat. Kita akan lihat perkembangannya sejak masa kampanye Pilpres yang berlangsung mulai 28 November 2023.

Apapun, melihat ujung persaingan antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014 dan 2019, upaya rekonsiliasi pasca Pilpres adalah jawaban untuk meredakan perpecahan. Kita juga akan lihat bagaimana pasca Pilpres 2024. ♦



MENJARING PEMILIH MUDA

Strategi pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran memiliki selisih usia berjauhan. Prabowo, kelahiran 1951, sedangkan Gibran lahir pada 1987. Dalam menggalang dukungan dan suara pemilih pun tampak keduanya memiliki segmen berbeda.

Sudah jelas Gibran akan menggalang dukungan suara dari kalangan pemilih muda dan pemilih pemula. Sebagaimana safari politik ke Lampung pada Sabtu, 11 November 2023.

Dalam safari politiknya, Gibran Rakabuming Raka bertemu partai koalisi, masyarakat, hingga kelompok relawan. Di safari itu Gibran mengingatkan para pendukungnya agar tidak perlu menanggapi pihak-pihak yang melontarkan pernyataan negatif.

Gibran meminta agar pendukungnya tidak membalas berbagai nyinyiran yang ditujukan kepada pihaknya. Bagi Gibran, berbagai pernyataan negatif hingga fitnah yang ditujukan kepada pihaknya cukup dibalas dengan senyuman.

"Bapak ibu, saya ulangi, jika ada yang nyinyir, jika ada yang fitnah, jika ada yang

ber-statement negatif biarkan saja, senyumin saja," kata Gibran, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Senin, 13 November 2023.

Menurut putra sulung Presiden Joko Widodo itu, orang yang terus memfitnah menunjukkan bahwa mereka sedang dilanda kepanikan. Selain itu, Gibran melihat pihak yang kerap nyinyir adalah mereka yang takut kalah.

"Itu nanti angka-angka yang akan membuktikan. Kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah," ungkapnya.

Di Lampung, Gibran menyambangi pula Pasar Natar di Kabupaten Lampung Selatan untuk berdialog dengan para pedagang dan masyarakat. Gibran menampung keluhan dari para pedagang serta melihat langsung harga bahan pokok di Provinsi Lampung. Agenda



Safari Gibran di Lampung juga diisi dengan kunjungan ke Universitas Darmajaya, bertemu para mahasiswa membahas potensi kewirausahaan anak muda.

Masih dalam kunjungan ke Lampung itu, Gibran menyambangi para santri di Pondok Pesantren Wali Songo, Lampung. Di Ponpes ini Gibran mendapat berbagai pertanyaan dan masukan dari para santri dalam acara silaturahmi tersebut.

"Mas Gibran memiliki keberanian yang nggak semua orang punya. Jadi saya di sini ingin meminta tips, mengapa Mas Gibran bisa berani menyalonkan diri jadi wakil presiden di umur Mas Gibran yang tergolong masih

muda," ucap santri putri bernama Uli.

"Saya dan teman-teman saya di sini ingin memiliki jiwa keberanian yang dimiliki oleh Mas Gibran. Kenapa sih, Mas Gibran tuh kayak bisa berani banget mencalonkan menjadi Wakil Presiden?" tanya Uli

Giliran menjawab, "Yang kamu takutkan apa? Gimana caranya biar

bisa berani, lho yang ditakutkan apa?"

Menurut dia, penduduk muda Indonesia saat ini mendominasi populasi. "Di sini ada yang tahu nggak penduduk Indonesia ada berapa? Kita bulatkan aja ya ada 250-an juta ya. Tahu tidak anak mudanya ada berapa? Ada banyak. Makanya anak muda harus berani tampil," kata Gibran.

Ia juga menyarankan para santri membaca buku portofolio berjudul "Wali Kota Karbit" yang dibagikan kepada para santri. "Itu kamu udah dapat buku saya coba kamu buka. Itu saya jadi wali kota umur 33. Itu wali kota yang umurnya masih di bawah saya itu banyak sekali. Jadi jangan meragukan anak-anak muda," ucapnya.

Gibran juga menyebut para pengajar atau gus-gus di Ponpes Wali Songo mayoritas masih berusia muda. Dia pun menyampaikan sudah membangun 17 titik prioritas di Solo salah satunya Masjid Syekh Zahed dimana saat ini menjadi rujukan destinasi wisata.

"Nanti dibaca ya pokoknya kamu anak-anak muda jangan takut banyak yg dukung kamu, sekarang mayoritas Indonesia itu anak muda semua jadi anak muda yang harus diwakili anak muda jangan ada yang ditakutkan," tukasnya.

Buku yang ia maksud sudah meluncur pada akhir 2021. Saat launching buku tersebut Putra Sulung Presiden Jokowi itu menyampaikan bahwa buku itu berisi perjalanan membangun Kota Solo yang dimulai Gibran dengan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa itu sejak dilantik pada Februari 2021 lalu.

Namun Gibran mengaku belum puas, karena buku setebal 290 halaman itu berisi yang bagus-bagus saja, padahal masih banyak program yang belum selesai. "Mungkin di sini (isinya) yang bagus-bagus aja. Yang jelek-jelek masih banyak masih jadi PR untuk saya. Misalnya hari ini

yang lazim disebut Solo menunjukkan, pada 2020 lalu, perekonomian Solo sempat terkontraksi oleh wabah Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Solo pada waktu itu tercatat minus 1,74 persen.

Ekonomi Solo mulai bangkit pada 2021, saat itu pertumbuhan ekonominya mencapai empat persen. Sedangkan pada 2022 pertumbuhan ekonomi di kota itu mencapai 6,25 persen. Rekor pertumbuhan tertinggi di masa jabatan Gibran sebagai Wali Kota.

Meski pertumbuhan ekonomi Solo pada 202 berada di atas angka nasional yang hanya 5,3 persen, soal kemiskinan

Pada tahun 2023, angka kemiskinan Solo turun menjadi 43.890 atau 8,44 persen.

Selain masalah kemiskinan, Solo juga memiliki sejumlah pekerjaan rumah, khususnya sektor ekonomi informal. Pekerja sektor informal pada Agustus 2023 sebanyak 40,68 persen atau tercatat mengalami kenaikan dibandingkan Agustus 2022 yang mencapai 38,98 persen.

Sebaliknya, pekerja sektor formal jumlahnya terus menyusut secara persentase. Pekerja formal di kota Solo turun secara persentase dari 61 persen pada Agustus 2022 menjadi 59,32 persen pada Agustus 2023.



atau kemarin saya jujur aja masih banyak yang kebanjiran di Kota Solo," katanya.

Gibran berkomitmen akan menyelesaikan sejumlah PR di Kota Solo bersama Wakil Walikota Teguh Prakosa dan jajaran ASN. Pihaknya optimistis, penataan pemukiman kumuh akan selesai dengan hibah yang akan dicairkan dari Pemerintah Uni Emirat Arab.

"Jadi apa yang disampaikan di sini itu yang bagus-bagus doang yang jelek-jelek masih banyak sekali tapi yang jelek-jelek akan tetap jadi PR untuk saya dan Pak Teguh dan seluruh jajaran Pemkot Surakarta," tandasnya.

Dari berbagai laporan media, rekam jejak Gibran sebagai Wali Kota Surakarta

dan penduduk yang bekerja di sektor informal masih menjadi catatan. Gibran memulai pemerintahannya pada masa pandemi pada tahun 2020. Pada waktu itu, jumlah kemiskinan di Kota Solo mencapai 47.030 orang atau sembilan persen. Sedangkan pada tahun sebelumnya penduduk miskin di Kota Solo hanya 45.180 penduduk atau 8,7 persen.

Angka kemiskinan kembali merangkak naik pada 2021 menjadi 48.790 atau 9,4 persen, imbas pandemi yang belum selesai. Seiring dengan kebijakan pelonggaran pandemi Covid-19 pada 2022, angka kemiskinan di Kota Solo kembali mengarah kepada masa pra pandemi yakni sebanyak 45.900 atau 8,84 persen.

Tren kenaikan pekerja sektor informal itu terjadi seiring dengan penurunan jumlah pekerja, pegawai atau buruh. Kelompok penduduk kota Solo yang berstatus sebagai pekerja, pegawai atau buruh tercatat menyusut dari 57,47 persen pada Agustus 2022 menjadi 53,6 persen pada 2023.

Selain masalah sektor informal, Solo di bawah pemerintahan Gibran juga kebanjiran proyek pemerintah. Tak hanya itu, kota kelahiran Jokowi ini terpilih untuk mendapat dana hibah dari UEA yang membantu pertumbuhannya.

Secara keseluruhan, ada 17 titik prioritas pembangunan Kota Solo. Di antaranya adalah pembangunan Masjid Raya

Sheikh Zayed, pembangun Islamic Center, revitalisasi Solo Technopark, Elevated Rail Simpang Tujuh Joglo.

Kemudian revitalisasi Ngarsapura dan Koridor Gatot Subroto (Gatsu), revitalisasi Solo Safari, pembangunan Selter Manahan, revitalisasi Lokananta, revitalisasi Taman Balekambang, revitalisasi Sri Kayu Gilingan, revitalisasi Pasar Jongke, revitalisasi Pura Mangkunegaran, pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi.

Pembangunan lainnya juga ditujukan untuk PLTSA Putri Cempo, revitalisasi Gor Indoor Manahan, penataan kawasan Kumuh Semanggi-Mojo, dan revitalisasi

gunan di Solo. "Insya Allah lanjut terus, pasti kami ngawal terus," kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin, 23 Oktober 2023.

Soal Gibran maju sebagai Cawapres untuk menjaring pemilih muda diakui oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. "Jumlah populasi generasi muda saat ini 53 persen, kami berharap Mas Gibran bisa memanfaatkan bonus demografi ini," kata Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga mengatakan, mengusulkan Gibran juga untuk memberikan warna dalam Pilpres 2024 pasalnya termasuk kategori under 40. Ia juga menyebut Indonesia memiliki seja-

Prabowo-Gibran," kata Arief, Jumat, 17 November 2023.

Dia menyebut, bonus demografi tidak boleh jadi sekadar retorika. Akan tetapi, pemuda mesti menjadi game changer untuk mendukung keberlanjutan dan penyempurnaan pembangunan. "Dengan demikian, tepat bila kita katakan bahwa anak muda adalah game changer dalam pemilu yang sudah kurang dari 100 hari lagi. Kita harus merangkul anak muda untuk ikut berkolaborasi demi keberlanjutan dan penyempurnaan yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi dan jajaran," ucap Arief.



kawasan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo).

Dari 17 prioritas pembangunan tersebut, ada proyek yang masih belum rampung hingga saat ini. Yakni pembangunan Islamic Center di Masjid Sheikh Zayed, revitalisasi kawasan Keraton Solo, pembangunan PLTSA Putri Cempo yang baru terbakar.

Kemudian revitalisasi Gor Indoor Manahan, pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi, revitalisasi Pasar Jongke, revitalisasi Solo Safari tahap dua, dan Elevated Rail Simpang Tujuh Joglo.

Gibran yang sudah resmi berpasangan dengan Prabowo mengaku masih tetap akan mengawal proyek-proyek pemban-

rah dipimpin oleh anak muda pada zaman pasca kemerdekaan. "Sutan Sjahrir pada waktu itu under 40 dan sukses bersama Soekarno-Hatta," kata Airlangga.

Sedangkan Komandan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan, menargetkan 22 juta suara anak muda di Pilpres 2024. Menurut dia, ada 56 persen pemilih muda dari Gen Z dan milenial menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Berdasarkan DPT tersebut, 56 persen suara pemuda ekuivalen dengan kurang lebih 114 juta adalah suara pemuda. Dari angka ini, TKN Fanta menargetkan 20 persen atau sekitar 22 juta suara pemuda untuk mendukung satu putaran

Dia menuturkan, Perpres No. 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah satu dari banyak komitmen Presiden Jokowi untuk pemuda. "Hari ini bisa kita lihat, Pak Prabowo satu-satunya capres yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemuda untuk kebersamai perjuangan beliau. Kita tak boleh menyalahgunakan peluang ini dengan berbagai inovasi kreatif dan positif untuk anak muda," jelas Arief.

Apakah daya pikat pasangan Prabowo-Gibran akan terwujud dalam kemenangan di Pilpres 2024? Kembali lagi kita harus menunggu hasil penghitungan suaranya. ♦

MEMILIH

GUNAWAN EFFENDI

Apa boleh buat, politik mendominasi wacana publik di akhir 2023, seiring dengan pertengahan 1445 hijriyah ini. Saatnya bercakap tentang politik. Insya Allah sebagian besar kita maklum, rangkaian agenda Pemilihan Umum 2024 memasuki masa kampanye mulai 28 November 2023. Itu untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024. Lanjutannya adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan serentak pada November 2024.

Nah, boleh jadi ada sebagian umat Islam gamang bersikap menghadapi rangkaian proses pemilihan yang simultan pada 2024. Gamang bahwa semua Capres ternyata beragama Islam. Begitu juga banyak caleg dan pasangan calon yang maju di Pilkada beragama Islam. Namun, siapa yang akan dipilih?

Sebenarnya ada panduan yang sering kali diungkapkan oleh para ulama maupun muslim intelektual tentang cara memilih pemimpin. Ringkasnya, pilihlah pemimpin yang mendekati sifat kenabian: sidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), fathanah (cerdas).

Dari kalangan pemerintahan saat ini, pada Ramadan 1444, April 2023, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mengingatkan lagi empat karakter kepemimpinan profetik atau kenabian di acara Pengajian Ramadan 1444 H yang diselenggarakan oleh PP 'Aisyiyah.

Dalam keynote speech secara daring Muhadjir menyebutkan bahwa kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang menerapkan karakter kepemimpinan rasul atau para nabi terutama kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. "Kepemimpinan profetik meneladani empat sifat wajib karakter utama Rasul yakni sidiq, amanah, tabligh, dan fatonah," terang Muhadjir.

Pemimpin yang Sidiq memiliki arti jujur yang dalam arti yang luas berintegritas. Sidiq bukan sekedar jujur tetapi dalam diri seorang pemimpin memiliki sikap yang tegas sesuai dengan apa yang diucapkan dan dipikirkan dan dilakukan dan selalu berpihak pada kebenaran.

Kemudian pemimpin memiliki sifat amanah atau terpercaya. Maknanya ketika kita mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan tugas dari masyarakat yang memberikan mandat kepada kita maka kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

"Tanggung jawab seorang pemimpin ketika memegang amanah bersifat vertikal maupun horizontal yang berpegang teguh pada Allah swt dan berpegang pada amanah umat yang mempercayai kita," terang Muhadjir

Kemudian sifat yang ketiga adalah tabligh yang artinya menyampaikan. Rasul disebut Muhadjir memiliki karakter utama adalah penyampai atau deliver. Karakter menyam-

paikan ini dalam arti apa yang pemimpin sampaikan harus diterima dan dipahami oleh orang lain.

"Maka harus membedakan antara mengirim atau to send dengan menyampaikan atau to deliver. Apa yang kita kirim belum tentu sampai tetapi kalau menyampaikan kita pastikan apa yang kita berikan sampai kepada pihak sasaran," imbuhnya.

Selanjutnya, sifat fathanah atau cerdas yang ditandai dengan kemampuan berpikir kritis kreatif dan inovatif. "Kita harus selalu curiga, harus selalu skeptis terhadap hal yang masuk dalam pikiran kita karena bersikap skeptis adalah awal mula dari pikiran kritis," ungkap Muhadjir.

Berpikir kritis menurut Muhadjir akan membuat orang berpikir kreatif, kreatif termasuk dalam hal kemampuan stimulus untuk menerima hal baru dan kemudian bisa merespon dengan tepat, kalau itu masalah maka dia bisa mencari solusi atas masalah itu," ungkap Muhadjir.

Tambahan penting dari Menko Muhadjir, peran perempuan dalam hal kepemimpinan ini disebut Muhadjir menjadi krusial bahkan penentu "Karena kita tahu tidak ada sebuah bangsa yang tumbuh besar tanpa perempuan karena dari perempuan akan menjamin bahwa proses regenerasi proses keberlangsungan sebuah bangsa akan terjadi," tandasnya.

Perspektif yang sama tentang memilih pemimpin datang dari Kiai Haji Syukron Makmun yang berada dalam salah satu tim pemenang pasangan Capres pada Pilpres 2024. "Jangan sembarangan mencari pemimpin. Carilah sosok yang shiddiq (jujur), amanah (terpercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas) sebagaimana Nabi contohkan. Jangan karena dapat sogokan," ujarnya dalam salah satu ceramah maulidnya.

Kiai kelahiran Madura ini melanjutkan, jika masyarakat dalam memilih para pemimpin atau wakil rakyat karena politik uang, bukan hal yang mustahil negeri ini akan makin hancur. Alasannya, ketika duduk di kursi empuk hampir dipastikan bakal sibuk mengembalikan modal awal kampanye mereka sendiri. Walhasil, rakyat akan dilupakan.

Menurut Kiai Syukron, demokrasi di Indonesia bakal terancam jika dipenuhi pemimpin culas yang menghalalkan segala cara. Tugas ulama, lanjutnya, harus bicara yang benar terkait soal pemimpin. "Jika kiai atau ulamanya sudah tidak berani amar ma'ruf nahi munkar, kepada siapa lagi umat akan bertanya?" tandasnya.

Dari lingkup tasawuf atau sufi, Imam Al Ghazali (1058-1111 masehi) dalam Fadhaih al-Bathiniyah mengemukakan setidaknya muslim harus memilih pemimpin dengan empat kriteria utama. Empat kriteria utama yang dimaksud adalah najdat atau memiliki cukup kekuatan dan berwibawa, kifayah atau mampu menyelesaikan segala persoalan, wara' atau sikap hidupnya apik, dan terakhir, ilmu berarti memiliki ilmu pengetahuan.

Al-Ghazali merumuskan tipe pemimpin ideal, yang lahir dari berbagai kepemimpinan pada masanya. Perpaduan akal dan



batin Al-Ghazali melahirkan buah pemikiran pemimpin baru, pemimpin yang mencerminkan figur kepemimpinan Nabi Muhammad saw.

Rumusan pemimpin yang disusun oleh Al-Ghazali berlandaskan kekecewaan terhadap pemimpin, raja, ulama, dan pejabat pada masa Dinasti Saljuk yang mengalami kemunduran, karena terjadinya perebutan tahta dan gangguan stabilitas keamanan dalam negeri. Korupsi nepotisme, ketidakadilan, penyuapan, serta kekejaman.

Pemimpin ideal bagi Imam Al Ghazali adalah pemimpin dengan intelektualitas luas, pemahaman agama mendalam, serta akhlak mulia, seperti yang dicontohkan Muhammad saw dan para sahabat. Inilah sosok pemimpin yang diinginkan oleh Al Ghazali, seorang pemimpin yang membawa perubahan dan pembaruan, menggerakkan bawahan melalui iman dan pengetahuan, dan mencerminkan akhlak yang mulia.

Untuk menjadi seorang pemimpin ideal, ia harus memiliki beberapa kelebihan dibanding figur lainnya, karena kelebih-

dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Senada dengan itu, menurut Ibnu Khaldun, kepemimpinan yang baik membutuhkan kebaikan sekaligus keteguhan hati untuk menjaga rakyat. Ibnu Khaldun menggariskan, kepemimpinan hanya akan ada bilamana terdapat keunggulan dalam diri individu-individu pemimpin. Berikutnya, keunggulan hanya akan muncul bilamana disokong al-asabiyah atau perasaan solidaritas. Seorang pemimpin tidak mungkin tampil ketika tidak ada orang-orang yang bersedia mematuhi.

Oleh sebab itu, kemampuan seorang pemimpin sejatinya diukur dari bagaimana rakyat mematuhi imbauannya. Apakah kepatuhan itu muncul dari rasa takut ataukah rasa sukarela untuk mencapai tujuan-tujuan luhur demi kebaikan bersama. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun merumuskan bahwa seorang pemimpin bisa saja dipatuhi tetapi pemimpin itu tidak bisa memaksa orang-orang untuk menerima kepemimpinannya. Akseptabilitas (proses penerimaan) seperti demikian idealnya datang secara sukarela.



han-kelebihan itulah seorang pemimpin menjadi berwibawa dan dipatuhi oleh bawahannya. Persyaratan pemimpin selalu terkait dengan tiga hal penting, yaitu: kekuasaan, kewibawaan dan kemampuan.

Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin, guna memengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, dan keutamaan sehingga mampu mengatur orang lain, sehingga yang dipimpin patuh, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan atau keterampilan teknis maupun sosial, yang

Perlu pula kita mengingat pesan Rasulullah SAW agar muslim tidak memilih pemimpin yang lemah. Dari Abu Dzar yang mengutip sabda Rasulullah SAW: "Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan benar dan melaksanakan tugas dengan baik." (HR Muslim).

Jadi, cukup banyak referensi atau rujukan tentang bagaimana seharusnya umat Islam memilih pemimpin. Semoga dengan berbagai rujukan ini tak ada lagi kegamangan bagi muslim dan muslimah dalam menghadapi agenda Pilpres, Pilleg dan Pilkada 2024. ♦



ALHAMDULILLAH TETAP TUMBUH DI TAHUN POLITIK

Ekonomi di tahun menjelang Pemilihan Umum lazimnya menghadapi banyak kendala. Namun, alhamdulillah, transaksi bisnis pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023, justru tetap meningkat.

Begitulah, ketika ingar-bingar politik menjelang hari H Pemilihan Umum yang terjadwal pada 14 Februari 2024 semakin riuh, hajatan ekonomi syariah nasional dalam penyelenggaraan ISEF yang berlangsung 25-29 Oktober 2023 tetap bergairah.

Paling tidak, gairah itu terlihat dari jumlah transaksi yang mencapai Rp28,9 triliun. Angka itu menunjukkan kenaikan hampir lima persen, tepatnya 4,7 persen, dari nilai transaksi ISEF 2022 yang tercatat 27,6 triliun pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang lumayan mengingat kondisi perekonomian global maupun nasional yang didominasi distorsi (guncangan) maupun

disrupsi (gangguan) yang bersifat politis semisal perang di Ukraina maupun persaingan politik di tingkat nasional menjelang Pemilu 2024.

Dari sisi omzet, angka yang tercatat malah mendekati Rp40 triliun. "Penyelenggaraan ISEF tahun ini omzetnya menghasilkan hampir Rp 38 triliun atau naik lima persen dari tahun lalu," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat, 3 November 2023.

Oleh sebab itu, lanjut Perry, BI terus bersinergi secara erat dengan pemerintah. Begitu juga dengan perbankan dan instansi lainnya untuk melanjutkan dukungan

pengembangan UMKM serta ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BI adalah penyelenggara ISEF yang pada 2023 merupakan kali kesepuluh sejak penyelenggaraan perdananya. Tak mengherankan jika ISEF 2023 mengusung semangat Satu Dekade Menebar Kebaikan. Seiring sejalan dengan tema resmi Accelerating Sharia Economy and Finance through Digitalization for Inclusive and Sustainable Growth

Toh BI memang tak berjalan sendiri dalam hal ini. Banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam perhelatan ini. Antara lain kolaborasi dengan Komite Nasional



Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), mitra penyelenggara yang meliputi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, MUI, BPKH, BPJPH, BAZNAS, BWI, DSN-MUI, LPPOM-MUI, IHLC, IFC, PPHI, MES, IAEI, HERBITREN (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren), OJK, LPS termasuk mitra strategis internasional antara lain Islamic Development Bank (IsDB), UNDP, IILM, IFSB, dan World Zakat Waqf Forum.

Mengenai nilai transaksi ISEF 2023 yang mencapai Rp28,9 triliun, Head of Sharia Financial and Economic Department BI Arief Hartawan merinci, angka itu mencakup pembiayaan lembaga keuangan syariah, transaksi B to B, transaksi B to C, dan transaksi exhibition ISEF 2023. Khusus untuk kegiatan pameran selama lima hari itu ISEF mencatatkan transaksi senilai Rp 365,42 miliar.

"Termasuk kegiatan FESyar dan akad serentak 2.311 KPR Syariah pada penyelenggaraan ISEF ini," kata Head of Sharia Financial and Economic Department BI Arief Hartawan dalam laporannya saat Closing Ceremony ISEF 2023, di Jakarta Conven-

tion Center, Minggu, 29 Oktober 2023.

Sedangkan Jumlah pengunjung ISEF 2023 mencapai lebih dari 72.930, terdiri dari 28.356 peserta offline dan 44.574 peserta online. Menurut Arief, angka tersebut mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Selain itu, pameran ISEF 2023 turut diramaikan oleh 1.003 pelaku usaha. Kompetisi Eksyar yang diselenggarakan selama tahun ini melibatkan 6.748 peserta dari kalangan pelajar tingkat dasar, menengah, mahasiswa, hingga pelaku usaha umum dan desainer.

ISEF 2023 juga disemarakkan dengan berbagai perlombaan antara lain kesenian islami, fesyen muslim anak-anak, hingga robotika.

ISEF 2023 juga berkolaborasi dengan Halal Expo Indonesia. "Alhamdulillah total transaksi pameran selama penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2023 mencatatkan angka lebih Rp 360,9 miliar," ungkap Arief.

Sejalan dengan kenaikan transaksi, jumlah pengunjung juga mengalami kenaikan hingga lebih dari dua kali lipat dari tahun se-

belumnya, mencapai lebih dari 72.930 pengunjung, terdiri dari pengunjung yang hadir fisik sebanyak 28.356 orang dan peserta online sebanyak 44.574 orang. Capaian penyelenggaraan ISEF 2023 oleh Bank Indonesia bersinergi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) selama satu dekade ini telah menghantarkan ISEF 2023 memperoleh rekor MURI sebagai festival ekonomi keuangan syariah terbesar di Indonesia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, pada penutupan acara menyampaikan bahwa pencapaian signifikan secara global, baik di sektor ekonomi syariah maupun sektor keuangan syariah menjadi prasyarat utama untuk dapat mencapai Visi Menjadi Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia. Hal tersebut yang menjadi fokus Bank Indonesia dalam penguatan ISEF di masa mendatang.

"Penyelenggaraan ISEF ke depan diharapkan dapat berperan secara signifikan menggerakkan sektor-sektor potensial dalam ekonomi dan keuangan syariah untuk tumbuh dan berkembang, sekaligus mampu diperhitungkan dalam

tatanan global,” kata dia.

Lebih lanjut Juda Agung menambahkan, rangkaian acara seperti IN2MF akan terus diperkuat, yang tidak hanya menampilkan karya-karya melalui fashion show melainkan juga memperkuat aspek bisnis dari para desainer, sehingga mampu mendukung eksistensi modest fashion Indonesia di tataran global. Hal serupa yang perlu diperkuat adalah peran ISEF sebagai strategic integrator untuk kegiatan business coaching dan business matching, maupun identifikasi trade opportunity and investment sehingga mampu mendorong eksyar dapat tampil sebagai kontributor signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

ISEF ke 10 tahun 2023 telah menjadi wa-

Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menampilkan 1.478 karya.

Sedangkan Halal Expo Indonesia 2023 yang kegiatannya pertama kali dilaksanakan berkolaborasi dengan ISEF, mencatatkan angka transaksi lebih dari Rp 360,9 miliar. Dalam rangka mendukung akselerasi sertifikasi halal yang difasilitasi Bank Indonesia dan melibatkan mitra terkait, hingga Oktober 2023 telah dihasilkan 17.680 sertifikat halal, 62 Rumah Potong Hewan/Unggas halal, 90 juru sembelih halal, 24 halal center, dan 2.200 pendamping halal bekerja sama dengan perguruan tinggi dan komunitas

lim. Bahkan dengan itu Indonesia dapat menunjukkan potensi dan mewujudkan niat menjadi pusat ekonomi syariah yang sedang berkembang secara global. Secara khusus, perhelatan ini dipandang sebagai saluran penting untuk memperkenalkan pelaku bisnis, portofolio pasar, dan peluang investasi dengan mempertemukan para pemimpin bisnis dan industri syariah dari seluruh dunia.

Untuk ISEF 2023, tampak pula inovasi seperti peningkatan skala penyelenggaraan melalui International Modest Fashion Festival (IN2MF) sebagai fashion modest terbesar. Perry menjelaskan, IN2MF ini menghadirkan 178 desainer serta beragam produk UMKM premium binaan BI. Selan-



dah business matching sebagai kolaborasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) khususnya dengan perwakilan khusus MES di luar negeri yang mempertemukan UMKM binaan dan mitra BI dengan aggregator dan potensial buyer negara Saudi Arabia, Mesir dan Pakistan. Kegiatan ini membuka peluang bagi UMKM untuk dapat memasarkan produknya serta menghasilkan komitmen perdagangan dengan ketiga negara tersebut, dengan potensi ekspor.

Tingginya minat pelaku usaha dalam kegiatan exhibition/pameran tercermin pada jumlah pelaku usaha yang terlibat mencapai 1.003 pelaku usaha secara offline dan virtual dengan nominal transaksi senilai Rp 365,42 miliar. Sementara Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) ke 2 sebagai bagian dari kegiatan ISEF 2023 hadir dengan melibatkan berbagai asosiasi fesyen, komunitas, sekolah mode, institusi, dan Kementerian, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian

perempuan.

Penyelenggaraan ISEF 2023 sebagai panggung ekonomi dan keuangan syariah merupakan hasil kerja berjamaah untuk mendorong majunya perkembangan eksyar di Indonesia. Diharapkan berbagai program dan inisiatif dapat terus berlangsung dengan dukungan berbagai pihak yang terlibat sebagai hamzah washal melalui peran dan kewenangannya masing-masing.

Berkembang pula gagasan serta rencana perluasan ekonomi syariah ke bidang pariwisata yang bertujuan untuk menarik wisatawan dari Timur Tengah, dan negara-negara muslim lainnya, melalui wisata halal. Strategi ini akan memberikan lapangan kerja dan memajukan industri pariwisata Indonesia.

Sejauh ini perhelatan tahunan ISEF berdampak positif pada ekonomi syariah nasional maupun global mengingat Indonesia memiliki sekitar 200 juta warga mus-

lutnya berlangsung pula promosi konsumsi makanan halal melalui Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC) sebagai kompetisi chef berskala internasional untuk mempromosikan kuliner halal Indonesia kepada dunia.

Jadi, ISEF pada 2023 maupun yang berlangsung di tahun-tahun sebelumnya bukanlah sekadar festival atau pameran produk. Banyak kegiatan dalam rangkaian kegiatan lima hari itu. Antara lain, seminar bertaraf nasional dan internasional, business matching, showcase internasional, dan ekshibisi serta berbagai kompetisi.

Penyelenggaraan ISEF ke-10 diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkuat upaya mengintegrasikan pemikiran dan inisiatif seluruh penggiat ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah Indonesia. Inklusif antara kegiatan dunia dan akhirat yang membahagiakan. Sampai jumpa di ISEF tahun depan. ♦

PESAN WAPRES KH MA'RUF AMIN DI AKHIR MASA JABATAN

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tak pernah absen terlibat langsung dalam perhelatan ISEF. Namun, ISEF 2023 adalah yang terakhir dalam jabatannya sebagai Wapres yang sering pula disebut-sebut sebagai Bapak Ekonomi Syariah Indonesia mengingat sumbangan gagasan dan dukungan konkret untuk pengembangan ekonomi umat Islam Indonesia itu.

Nah, pada ISEF 2023 kali ini Kiai Ma'ruf berpesan bahwa Indonesia memiliki banyak aset dan potensi untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi. Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi dan digitalisasi dalam semua sektor. Teknologi transversal, yaitu teknologi lintas sektor yang berdampak multi-industri, merupakan prasyarat bagi seluruh sektor potensial agar sukses menapaki langkah menuju Indonesia Emas 2045.

"Teknologi transversal menjadi penggerak utama pertumbuhan global di masa depan. Tanpa adanya inisiatif strategis untuk mempercepat implementasi teknologi transversal, Indonesia diperkirakan tidak akan optimal dalam pencapaian target PDB pada 2045," ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat menghadiri Pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-10, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2023.

Turut hadir dalam acara ini Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Teten Masduki, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, serta Duta Besar Palestina, Duta Besar Sudan, Duta Besar Maroko, dan Duta Besar Bahrain. Sementara, mendampingi Wapres dalam acara hari ini, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukung Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, dan Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien.

Secara lebih spesifik Wapres menuturkan, penerapan teknologi transversal di sektor ekonomi dan keuangan syariah akan mengakselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah agar menjadi inklusif dan berkelanjutan. "Saya melihat peran vital dari teknologi dan digitalisasi yang akan memungkinkan gerakan ekonomi dan keuangan syariah lebih lincah, adap-

tif, dan transformatif," tuturnya.

Wapres menilai, pemanfaatan digitalisasi dan inovasi digital akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri halal. Oleh sebab itu, Wapres mengapresiasi salah satu wujud digitalisasi dana sosial berupa platform aplikasi "Satu Wakaf Indonesia".

"Saya mengapresiasi pengembangan platform aplikasi "Satu Wakaf Indonesia" yang hari ini diluncurkan. Ini adalah salah satu wujud digitalisasi di sektor dana sosial syariah yang akan meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan wakaf," urai

Menurut Wapres, ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar sebagai penopang perekonomian domestik. Karenanya, perlu kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga Bank Indonesia. Upaya yang perlu dilakukan mencakup percepatan sertifikasi halal, penguatan regulasi dan insentif, infrastruktur Kawasan Industri Halal, pembiayaan syariah yang lebih besar, serta pengembangan produk halal dari skala UMKM hingga skala besar.

Pemerintah juga mendukung implementasi Undang-Undang Pengembangan



Wapres.

Dalam perluasan pemanfaatan digitalisasi, Wapres meminta agar seluruh pegiat ekonomi syariah dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, setidaknya hingga 50 persen. "Ciptakan strategi komunikasi, narasi dan kanal informasi yang sesuai dengan perkembangan terkini. Ini penting agar mudah diterima dan dipahami oleh generasi muda, calon pemimpin masa depan," ujar Wapres.

Wapres lantas meminta seluruh aktor dalam pengembangan ekonomi syariah untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan program ekonomi dan keuangan syariah dengan segera merealisasikan Masterplan Industri Halal Indonesia, yang hari ini diluncurkan. "Saya minta kepada KNEKS, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, bersama Kementerian Keuangan, dan K/L terkait lainnya termasuk Bank Indonesia agar mengawal dan segera merealisasikannya," tegas Wapres.

dan Penguatan Sektor Keuangan serta mendorong sektor pariwisata dan fesyen yang ramah terhadap kebutuhan muslim. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan dana sosial syariah juga diperkuat, serta terdapat fokus pada integrasi dengan ekosistem global halal.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melaporkan bahwa penyelenggaraan ISEF kali ini bertema "Mengakselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Digitalisasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan". Jadi, tema ini mencerminkan tekad segenap aktor ekonomi syariah untuk menjadi hamzah washol, sebagaimana yang sering disampaikan Wapres.

"Tema ini mencerminkan tekad kita untuk berjamaah menjadi hamzah washol dalam mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional dan menghadapi tantangan ke depan," tandas Perry. ♦

PILKADA PROVINSI SUMATERA SELATAN 2024

BAKAL JADI ARENA KONTESTASI TOKOH DAN POLITISI KAWAKAN

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Sumatera Selatan dipastikan bakal menjadi ajang adu kepikawakan para mantan birokrat dan politisi ulung di daerah ini. Mereka akan berkompetisi untuk memenangkan kursi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Periode 2024-2029.





Sederet nama besar dan berpengaruh disebut-sebut bakal mencalonkan diri pada Pemilihan Gubernur Sumsel 2024 di antaranya:

- ▶ H Herman Deru, Gubernur Sumsel 2018-2023
- ▶ H Mawardi Yahya, Wakil Gubernur Sumsel 2018-2023
- ▶ H Ishak Mekki mantan Wakil Gubernur Sumsel, Anggota DPR RI
- ▶ H Eddy Santana Putra mantan Wali Kota Palembang, Anggota DPR RI
- ▶ H Heri Amalindo, Mantan Bupati PALI. Maju dari 27 November Jadi 17 September 2024

Pemerintah dan DPR RI sudah menyepakati bahwa Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024 dimajukan dari jadwal semula 27 November jadi 17 September. Dengan demikian bisa diseragamkan jadwal pelantikan para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, paling lambat Januari 2025.

Apa payung hukum memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota?

Semula Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan, dimajukannya jadwal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu. Namun, dalam perkembangannya, pemerintah

dan DPR RI sepakat regulasi perubahan jadwal Pilkada 2024 dituangkan melalui revisi UU Pilkada.

Penjelasan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto, yang mengaku bahwa fraksinya menerima usulan rencana revisi waktu pelaksanaan Pilkada menjadi 17 September 2024.

Hal itu se usai rapat pleno secara tertutup badan legislasi (Baleg) DPR RI, terkait penyusunan rancangan undang-un-

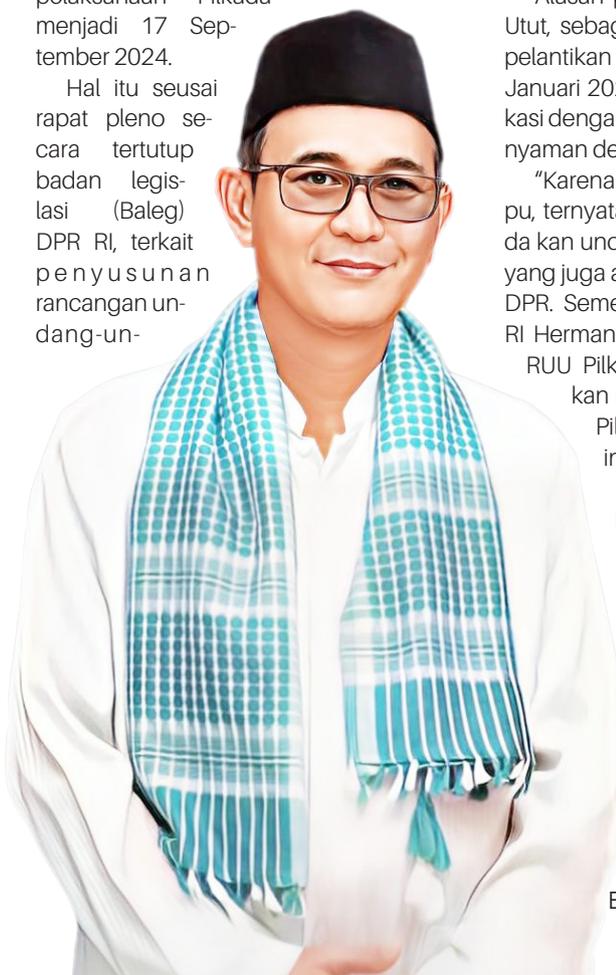
dang (RUU) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Salah satu agenda pleno itu membahas perubahan waktu pelaksanaan pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024 menjadi 17 September 2024.

Alasan perubahan waktu itu, menurut Utut, sebagai upaya keserentakan waktu pelantikan kepala daerah terpilih pada Januari 2025. Setelah DPR RI berkomunikasi dengan pemerintah, pemerintah lebih nyaman dengan undang-undang.

"Karena awalnya, mau dibuatkan Perppu, ternyata harus undang-undang. Pilkada kan undang-undang sendiri," kata Utut yang juga anggota badan legislasi (Baleg) DPR. Sementara itu, anggota Baleg DPR RI Herman Khaeron menilai penyusunan RUU Pilkada perlu segera dirampungkan mengingat waktu pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang makin dekat," katanya.

Sebagian besar Anggota Baleg menyampaikan ini baru inisiasi DPR, setelah ini akan ditindaklanjuti oleh panitia kerja, dan nanti pada masa sidang mendatang akan ada pengambilan keputusan fraksi-fraksi."

"Menurut hemat saya, kalau ini akan dijadikan sebagai skala urgensi, semestinya Perppu. Perppu akan lebih cepat," kata Utut. ♦



H HERMAN DERU YAKIN KEMBALI DIBERI AMANAH

Satu-satunya Calon Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2024 yang sudah berpengalaman jadi gubernur adalah H Herman Deru. Sebab Deru merupakan Gubernur Provinsi Sumsel Periode 2018-2023 berpasangan dengan Wakil Gubernur H Mawardi Yahya.

Berbagai capaian diraih Provinsi Sumsel selama masa kepemimpinan Deru-Mawardi, dengan tag lain "Sumsel Maju untuk Semua" dan Meratakan Pembangunan hingga Pelosok Sumsel.

Ada pula Program 1 Desa 1 Rumah Tahfidz dalam bidang pembangunan mental spiritual. Dan Deru juga

menggagas Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

Deru yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini sudah secara terang-terangan kembali maju pada Pilgub Sumsel 2024.

Ketika ditanya siapa yang akan menjadi pendampingnya sebagai Calon Wagub, dengan mantap Deru mengatakan H Mawardi Yahya.

Wajar jika Deru tetap ingin duet dengan Mawardi, karena keduanya dipandang sebagai sosok yang saling melengkapi. Hubungan mereka terkadang lebih terlihat sebagai adik-kakak daripada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Herman Deru mewarisi kharisma pemimpin dari ayahandanya Alm Haji Hamzah, yang merupakan seorang pasirah. Ia juga banyak belajar dari kepiawaian ayah mertuanya Alm Drs Hm Husni MM mantan Sekda Kabupaten OKU dan mantan Wali Kota Palembang.

Sepanjang masa kepemimpinannya di Provinsi Sumsel 2018-2023, Herman Deru mendapatkan ratusan penghargaan bergengsi. Berbagai julukan disematkan padanya mulai dari Bapak Pembangunan Infrastruktur hingga





Bapak Rumah Tahfidz, sebagai penghargaan atas suksesnya membangun Provinsi Sumsel.

Melalui Program Bantuan Khusus Gubernur, Deru meratakan pembangunan hingga ke desa-desa di pelosok daerah. Tak hanya jalan dan jembatan, Deru juga sangat memprioritaskan aliran listrik PLN dapat dinikmati masyarakat Sumsel.

Berbekal suksesnya memimpin Provinsi Sumsel Periode 2018-2023, Deru optimistis dirinya bersama H Mawardi Yahya akan kembali dipilih oleh rakyat di daerah ini. Ia yakin masyarakat Sumsel masih akan memberikan amanah kepada mereka berdua, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sosok Pemimpin Dekat dengan Rakyat

NAMA H Herman Deru mulai dikenal luas publik di era 1990an sebagai sosok pengusaha muda sukses. Bahkan tidak banyak publik tahu bahwa Deru muda pernah mendedikasikan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga 11 tahun lamanya.

Ia sempat mencalonkan diri dalam

Pemilihan Wali Kota Palembang 1998, yang saat itu belum dipilih langsung oleh rakyat. Deru berpasangan dengan H Eddy Hermanto, namun kalah dalam perole-

Wajar jika Deru tetap ingin duet dengan Mawardi, karena keduanya dipandang sebagai sosok yang saling melengkapi. Hubungan mereka terkadang lebih terlihat sebagai adik-kakak daripada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

han suara dari pasangan H Eddy Santana Putra MT dan H Tolha Hasan.

Begitu Kabupaten OKU dimekarkan menjadi Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten OKU Timur, nama Deru langsung santer disebut bakal menjadi Bupati Pertama OKU Timur.

Deru dikenal sebagai sosok pemimpin hebat, dengan kesuksesannya memimpin Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur selama dua periode 2005-2010 dan 2010-2015. Ia pun tidak berganti pasangan selama menjabat Bupati OKU Timur itu, Wakil Bupati H Cholid Mawardi.

Pada Pilkada Provinsi Sumsel 2013, Deru berpasangan dengan Hj Maphilinda kalah dari Pasangan H Alex Noerdin dan H Ishak Mekki.

Di Pilkada Provinsi Sumsel 2018, Deru yang berpasangan dengan H Mawardi Yahya berhasil menang atas saingan terdekatnya H Dodi Reza Alex yang berpasangan dengan H Giri Ramandha Kiemas. ♦

IR H MAWARDI YAHYA

TETAP PILIH CAWAGUB, TAPI HARUS PATUH PADA PERINTAH KETUA UMUM

WAKIL Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Periode 2018-2023 Ir H Mawardi Yahya dikenal sebagai politisi senior, bukan saja di tingkat daerah melainkan di tataran nasional pula. Setidaknya, itu terbukti, begitu keluar dari Partai Golkar dan bergabung ke Partai Gerindra.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan langsung bahwa Ir Mawardi Yahya telah bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya itu. Dan terhitung sejak diumumkan H Prabowo Subianto pada 27 April 2023, Ir H Mawardi Yahya menjabat Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra.

Sebelumnya, ia dikenal sebagai tokoh senior di DPD Partai Golkar Sumsel. Bahkan jauh sebelum dirinya menjadi Bupati Ogan Ilir (OI), di mana ia menjadi Ketua DPRD.

Oleh Gubernur Sumsel Periode 2018-2023 H Herman Deru, Mawardi Yahya sudah diumumkan akan kembali berpasangan dengan dirinya sebagai Bakal Cawagub Pilkada Provinsi Sumsel 2024. Tapi mengapa belakangan santer disebutkan, Mawardi sebagai salah satu bakal calon gubernur Sumsel 2024?

Mawardi sendiri sebetulnya tidak berambisi untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur (Cagub) Sumsel. Ia siap berpasangan kembali dengan H Herman Deru sebagai Cawagub 2024.

Akan tetapi, jangan lupa. Mawardi sekarang adalah Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra. Bisa saja Ketua Umum Partai Gerindra H Prabowo Subianto memerintahkan Mawardi untuk mencalonkan diri pada Pilkada Provinsi Sumsel 2024.

"Kalau itu yang terjadi, diperintahkan oleh Pak Ketua Umum, maka tidak ada alasan, saya harus patuh," kata H Mawardi Yahya seperti dikutip sumber yang dekat dengannya.

Terlebih, Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel Hj Kartika Sandra Desi mengatakan, bahwa saat ini pihaknya punya 3 tokoh yang bisa maju ke Pilkada Provinsi Sumsel. Ia menyebut nama Ir H Mawardi Yahya, Ir H Eddi Santana Putra MT, dan H Saifudin Aswari SE.

Politisi Kawakan dan



Bertangan Dingin

IR Mawardi Yahya dikenal sebagai sosok dengan kepribadian hangat, sehingga bisa bersahabat dengan semua orang. Sifatnya mengayomi dan lebih banyak mendengar. Bagi masyarakat luas, ia dikenal sebagai sosok pemberi solusi atas berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dunia politik memang sudah lama digeluti Mawardi, ketika masih belia ia bergabung dengan Partai Golkar di Sumsel. Jabatan publik sebagai anggota DPRD bahkan Ketua DPRD sudah berulang kali diembannya.

Bankan ketika mencalonkan diri pada Pilkada Kabupaten Ogan Ilir pada 2005, Mawardi merupakan Ketua DPRD Kabupaten OI. Ia pun sukses menjadi Bupati OI Periode 2005-2010. Tak satu periode saja. Mawardi kembali menjadi Bupati OI Periode 2010-2015.

Ir H Mawardi Yahya yang oleh masyarakat Ogan Ilir (OI) disapa dengan panggilan karib Wak Uban ini dikenal juga sebagai ahli strategi politik. Selain mampu merancang sukses untuk karirnya sendiri, ia juga bisa menjadi "konsultan" politik bagi tokoh-tokoh lainnya.

Dikabarkan, ada campur tangan Mawardi juga dalam sukses adiknya Ir H



Ridho Yahya sukses menjadi Wali Kota Prabumulih dua periode.

Putra sulungnya M Wazir Noviadi pun sukses menjadi Bupati Ogan Ilir pada 2015, juga tidak lepas dari tangan dingin Mawardi.

Tak hanya Noviadi. Sang adik H Panca Akbar Mawardi pun mengikuti garis sukses yang sama. Pada 2020, Panca terpilih jadi Bupati Ogan Ilir dengan usia yang masih sangat muda berpasangan

dengan Wakil Bupati H Ardani, yang merupakan birokrat ulung yang karir PNS-nya sebagian besar dihabiskan di Biro Hukum Pemprov Sumsel.

Itu hanya sebagian kecil success story-nya. Masih ada beberapa kepala daerah, yang mendapat setidaknya nasihat politik atau sentuhan dari Mawardi. Termasuk di antara para penjabat kepala daerah sekarang. ♦



PJ GUBERNUR SUMATERA SELATAN AGUS FATONI IIPK BSB HARUS BERPERAN OPTIMAL DALAM MENGATASI STUNTING DAN KEMISKINAN EKSTREM



Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni mengharapkan, Ikatan Istri Pegawai dan Karyawan (IIPK) Bank Sumsel Babel (BSB) lebih maksimal dalam membantu Pemerintah Daerah (Pemda) menurunkan angka stunting.

Harapan itu disampaikan Pj Gubernur saat menerima silaturahmi dari Ketua IIPK BSB Wina Ramdiana bersama jajarannya di Griya Agung, Palembang, Kamis (16/11/2023).

Fatoni didampingi oleh Pj Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumsel Tyas Fatoni, Kepala Biro Humas Protokol Tony Kurniawan dan beberapa Kepala OPD terkait lainnya.

IIPK yang anggotanya adalah para ibu, kata Pj Gubernur, memiliki peran penting. Untuk itu peran IIPK harus dimaksimalkan, baik internal maupun eksternal. Peran eksternal bisa dilakukan bersama organisasi wanita untuk masyarakat yaitu dalam penurunan stunting.

"Bisa dengan program anak asuh stunting. Di masing-masing cabang BSB bisa diambil anak asuh, per wilayah 100 orang anak asuh," kata Fatoni.

Peran IIPK dalam menurunkan stunting melalui berbagai program kegiatan yang ada di dalam organisasi sangatlah penting. IIPK bersinergi dengan pemerintah dalam menangani kemiskinan ekstrem melalui CSR BSB, dengan menjadi orangtua angkat.

Bisa juga menjadi pembina keluarga miskin dengan membina kewirausahaan, memberikan sosialisasi kepada



masyarakat untuk memanfaatkan kebun atau pekarangan rumah dengan menanam sayuran ataupun buah-buahan.

"Dengan menanam sendiri di kebun, ini sebagai upaya kita menghindari inflasi. Buatlah program yang bermanfaat bagi masyarakat bukan seremonial belaka. Bahkan IIPK bisa bekerjasama dengan OPD di lingkungan Pemprov Sumsel", ucap Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Wina Ramdiana menyampaikan organisasi IIPK BSB didukung sepenuhnya melalui CSR BSB dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan pendidikan.

"Sebagai organisasi, secara internal lebih fokus kepada pembinaan karyawan dan anggota," ujarnya.

Wina pun menyambut baik usulan Pj Gubernur Sumsel agar IIPK berkoordinasi dengan OPD dan organisasi wanita lainnya.

"Kami selalu berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan bekerja sama dengan PKK juga organisasi-organisasi wanita lainnya", ucapnya.

Dalam kesempatan itu Wina turut mengundang kesediaan Pj Ketua TP PKK

Sumsel Tyas Fatoni untuk membuka kegiatan turnamen bola voli yang akan

diselenggarakan pada 18 November mendatang. ♦





GANDENG BKKBN, PJ GUBERNUR SUMSEL AGUS FATONI KEJAR TAGET TURUNKAN ANGKA STUNTING

► Akan Dikukuhkan Jadi Bapak dan Bunda Asuh Stunting

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni mengajak jajaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumsel bersinergi dalam menurunkan angka stunting.

Ajakan itu disampaikan Pj Gubernur saat menerima audiensi Kepala BKKBN Sumsel Medi Heryanto beserta jajaran di Griya Agung Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (16/11/2023).

"Saya berharap BKKBN Sumsel, menjalin kerja sama dengan dinas terkait, baik di Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Tujuannya, bersama-sama dan berkoordinasi menurunkan angka stunting," ungkap Pj Gubernur.

Tidak itu saja. Fatoni juga meminta BKKBN segera melakukan rapat teknis bersama dinas terkait, mitra kerja, serta tim teknis. Rapat teknis ini untuk memantapkan segala persiapan guna mem-

percepat penurunan stunting di tahun berikutnya.

"Kita bersyukur bahwa angka stunting di Sumsel ini cukup baik. Namun kita juga jangan cepat puas dengan capaian tersebut. Sebisa mungkin kita terus berupaya, bersatu padu terus turunkan stunting di Sumsel," Fatoni mengingatkan.

Tak sekadar berharap. Fatoni langsung menginstruksikan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel segera membuat surat edaran, yang ditujukan ke Bupati/Walikota terkait orangtua asuh anak stunting.

"Nanti kita surati Kabupaten/Kota untuk mengangkat lebih banyak orang tua asuh, ini harus ada di setiap daerah untuk membina orang tua bayi stunting dan me-



mantau serta memberikan nutrisi serta gizi yang cukup untuk anak stunting. Bukan hanya itu juga tugasnya juga fokus pada pencegahan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel Medi Heryanto mengharapkan kesediaan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menghadiri puncak acara Pemilihan Duta Genre pada tanggal 28 November 2023.

Ia juga meminta kesediaan Pj Gubernur dan Pj Ketua TP PKK Sumsel menjadi Ayah dan Bunda Genre serta Bapak dan Bunda Asuh Stunting di Sumsel, yang akan dikukuhkan langsung oleh Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo.

“Alhamdulillah, hari ini kami berkesempatan untuk bersilaturahmi langsung bersama Bapak dan Ibu Gubernur. Dalam kesempatan ini kami ingin mengundang Bapak dan Ibu bisa hadir dalam puncak acara duta genre Sumsel,” pinta Medi.

Terkait dengan atensi Pj Gubernur dalam hal penurunan angka stunting, Medi Heryanto mengatakan pihaknya terus menggencarkan gerakan yang akan berpengaruh dalam penurunan angka stunting Sumsel.

“Alhamdulillah angka stunting di Sumsel ini turun berada di angka 6,2 persen, termasuk capaian terbaik di Indonesia.

Saya yakin tahun depan ini akan turun lagi melalui berbagai upaya yang kita lakukan,” katanya optimistis. ♦





IR H EDDY SANTANA PUTRA MT
**WALI KOTA YANG BIKIN
WARGANYA BANGGA
JADI WONG PALEMBANG**

Eddy Santana Putra, mantan Wali Kota Palembang yang hingga kini masih dianggap warga Palembang sebagai wali kota mereka, sudah menyatakan akan maju di Pilkada Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 2024.

Pertanyaan Anggota DPR RI Asal Sumatera Selatan dari Partai Gerindra ini pun disambut gembira banyak pihak. Sebab perjuangan dan kinerja Eddy saat membangun Kota Palembang belasan tahun silam tetap dikenang dengan baik oleh masyarakat Sumatera Selatan.

Di antaranya, Eddy hingga kini masih dikenang jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sebagai Wali Kota bersih. Selama masa jabatan Ir H Eddy Santana Putra MT sebagai Wali Kota Palembang Periode 2003-2008 dan Periode 2008-2013, tidak ada istilah jual beli kursi. Para pejabat diangkat sesuai kompetensi dan prestasi mereka.

Ucapan Eddy Santana yang juga tidak akan dilupakan orang adalah; Kepala Daerah tidak usah korupsi, sebab sudah kaya. Selama 5 tahun masa jabatan, gaji Kepala Daerah itu utuh dalam rekening. Karena dari urusan terima tamu hingga beli bawang dan cabai untuk keperluan dapur si kepala daerah, semua sudah ditanggung negara. Apa lagi yang kurang?

Saat jadi Wali Kota Palembang, Eddy Santana merupakan yang paling muda menduduki jabatan itu dulu. Karena itu, para pejabat yang tidak bisa mengikuti irama kerjanya mengaku sangat keteteran. Demi membangun Palembang menjadi kota yang bersih dan indah, Eddy di awal-awal pemerintahannya pada 2003-2004 bekerja hampir 24 jam dalam sehari.

Di era 1990-2000an awal, Palembang dikenal sebagai salah kota paling kotor di Indonesia. Dampak semerawut dan kotornya kota menjadi sangat ekstremnya; warga Palembang dianggap masyarakat kriminal dan tidak berbudaya. Lebih parahnya lagi, warga Palembang jadi malu dan takut mengakui kota asal mereka ini.

Memang tidak ada yang bisa dibanggakan di Kota Palembang saat Eddy Santana pada 2003 itu. Di mana-mana bagian kota ini semerawut, kumuh, bau busuk dan pesing, macet. Sudah itu, angka kriminalitas tinggi.

Alhamdulillah.. begitu Eddy Santana dilantik pada pertengahan 2003, secara bertahap, cepat, dan terarah pembenahan dilakukan. Mulai dari kawasan Jembatan Ampera, pembersihan di Kota Palembang dilakukan secara terpadu. Gagap gempita. Masyarakat yang tidak siap menghadapi tekad kuat Eddy Santana membenahi Kota Palembang kalang kabut.

Tidak sekadar berpikir dan bekerja cerdas serta tenaga kuat, Eddy juga terkadang harus memerintah dengan tangan besi. Preman-preman yang coba mengganggu program kerja Pemkot Palembang dihabisi dengan caranya sendiri, semua preman

dibuat takluk dan jadi pendukung setianya.

Walhasil, Eddy Santa di periode pertama Wali Kotanya sukses menjadikan Palembang bersih, indah, dan tertib. Masyarakat pun bangga jadi Wong Palembang. Eddy Santana Putra dan H Tolha Hasan menyelesaikan masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Periode 2003-2008.*

Anggota DPR RI yang Benar-benar Mewakili Daerahnya

KERJA keras Eddy Santana Putra sebagai Wali Kota Palembang pada periode pertama membuahkan hasil yang dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun Eddy tak mengendorok semangat dan kinerjanya pada masa jabatan kedua Wali Kota Palembang Periode 2008-2013.

Palembang jadi kota kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel)

TEMPAT LAHIR / TGL LAHIR: Pangkal Pinang / 20 Januari 1957

AGAMA: Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

- ▶ SD, SD YSP PUSRI, PALEMBANG. Tahun: 1964 - 1969
- ▶ SMP, SMP YKKP PUSRI, PALEMBANG. Tahun: 1970 - 1972
- ▶ SMA, SMA XAVERIUS I, PALEMBANG. Tahun: 1973 - 1975
- ▶ S1 TEKNIK SIPIL, UNIVERSITAS SRIWIJAYA, PALEMBANG. Tahun: 1976 - 1984
- ▶ S2 MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR, UNIVERSITAS SRIWIJAYA, PALEMBANG. Tahun: 2001 - 2004

RIWAYAT PEKERJAAN

- ▶ Pemkot Palembang, Sebagai: Walikota Palembang. Tahun: 2003 - 2013
- ▶ Tata Kota Palembang, Sebagai: Kepala Dinas. Tahun: 2002 - 2003
- ▶ Dinas PU Sumatera Selatan, Sebagai: Kepala Dinas. Tahun: 2000 - 2002
- ▶ Dinas Kimpraswil Kota Palembang, Sebagai: Kepala Dinas. Tahun: 1999 - 2000
- ▶ Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai: Kasubdin Bina Manfaat dan Pengairan Perdesaan. Tahun: 1997 - 1998
- ▶ Sub Dinas PU Pengairan Sumatera Selatan, Sebagai: Pimpro Peningkatan/ Pengembangan SitusKerajaan Sriwijaya. Tahun: 1994 - 1998
- ▶ Dinas PU Pengairan Sumatera Selatan, Sebagai: Pimpro Pengembangan Rawa(Reklamasi) Kotamadya Palembang. Tahun: 1993 - 1998
- ▶ Dinas PU Sumatera Selatan, Sebagai: Pimpro O dan P Jaringan Irigasi Kotamadya Palembang. Tahun: 1992 - 1993
- ▶ Dinas Pengairan Dinas PU Sumatera Selatan, Sebagai: Staff Sub Dinas. Tahun: 1989 - 1992
- ▶ PU Kabupaten Musi Lawas, Sebagai: Kasubsi. Tahun: 1986 - 1988

sekaligus dikagumi warga daerah-daerah lain di Indonesia. Mereka ikut bahagia melihat Palembang yang dulu kumuh kini menjadi bersih, tertib, dan indah.

Usai masa jabatan Wali Kota Periode 2008-2013, Eddy melanjutkan pengabdianya kepada bangsa dan negara sebagai Anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Ia pindah dari PDI Perjuangan, di mana ia pernah menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumsel. Sebelum ke PDI Perjuangan, Eddy merupakan kader Partai Golkar.

Berbeda dengan ketika menjadi Wali

Kota Palembang, sebagai Anggota DPR RI Eddy kini berjuang untuk masyarakat Sumsel, terutama konstituennya yaitu Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1.

Saat menyatakan akan mencalonkan diri pada Pilkada Provinsi Sumsel 2024, Eddy mengatakan banyak pembangunan dan pembenahan yang harus dan akan dilakukannya. Termasuk di Kota Palembang sekalipun.

Mengenai keinginan besarnya kenapa mau mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumsel, karena dirinya ingin membereskan Sumsel dari segi Pembangunan.

"Harus ada yang dibangun, ini (Nasrun Umar) urusan Kota Palembang, kalau saya jadi Gubernur, saya juga bisa jadi walikota dalam tanda kutip otoritas kewenangan dan anggarannya. Saya ajak Walikota (sambil pegang tangan H.Nasrun Umar)

ini payo oy kenapa Palembang ini gelap lampu ini ya kan, kenapa makin kotor saja kota ini," ujarnya.

"Mohon maaf ini-mohon maaf, semenjak saya tinggalkan Palembang ini mandek, malah turun Kota ini di seluruh sektor, nah ini sangat disayangkan, kita capek-capek urusannya sampai jarang tidur, malah jadi begini, mudah-mudahan tolong dukung saya jadi Gubernur, jadi saya bisa membereskan urusan kota ataupun kabupaten, itulah yang harus kita lakukan, termasuk lingkungan," tegas Eddy. ♦



Calon Senator DPD

SIAPA SANGGUP TEMBUS DOMINASI PEREMPUAN

Empat senator, anggota Dewan Perwakilan Daerah, asal Sumatera Selatan periode 2019-2024 merupakan perempuan politisi. Bagaimana peta persaingan pada Pemilu 2024?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan telah mengumumkan Daftar Calon Tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029. Empat petahana Anggota DPD asal Sumsel periode 2019-2024 bersaing ulang. Siapa yang sanggup menembus dominasi petahana yang semuanya perempuan?

Yang serius menjadi penantang petahana, salah satunya adalah Agung Wijaya, 27. Pemuda advokat ini, menjadi caleg pendatang baru di bursa Pileg 2024 DPD RI.

Awalnya sempat bergabung di salah

satu partai politik (parpol) dan ingin maju di pileg DPRD di Sumsel. Pengalamannya berorganisasi di parpol sebelumnya, membuatnya tahu tentang peta-peta politik, meskipun sekarang dia tidak membawa bendera partai untuk maju di Pileg 2024.

Sebagai pendatang baru, Agung Wijaya sadar dia akan bersaing dengan caleg-caleg petahana atau caleg baru dengan back up keluarga politisi berpengalaman seperti anak dan istri kepala daerah, kepোনakan wakil rakyat hingga keluarga salah satu menteri di Indonesia.

"Walau tidak mempunyai background pejabat, saya sebagai warga biasa bisa me-

wakili pemuda untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat khususnya di Sumsel. Kata orang itu, harus memulai dari nol," ucapnya sebagaimana dikutip dari sejumlah media.

Kuasa hukum Lina Mukherjee ini juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi pemuda, salah satunya organisasi BPPH Pemuda Pancasila (PP). O ya, Lina Mukherjee adalah pegiat media sosial TikTok atau Tiktoker yang terilit perkara penistaan agama hingga divonis pengadilan dengan hukuman pidana dua tahun penjara.

Sedangkan Agung sebagai advokat,

tergabung di Posbakkum Pengadilan Negeri Palembang. Ia juga menjabat Ketua Advokasi di Lembaga Investigasi Negara (LIN) di Sumsel dan koordinator bidang hukum dan tata negara di BPPH Pemuda Pancasila Sumsel.

Agung Wijaya mempunyai tujuan khusus saat menduduki kursi senator, yakni mengembangkan daerah otonomi baru di Sumsel. Salah satunya pemekaran daerah Sumatera Selatan Bagian Tengah (Sumbagteng) guna menunjang perekonomian Sumsel lebih maju lagi.

Tekad Agung Wijaya sudah bulat, selain mantap untuk memperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat, dengan restu orang tua tunggalnya. "Sudah mendapat restu dari ibu, karena memang orang tua saya tinggal ibu. Karena ayah sudah almarhum, inilah yang menjadi bekal bagi saya untuk dapat ikut mengabdikan ke masyarakat," tandasnya.

Jika cita-citanya menjadi senator DPD tercapai, Agung Wijaya, akan berjuang untuk memperbaiki Sumsel yang lebih sejahtera. "Sebagai pemuda, kita mendengar dan melihat fenomena apa yang terjadi di masyarakat Sumsel. Tentu jika hal tersebut positif akan kita dukung. Sebaliknya jika negative, tentu akan kita benahi bersama-sama," tandasnya.

Salah satu yang dia kemukakan adalah terkait pengembangan daerah baru, seperti bakal lahirnya Provinsi baru yakni Sumsel Barat. Menurutnya, dengan berkembangnya wilayah di Sumatera Selatan, tentu akan mempercepat perkembangan ekonomi kerakyatan. "Kalau

memang ada rezeki menjadi DPD RI, saya akan mengupayakan pembentukan DOB di Sumsel, untuk kemajuan ekonomi dan infrastruktur," untkan-

nya.

Hal lain yang dia sampaikan adalah akan berjuang untuk kesejahteraan yatim piatu. "Fakir miskin, orang tertinggal dan yatim piatu dipelihara oleh negara. Ini juga akan saya perjuangkan. Karena saya tahu betul bagaimana menjadi anak yatim. Dengan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap anak yatim piatu, diharapkan ke depan mereka dapat menyongsong masa depan yang lebih gemilang," untkannya.

Agung Wijaya juga hirau dengan kesetaraan pendidikan dan lapangan kerja. "Jadi tidak serta merta anak muda harus menjadi abdi negara. Bisa juga melalui keahlian atau skill mereka dibantu untuk pengembangan

usaha. Bahkan kita harapkan dari mereka dapat menciptakan lapangan kerja

baru," tandasnya.

Selain Agung Wijaya, satu advokat lain yang maju sebagai calon senator DPD asal Sumsel adalah Muhammad Aminuddin yang menyerahkan satu berkas pencalonan sejak 26 Desember 2022. Advokat yang kerap disapa Amin Tras ini memutuskan maju mendapatkan dukungan dari keluarga dan rekan sejawatnya di DPD KAI Sumsel.

Bercermin pada penegakan hukum faktual sepanjang lima tahun terakhir, juga carut marut peraturan perundang-undangan, Amin Tras memiliki niat luhur yang melandasi pencalonannya. "Saya bertekad ingin memperjuangkan untuk dapat kembali menegakkan supremasi hukum di Tanah Air dengan menghasilkan UU dan aturan yang efektif dan memenuhi rasa keadilan. Inilah yang menumbuhkan semangat saya ini untuk kembali berjuang di politik ini dengan menjadi calon DPD RI," ungkap advokat yang berkantor di Palembang ini.

Ia mengaku pernah gagal sebagai calon DPD pada Pemilu 2019. Namun ia belum jera menempuh jalur politik ini. "Sebelumnya saya mencalonkan diri melalui jalur DPD RI pada pemilu 2019 di Senayan, tapi tidak lolos. Namun kali ini saya ambisi memenangi pemilu 2024 mendatang yang mencapai 500 ribu suara. Dari catatan admin kami, jumlah suara ini jauh lebih tinggi dari perolehan suara pada pemilu sebelumnya," ungkap

Ketua DPP Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi (GNPK) Provinsi Sumsel ini.

Lain lagi dengan calon Senator DPD asal Sumsel Muhammad Reza Farisyi. Ia mengemukakan ingin mendermakan diri berpartisipasi aktif lebih jauh untuk menyerap aspirasi masyarakat guna membangun Sumatera Selatan melalui jalur DPD. "Kontribusi konkret seorang anggota DPD RI itu jelas kepada daerah yang diwakilinya, bukan hanya kepada pendukungnya saja, Sejatinya menjadi anggota DPD RI bukan

menyerahkan syarat dukungan lima ribu salinan KTP dari ketentuan minimal tiga ribu KTP ke KPU Sumsel pada Sabtu, 31 Desember 2022.

Dukungan tersebut tersebar merata di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan yang berasal dari keluarga, mitra, teman hingga organisasi karena dia aktif melakukan berbagai kegiatan keorganisasian. Berkas pendaftaran tersebut diserahkan langsung Reza didampingi kedua orangtuanya, istri dan tim ke KPU Sumatera

lang sukses mampu 'menghipnotis' audiens intelektual yang hadir.

Nur Kholis pernah mengemukakan salah satu konsep dan gagasan yang ia bawa, membangun Pariwisata Darat di Sumsel. Nur Kholis punya mimpi besar ingin melihat Sumsel punya pariwisata darat yang menjadi magnet kuat untuk menarik wisatawan.

Dalam pengembangan pariwisata ini, Nur Kholis akan mengadopsi Pariwisata Kota di Korea Selatan yang dikenal pu-



pula seperti aktor atau aktris promosi iklan atau dan film meskipun tidak hanya politik semata," ungkap pemuda yang menjadi Koordinator Wilayah Sumsel organisasi kemasyarakatan 234 Solidarity Community (234 SC).

Reza terdaftar sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029 setelah mengembalikan formulir dan

Selatan yang diterima oleh Ketua KPU, Amrah Muslimin.

Tak kalah serius maju sebagai calon senator DPD asal Sumsel adalah Nur Kholis. Pria kelahiran 21 Oktober 1970 itu, dipastikan akan maju pada calon DPD RI. Nur Kholis yang sarat pengalaman, karena lama berkecimpung di Komnas HAM, mantan Ketua LBH Palembang, Panwaslu Palembang dan Penasehat Kapolri, terbi-

nya potensi yang sama dengan Sumsel tapi lebih maju. "Di Korea Selatan, dikenal sebagai wisata daratnya. Kelebihannya sebenarnya hanya narasinya yang menarik. Di Sumsel juga bisa seperti itu, kita punya sejarah dan peninggalan kerajaan Sriwijaya, tinggal bagaimana membuat narasinya. Nah, DPD RI di sini berperan supaya pengembangan pariwisata darat di Sumsel ini bisa diperjuangkan di pusat dan

dibantu APBN,” ucap, lulusan Master of Art (M.A.) 2008 dari Universitas Sung Kong Hoe, Korea Selatan.

Untuk melihat dampak pariwisata, tidak sekadar melihat Sumsel ramai pengunjung wisatawan, tapi fenomena ini justru menggerakkan bidang yang lain. “UMKM ikut bergerak, anak muda menjadi dapat lapangan pekerjaan, perekonomian warga lebih baik. Daerah lain seperti Lahat dan kota-kota lainnya nantinya juga akan merasakan dampaknya. Karena kota-kota lain



juga punya destinasi wisata, baik dari sisi sejarah dan lain sebagainya,” jelasnya.

DPD RI punya kekuatan itu. DPD RI bisa memberikan rekomendasi buat itu. Ia punya pengalaman soal itu, karena lama bergelut di Komnas HAM, yang sejatinya sama, yakni lembaga yang lebih pada memberikan rekomendasi.

“Sederhana memang, tapi setelah direkomendasikan, dalam mencapai goalnya

yang penting. Melakukan lobi-lobian dan terus mengawal rekomendasi itu supaya bisa diwujudkan. Jadi saya tak hanya ingin jadi anggota DPD RI, jadi bisa mengambil keputusan dan memberikan dampak positif bagi Sumsel,” ucapnya.

Apakah para kandidat senator tadi dapat menembus dominasi petahana yang semuanya perempuan? Tambahan pula, beberapa pendatang baru juga bergender perempuan. Katakanlah Azzahrazade, perempuan dokter yang beribukan anggota DPR.

Azzahrazade juga diketahui sebagai keponakan politisi PAN M Hatta Rajasa.

Perempuan berusia di awal 30 ini pun mengakui pengaruh keluarga besarnya hingga terjun ke dunia politik, terutama ibu

kandidat Anggota DPD asal Sumsel tentu saja Ratu Tenny Leriva yang juga putri bungsu Gubernur Sumsel periode 2018-2023 Herman Deru.

Pengamat politik Sumatera Selatan Arianto mengatakan, sejumlah tokoh calon DPD RI Dapil Sumsel seperti Ratu Tenny Leriva berpotensi mengancam petahana DPD RI atau menggeser empat besar DPD RI saat ini. Menurut dia, temuan survei terakhir Desember 2022 lalu nama Ratu Tenny Leriva Herman Deru masuk dalam posisi empat besar calon DPD RI Dapil Sumsel di kisaran 25 persen.

“Jadi, Ratu Tenny ini sangat berpotensi besar duduk sebagai anggota DPD RI periode 2024-2029,” kata Arianto yang juga Direktur Eksekutif LKPI Palembang.

Lahir di Palembang pada 10 Juni 2000,



kandungnya sendiri, Hanna Gayatri.

Sejak 2009, Hanna Gayatri duduk sebagai anggota DPR RI dari partai PAN, dan dari sanalah dr Azzahrazade menjadikan ibunya sebagai inspirasi. Apalagi saat ibunya berinteraksi, mendengar dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

“Ibu saya, Hanna Gayatri, sejak 2009 sampai sekarang masih menjabat sebagai anggota DPR RI dari partai PAN, dapil 2 Sumatera Selatan, dan sering sekali pulang ke dapil dan bertemu masyarakat.

Walaupun keluarga saya banyak figur yang aktif berpolitik, justru saya muncul ketertarikan di bidang politik saat melihat ibu saya berinteraksi, mendengar dan menyampaikan aspirasi masyarakat. “Saya merasa sekolah tinggi tinggi, tapi rasanya tidak ada yang mampu mengalahkan kebaikan turun langsung dan berada di tengah masyarakat,” ujarnya.

Perempuan dokter lainnya yang sangat layak diperhitungkan dalam persaingan

selain lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Ratu Tenny juga pernah dinobatkan sebagai Duta Anti Narkoba. Tambahan pula ia aktif di dunia pendidikan.

Anak ke-empat Herman Deru ini bahkan memiliki sekolah kejuruan yang didedikasikan untuk anak-anak di daerah. Selain mendedikasikan diri di dunia pendidikan, Ratu Tenny Leriva juga memiliki sederet bisnis yang dikelolanya. Gadis ini sudah mengelola bisnis 3D Stable Palembang dan 3D Carwash Palembang.

Nah, banyak lelaki politisi bersaing menjadi anggota DPD RI asal Sumsel pada pemilu 2024 menghadapi petahana. Tambahan pula, perempuan politisi berprestasi pun ikut pula sebagai kandidat dalam kontes kali ini. Bagaimana hasilnya?

Kita semua akan mengetahui pada saatnya setelah Hari H pemungutan suara 14 Februari 2023. Semoga yang terbaik akan berada di Senayan. ♦



KIAN BERKURANG CALON SENATOR KITA

Hanya sekitar seribu orang yang mengakses sistem pencalonan senator Dewan Perwakilan Daerah dari seluruh Indonesia. Alhasil, yang terdaftar setelah lolos semua persyaratan hanya 668 orang. Inilah angka calon terendah sejak pemilihan Senator DPD berlangsung pada 2004.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Hasyim Asy'ari mengemukakan, total pengakses sistem pencalonan tepatnya mencapai 1.030 orang. Dari 1.030 orang tersebut, yang mengikuti penyerahan dukungan jumlahnya 865 orang, dan hanya 701 orang yang memenuhi syarat dukungan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan 668 orang calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masuk dalam daftar calon tetap (DCT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Dari yang memenuhi syarat dukungan 701 itu yang pada akhirnya mendaftarkan diri pada masa pendaftaran calon anggota DPD tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 itu jumlahnya adalah

683 orang," kata Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 3 November 2023.

Alhasil, lanjut Hasyim, total daftar calon tetap anggota DPD berjumlah 668 orang. "Rinciannya laki-laki 535 orang, kemudian untuk perempuan 133 orang," sambungnya.

Sebelumnya, setelah melalui tahap verifikasi dan perbaikan verifikasi, KPU mengumumkan 675 orang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon anggota DPD. Dari jumlah itu, 674 orang berhasil masuk daftar calon sementara (DCS) anggota DPD. Satu orang mengundurkan diri memilih untuk menjadi calon anggota DPR.

Dalam tahap se usai pengumuman DCS, terdapat empat orang bakal calon anggota DPD yang mengundurkan diri dan dua

orang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Hasyim pun menjelaskan bahwa dari dua orang tersebut, satu orang tidak memenuhi syarat karena tanggapan dari masyarakat, sedangkan satu orang lagi karena belum melewati masa jeda 5 tahun untuk maju sebagai caleg setelah selesai menjalani proses pidana.

"Berdasarkan data yang kami peroleh dari lembaga penegakan hukum, itu ada satu orang yang belum memenuhi genap masa jeda lima tahun sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat," kata dia.

Sebagai bahan perbandingan, DCT anggota DPD pada pemilu 2019 mencapai 807 orang. Pada pemilu 2014 tercatat 946 orang. Selanjutnya, saat pemilu 2009, tercatat 1.116 orang. Ketika Pemilu 2004, saat pemilihan anggota DPD pertama ka-



linya, tercatat 933 orang yang masuk DCT. Maka dua Pemilu terakhir, 2019 dan 2024 menunjukkan kursi DPD cenderung kian sepi peminat.

Ada yang mengemukakan persyaratan menjadi anggota DPD menjadi kendala yang mengurangi minat politisi memilih jalur ini. Memang, mendaftarkan diri saja, caleg DPD RI yang merupakan calon per-seorangan/nonpartai harus menghimpun sejumlah syarat dukungan. Misalnya bunyi Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan persyaratan bagi yang berminat menjadi senator DPD:

1. Minimal 1.000 dukungan di provinsi dengan jumlah pemilih kurang dari satu juta
2. Minimal 2.000 dukungan di provinsi dengan jumlah pemilih 1-5 juta
3. Minimal 3.000 dukungan di provinsi dengan jumlah pemilih 5-10 juta
4. Minimal 4.000 dukungan di provinsi dengan jumlah pemilih 10-15 juta
5. Minimal 5.000 dukungan di provinsi dengan jumlah pemilih lebih dari 15 juta

Tambahan pula, bagi yang sudah terdaftar sebagai pendukung salah satu calon, tak boleh lagi terdaftar di calon lainnya. Jadi, seorang pendukung juga tidak boleh memberi dukungan kepada lebih dari 1 bakal calon anggota DPD.

Syarat dukungan ini berupa salinan KTP

yang diserahkan ke KPU masing-masing provinsi. KPU lalu akan melakukan verifikasi.

Nah, saat verifikasi ini, jika terdapat dukungan ganda, sudah ada ancaman sanksi untuk calon yang memanipulasi syarat dukungan, baik menggandakan jumlah dukungan ataupun membuat data dukungan palsu. Sanksinya, satu dukungan palsu atau ganda akan terkena sanksi

pengurangan sebanyak 50 dukungan sah. Contohnya, jika ditemukan lima dukungan ganda atau palsu, maka jumlah salinan KTP yang telah dihimpun akan berkurang hingga 250 dukungan sah.

Sedangkan dari berbagai studi muncul kecenderungan untuk menyimpulkan DPD sebagai salah satu lembaga yang gagal fungsi pasca Reformasi 1998. Kewenangan DPD yang dinilai lemah tak bisa dilepaskan dari penyerahan proses politik pada partai politik dalam konteks yang transisional. Dengan kewenangan terbatas, DPD dianggap dilahirkan tapi seolah tidak dikehendaki sehingga kehadirannya hanya diterima setengah hati.

Lembaga DPD yang layaknya Senator, namun lemah dalam kewenangannya, ditambah mirisnya kenyataan menunjukkan DPD telah dibajak oleh para politisi partai politik. Dalam praktik, tidak sedikit anggota DPD yang berasal dari partai politik. Fakta itu melengkapi kenyataan biaya memilih dan dipilih anggota DPD sangat besar, namun fungsinya baru menjadi pelengkap penyerta di lembaga legislatif.

Sebenarnya, gejala anggota partai politik menjadi anggota DPD telah berlangsung lama. Sebut saja, Pimpinan DPD pertama (2004-2009) Ginandjar Kartasasmita pernah aktif sebagai anggota Partai Politik Golkar, juga Wakil Ketua Majelis Permusya-

“Itu akan menjadi pertimbangan, karena mereka juga akan melihat dari hasil survei dan dukungan parpol pengusung dalam pilkada. Elite politik pusat juga menentukan dalam hal menentukan calon yg akan diusung partai dalam kontestasi pilkada

waratan Rakyat (MPR) 2009-2014.

Unsur DPD yang sebelumnya adalah anggota partai politik lainnya misalnya Ahmad Farhan Hamid dari Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, afiliasi kepentingan dengan partai politik pada saat menjadi anggota dan unsur pimpinan DPD (dan MPR sebagai unsur DPD) meningkat cukup tajam pada periode 2014-2019. Sekitar 78 orang anggota DPD berafiliasi dengan partai politik, bahkan delapan orang anggota DPD diantaranya menjadi pengurus inti partai politik.

Menanggapi berbagai pandangan terhadap DPD, Wakil Ketua DPD 2019-2024 Sultan B Najamudin pun angkat bicara. "Fluktuasi citra lembaga negara tentu selalu terjadi seiring perkembangan sosial politik dan peristiwa hukum penting yang menyertai keberadaan lembaga. Khusus lembaga DPD, keterbatasan kewenangan politiknya sebagai lembaga perwakilan adalah faktor yang menurut kami paling menentukan citra lembaga selama ini", ujarnya Senin, 27 Maret 2023.

Politisi yang pernah menjadi Wakil Gubernur Bengkulu ini mengakui keberadaan DPD RI sejauh ini belum mampu bekerja maksimal terutama dalam fungsinya sebagai lembaga legislatif. Fungsi legislasi yang menjadi roh lembaga legislatif seperti DPD hanya diberikan secara sangat terbatas

oleh Konstitusi dan UU nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

"Kami tidak pernah berkecil hati dengan citra lembaga yang jauh tertinggal daripada lembaga negara lainnya. Semangat kami tak pernah surut dalam menjaga dan mengemban amanah konstitusi", ujar Sultan.

Meski demikian, senator asal Bengkulu itu, mengatakan bahwa demi perkembangan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan yang kuat, dibutuhkan proses evaluasi dan penguatan kewenangan lembaga DPD RI. DPD RI adalah lembaga pemer-satu negara bangsa yang tidak hanya berkepentingan menjaga dan memperjuangkan aspirasi civil society daerah, tapi juga menjadi jembatan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi.

"Bagi kami, harapan membangun demokrasi Indonesia yang kuat dan mensejahterakan hanya bisa dilakukan dengan upaya menata ulang sistem ketatanegaraan. Dan kami berkeyakinan bahwa penguatan kewenangan DPD akan positif mempengaruhi sistem politik Nasional yang sehat dan berdampak signifikan pada pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan," tandasnya.

Nah, bagaimana dengan DPD periode

2024-2029? Tetap masih ada yang bersemangat dan sukses menggalang dukungan di daerahnya. Apalagi petahana.

M Syukur, anggota DPD RI tiga periode asal Jambi, misalnya, sanggup menghimpun sekitar 10.000 relawan. Relatif merata di berbagai kabupaten di provinsinya.

Dari jumlah relawan, menurut Syukur, delapan puluh persen merupakan relawan yang telah bergabung sejak 2009. Mereka adalah pendukung Syukur yang sampai saat ini masih setia berada di dalam barisan. "Saya akan terus berjuang bersama dengan para relawan, dan tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan para relawan," kata Syukur pertengahan Oktober 2023. .

Syukur menambahkan keinginannya untuk maju kembali menjadi anggota DPD RI. Alasannya, karena adanya komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah, utamanya di Provinsi Jambi.

Meskipun, DPD sebagai lembaga politik terkesan belum begitu efektif perannya dirasakan masyarakat di daerah. Tapi, kata Syukur, DPD harus tetap diperjuangkan untuk lebih baik lagi. "Karena inilah satu-satunya lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan masyarakat dan mewakili daerah," tandas politisi yang pernah menjadi aktor sinetron ini. ♦





KEGAGALAN IRMAN GUSMAN

Irman Gusman pernah menjadi Ketua DPD RI. Namun, dalam jabatannya ia tersangkut perkara pidana dan kehilangan hak politiknya selama lima tahun. Alhasil, niatnya mencalonkan diri kembali sebagai senator DPD periode 2024-2029 pun gagal.

Nama Irman Gusman sempat masuk daftar calon sementara (DCS) anggota DPD dari daerah pemilihan (dapil) Sumbar per 18 Agustus 2023. KPU menyatakan Irman memenuhi syarat karena Pasal 18 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 membolehkan eks terpidana dengan pencabutan hak politik untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) tanpa perlu menunggu lima tahun usai keluar penjara.

Namun, pada September 2023 Mahkamah Agung (MA) menyatakan pasal itu melanggar UU Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 12/PUU-

XXI/2023. Alasannya, sesuai putusan MK, eks terpidana yang terkena pencabutan hak politik tak kebal dari kewajiban menunggu masa jeda 5 tahun.

KPU tak merevisi Peraturan KPU sesuai dengan putusan MA tersebut dan hanya meminta KPU Sumbar untuk memedomani putusan MA ketika memproses lagi DCS untuk menetapkan daftar calon tetap (DCT). Alhasil, KPU Sumbar menyatakan Irman tak memenuhi syarat karena memedomani putusan MA itu karena dia baru bebas murni tiga tahun.

Irman Gusman tak terima dengan pencoretan namanya itu dan melaporkan KPU ke Bawaslu. Majelis Ajudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menolak gugatan Irman Gusman agar ditetapkan sebagai calon anggota DPD RI untuk Pemilu 2024.

"Amar putusan, dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk

seluruhnya," kata Ketua Majelis Ajudikasi, Puadi, membacakan putusan pada Kamis, 16 November 2023.

Puadi menambahkan Irman Gusman belum memenuhi syarat Pasal 182 huruf g UU Pemilu dan putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023. Puadi pun menilai KPU telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 182 huruf g UU Pemilu dan putusan MK 12/2023 syarat tersebut belum dipenuhi oleh pemohon dan Keputusan KPU tentang DCT telah sesuai dengan putusan MK 12/2023," kata Puadi.

Maka, Puadi mengatakan permohonan yang diajukan oleh Irman Gusman tidak beralasan secara hukum. Sehingga dia menyebut permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan. "Permohonan pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan," untkapnya. ♦

Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS.

IKHTIAR MEMAJUKAN CIREBON DAN INDRAMAYU

Terlahir dan besar dari keluarga nelayan tradisional dengan latar belakang pendidikan yang rendah, tidak membuat Prof. Rokhmin Dahuri tertinggal dalam bidang akademik. Terbukti dengan kerja keras dan izin Allah SWT, beliau berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademisi, menjadi menteri dan menjabat sebagai penasihat dari 10 Gubernur dan 15 Bupati/ Walikota di tanah air.

Kini di usianya yang memasuki 65 tahun pada 16 November 2023 ini, ia memilih meju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI untuk daerah pemilihan (Dapil) Cirebon dan Indramayu. Hal tersebut dilakukannya sebagai wujud mewakafkan ilmu dan usia yang dimiliki untuk membangun dan memajukan Dapilnya yang salah satunya diantaranya adalah daerah kelahirannya.

"Jadi sebagai tokoh nasional, dengan kemampuan, kapasitas, dan kecerdasan yang dikaruniakan Allah SWT kepada saya, saya merasa berdosa jika tidak berikhtiar untuk memperbaiki keadaan di Cirebon dan Indramayu dan Indonesia. Ini lah yang menjadi alasan saya untuk menjadi Caleg," kata Prof. Rokhmin mengenai niatnya menjadi Caleg DPR RI. ♦





SAATNYA CIREBON DAN INDRAMAYU MAJU

Cirebon dan Indramayu sebetulnya berpotensi yang besar untuk maju dan berkembang. Begitu pula dengan Bangsa Indonesia yang besar ini. Asalkan mengikuti empat syarat yang disampaikan oleh Profesor Rokhmin Dahuri ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) indeks pertumbuhan pembangunan Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu masih jauh di bawah nasional. Bahkan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon masuk tiga besar daerah termiskin di Jawa Barat.

Begitu pula dengan Indonesia, dengan potensi untuk bisa membangun yang luar biasa, tapi masih tergolong dalam negara berpendapatan menengah dengan penghasilan hanya 4.580 dolar per orang per tahun.

Padahal, papar Prof Rokhmin, sebuah negara dikatakan makmur itu kalau pendapatan rakyatnya minimal US\$ 13.850. "Ini baru US\$ 4.500 jadi masih jauh panggang

dari api," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Gus Dur dan Megawati ini.

"Saya tahu persis Dapil saya Cirebon

dan Indramayu punya potensi yang besar untuk maju dan berkembang. Begitu pula dengan Bangsa Indonesia yang besar ini," tambah Profesor yang tulisannya banyak



dimuat oleh media meanstrem ini.

"Jadi sebagai tokoh nasional, dengan kemampuan, kapasitas, dan kecerdasan yang dikaruniakan Allah SWT kepada saya, saya merasa berdosa jika tidak berikhtiar untuk memperbaiki keadaan di Cirebon dan Indramayu dan Indonesia. Ini lah yang menjadi alasan saya untuk menjadi Caleg DPR RI," ungkap Prof Rokhmin.

Memang, lanjutnya, selama ini dia telah menjadi penasihat dari 10 Gubernur pernah dan 15 Bupati/ Walikota. Namun sebagai penasihat sangat kecil sekali peluang ide atau konsep yang disampaikan untuk dieksekusi. Paling tinggi peluangnya hanya 10 atau 20 persen saja.

"Jika berada di legislatif, setidaknya saya punya power, punya otoritas untuk menekan ide dan konsep saya untuk dijalankan dan diwujudkan," kata Profesor yang menjabat sebagai ketua dan dewan pakar di 12 organisasi di Indonesia dan mancanegara ini.

Menurut Prof Rokhmin, ada 4 hal yang harus dipenuhi jika suatu wilayah ingin maju, makmur, sejahtera, damai, dan lingkungan hidupnya asri serta berkelanjutan (sustainable).

Pertama adalah, daerah itu harus punya konsep bagaimana membangun, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan berbagai hal lainnya.

Kedua adalah, setiap anggota masyarakat di daerah tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka.

Adapun yang ketiga adalah, rakyat di daerah tersebut memiliki semangat dan keinginan untuk saling bekerja sama, saling hidup bergotong-royong, damai dan harmonis.

"Sedangkan yang keempat adalah, ada pemimpin smart (cerdas), berkompeten, punya keikhlasan dan akhlak yang baik sehingga mampu menjadi leader untuk menjalankan ketiga hal yang telah saya sampaikan sebelumnya," terang Prof. Rokhmin.

"Dan 4 hal ini pulalah yang ingin coba saya hadirkan dan bangkitkan yang kita di Cirebon dan Indramayu jikalau nanti saya terpilih menjadi anggota DPR RI," ungkap profesor yang memiliki jadwal cukup padat menjadi pembicara di berbagai perguruan tinggi dan lembaga di tanah air dan mancanegara ini.

Sebagai Caleg, Prof Rokhmin mengusung visi berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Diantaranya adalah, dia berkeinginan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang merdeka sejak 17 Agustus 1945 ini menjadi sebuah



negara yang maju, adil, makmur dan berdaulat.

Hal tersebut, lanjutnya, tercermin dalam 4 hal yang merupakan bagian dari misi Prof Rokhmin sebagai Caleg DPR RI. Pertama, negara dan pemerintah ini harusnya bisa melindungi segenap tanah air. "Jadi berbicara negara, pemerintah itu bukan hanya nasional tapi provinsi, kabupaten juga bahkan sampai tingkat desa," terang Prof Rokhmin.

Kedua adalah, memajukan kesejahteraan umum. "Dalam hal ini saya ingin bagaimana supaya masyarakat Indramayu dan Cirebon hidup lebih sejahtera.

Menjadi rakyat tidak lagi miskin dan menggugur. Sehingga tidak lagi menjadi termiskin ke-3 di level Jawa Barat," ujarnya.

Kemudian yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. "Dalam hal ini adalah bagaimana caranya saya bisa meningkatkan dan memajukan pendidikan kesehatan di Dapil saya," terangnya.

Dan yang terakhir adalah, turut menjaga perdamaian dunia. "Poin empat ini bisa kita laksanakan dengan baik jika tiga hal sebelum sudah kita capai. Jika kita sudah kuat di dalam negeri, maka kita juga akan punya power menjaga perdamaian dan keadilan dunia," papar Prof Rokhmin. ♦

BERKAT WASILAH DAN HIDAYAH

Berdasarkan latar belakang pendidikan kedua orangtuanya dan budaya dari lingkungan tempat tinggalnya, rasa sulit membayangkan jika Profesor Rokhmin Dahuri bakal mampu meraih gelar tertinggi di bidang akademisi. Tak hanya itu, dia juga kemudian dipercaya sebagai menteri dan penasihat dari 10 gubernur dan 15 walikota/bupati.

Ayah Prof. Rokhmin hanya seorang nelayan tradisional yang buta huruf. Sedangkan ibunya hanya mengenyam pendidikan kelas satu sekolah dasar (SD). Budaya di lingkungan tempat tinggalnya, Desa Gebang Hilir, Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, juga tidak memiliki perhatian terhadap pendidikan.

Namun siapa sangka, dari orangtua dan desa tersebut bisa muncul seorang tokoh nasional dengan gelar profesor dan menjadi seorang menteri. Semua hal tersebut menurut Prof Rokhmin ternyata tidak lepas dari wasilah dan hidayah dari Allah Swt.

Sebagai nelayan, kedua orangtuanya memang terkenal sebagai nelayan yang tangguh. Sang ayah, Dahuri, pertama memulai profesinya sebagai nelayan dengan menjadi Anah Buah Kapal (ABK) di sebuah kapal ikan. Dengan ikhtiarnya yang kuat akhirnya sang ayah berhasil memiliki kapal ikan sendiri.

Sedangkan ibunya, Dasmirah terkenal sebagai pedagang yang ikan ulet. Dengan keahliannya, dia mengolah dan memasarkan berbagai produk pengolahan ikannya untuk membantu perekonomian keluarganya.

Kala itu, kehidupan keluarga Prof Rokhmin dan nelayan pada umumnya memang tergolong makmur. Namun mereka tidak memiliki perhatian yang baik terhadap pendidikan anak-anak mereka. Begitu pula dengan generasi mudanya.

Khusus untuk dia dan keluarganya, Prof Rokhmin mengakui bahwa kala itu mereka tak hanya kurang perhatian terhadap pendidikan, tetapi juga terhadap ibadah mereka.

"Jujur, dari kelas 1 sampai kelas 3 SD saya malas sekali. Orangtua juga kurang memprioritas sekolah. Orientasinya dulu menjadi nelayan," ungkap Prof Rokhmin mengenang masa kecil.



Soalnya, lanjut dia, kehidupan nelayan pada waktu itu subur makmur. Kapal ikan atau perahu di desanya waktu itu mungkin hanya 400. Sumber daya ikannya banyak yang mengambil sedikit.

"Jadi kita anak-anak kecil dan anak muda waktu itu menilai lebih enak jadi nelayan, langsung dapat duit. Jadi malas-malasan sekolahnya," kenang Prof Rokhmin.

Namun Alhamdulillah, kenang dia lagi, suami kakanya Kaswana, Kang Syamsuri

seorang santri lulusan pondok pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon berhasil merubah pemikiran dia dan keluarganya.

Kehadiran santri muda tersebut di tengah keluarga mereka menjadi wasilah (perantara) datangnya inspirasi dan hidayah dari Allah Swt. Pemikiran dan orientasi mereka menjadi berubah dari waktu sebelumnya.

"Jadi ayah dan ibu saya dan kami-kami anaknya yang dulunya tidak shalat, abai

terhadap agama akhirnya mendapat hidayah untuk mulai taat beribadah,” terang Prof Rokhmin.

Dan luar biasanya lagi, lanjut dia, sejak mendapat hidayah tersebut prestasinya di sekolah meningkat drastis. Dari kelas 3-6 SD dia selalu juara satu. Begitu pula di tingkat SMP yang dijalani di Babakan dan SMA 1 Cirebon. Bahkan dia diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) tanpa test.

“Alhamdulillah, sejak saya keluarga saya mendapat hidayah semangat saya untuk menjadi terbaik di setiap langkah kehidupan pun membuncah,” ungkapnya.

Berkat hidayah dan rahmat Allah Swt, Rokhmin muda berhasil meraih meraih gelar sarjana S1 dari Fakultas Perikanan IPB pada tahun 1982. Meraih gelar Magister Sains dari Program Pasca Sarjana IPB di bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan pada 1986.

Kemudian meraih gelar Ph.D (Dr.) dari School for Resources and Environmental Studies Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia Canada Bidang Ilmu Ekologi dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan pada tahun 1991.

Bahkan Prof Rokhmin akhir di percaya menjadu Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Persatuan Indonesia di era Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Kabinet Gotong Royong di era Presiden Megawati Soekarnoputri dari ari 4 Juni 2001 s/d 20 Oktober 2004.

Sebelum menjabat menteri, di alamaternya, ia memimpin Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB (1996-1999). Ia juga pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor IV Institut Pertanian Bogor (1998-1999).

Selain itu, sejak 1997 sampai sekarang masih menjabat Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

Aktivitas profesi yang ia jalani, diantaranya: Anggota Dewan Riset Nasional (DRN), Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Ketua Umum Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI), Anggota

“ICLARM Network of Tropical Fisheries Scientist”, Anggota Coastal Area Management and Planning Network, University of Rhode Islands, USA; dan Coordinator of Coastal Zone Management Network for Asia-Pacific Region, UNEP (United Nations Environmental Programme).

Prof Rokhmin juga merupakan penerima piagam penghargaan Dosen Teladan I Tingkat Nasional (1995) dan Indonesian Development Award (1999).

Saat ini dia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Kelautan dan Perikanan Kadin, Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman, dan Ketua Umum GNTI (Gerakan Nelayan Tani Indonesia). ♦





PRIHATIN NASIB NELAYAN INDONESIA

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 3/4 wilayahnya terdiri dari lauta. Di dalamnya terkandung potensi ekonomi yang cukup melimpah. Tapi mengapa sekitar 25 persen nelayan dan pembudidaya hasil laut masih tergolong miskin? Kondisi tersebut tentu cukup memprihatinkan.

Menurut Ketua Gerakan Nelayan Tani Indonesia, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi miskin pada nelayan dan pembudidaya. Di antaranya harga jual hasil tangkap yang terlalu murah dibandingkan dengan biaya produksi.

"Kuantitas produksi dari dua kalangan

ini, terutama usaha kecil dan menengah, terlampaui rendah dibandingkan pengusaha perikanan skala besar," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden Megawati Soekarnoputri ini, saat berbicara di Forum Insinyur Muda Persatuan Insinyur Indonesia (FIM-PII), belum lama ini.



Lebih lanjut dia mengungkapkan, banyak penyebab juga yang menyebabkan kuantitas tangkapan rendah. Misalnya, sebagian besar usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan dilakukan secara tradisional (low technology) dan berskala Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Sehingga, tingkat pemanfaatan SDI (sumber daya insani), produktivitas, dan efisiensi usaha perikanan pada umumnya rendah.

"Akibatnya, nelayan dan pelaku usaha lain miskin, dan kontribusi bagi perekonomian (PDB, nilai ekspor, pajak, PNPB, dan PAD) rendah," sebut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University itu.

Profesor yang saat ini menjabat sebagai penasehat menteri kelautan dan perikanan ini memberikan contoh, dari 625.633 unit kapal ikan, setidaknya

Akibatnya, nelayan dan pelaku usaha lain miskin, dan kontribusi bagi perekonomian (PDB, nilai ekspor, pajak, PNPB, dan PAD) rendah

hanya 3.811 unit yang tergolong modern. Indikator modern sendiri ditandai dengan kapasitasnya yang berada di atas 30 gross ton (GT). "Jumlah terse-

but sekitar 0,6 persen. Sangat kecil," ucapnya.

Selain itu, ukuran unit usaha (bisnis) perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan sebagian besar tidak memenuhi skala ekonomi (economy of scale). "Sehingga, keuntungan bersih (pendapatan) lebih kecil dari 300 dolar AS (Rp 4,5 juta)/orang/bulan, alias miskin," ungkap Prof Rokhmin.

Faktor lainnya, terang dia, sebagian besar pembudidaya ikan belum menerapkan Best Aquaculture Practices (BAP = Cara Budidaya Ikan Terbaik), sehingga sering terjadi serangan wabah penyakit yang menyebabkan gagal panen.

Kemudian, sambungnya, pasokan pakan ikan berkualitas yang selama ini mengandalkan sumber proteinnya dari fishmeal (tepung ikan) semakin terbatas, sehingga mengakibatkan harganya terus



naik. Padahal, sekitar 60 persen biaya produksi untuk pakan ikan.

"Pasokan induk (broodstocks) dan benih berkualitas unggul (SPF, SPR, dan fast growing) masih terbatas. Padahal, benih menentukan 50% keberhasilan usaha budidaya," ujar Prof. Rokhmin mengutip data FAO (2018).

Prof. Rokhmin mengaku merasakan prihatin dengan nasib nelayan karena kalau membeli sarana produksi seperti jaring, BBM, beras dst selalu mendapatkan harga yang lebih mahal karena nelayan tidak bisa membeli langsung ke pabrik tetapi harus melalui sekian banyak perantara.

Sebaliknya ketika nelayan menjual ikan hasil tangkap mereka pun tidak bisa langsung menjual ke pasar akhir. "Lagi-lagi, harus melalui tengkulak atau pedagang perantara," ungkapnya.

Untuk itu, Prof Rokhmin Dahuri berharap kehidupan nelayan Indonesia bisa

lebih sejahtera. "Saya berharap pendapatan minimal para nelayan di Indonesia rata-rata per bulannya Rp 7 juta," ujar Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan, Indonesia memiliki modal besar dan lengkap untuk menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaulat. Namun dengan modal yang begitu besar, Indonesia masih berada dalam middle class. "Untuk menuju Indonesia yang maju dibutuhkan transformasi struktural ekonomi," katanya.

Saat ini, ungkapnya, kontribusi sektor manufacturing terhadap PDB hanya 18 persen. Padahal, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan-RI Kabinet Gotong Royong ini minimal jika ingin maju 30 persen. Untuk itu, agas bisa keluar dari middle-income trap (jebakan negara berpendapatan menengah) menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaulat.

Maka ke depan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia harus diatas 7 persen per tahun. Selain itu, sifat pertumbuhannya harus berkualitas dan inklusif. Artinya, banyak menyerap tenaga kerja, tersebar secara proporsional ke seluruh wilayah Nusantara

Potensi Ekonomi Biru (Blue Economy) Indonesia sangat besar, sekitar 1,4 trilyun dolar AS per tahun atau 1,2 kali lipat besaran ekonomi (PDB) Indonesia saat ini. Dan berpotensi untuk menyerap tenaga kerja untuk lebih dari 45 juta orang.

Potensi ekonomi itu tersebar di 11 sektor Blue Economy, yakni: (1) Perikanan Tangkap, (2) Perikanan Budidaya, (3) Industri Pengolahan Hasil Perikanan dan Seafood, (4) Industri Bioteknologi Kelautan, (5) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), (6) Pariwisata Bahari, (7) Kehutanan Pesisir (Coastal Forestry), (8) Sumber Daya Wilayah Pulau-Pulau Kecil, (9) Industri dan Jasa Maritim (seperti galangan

kapal, pabrik alat tangkap ikan, pabrik mesin kapal, pabrik kincir air tambak, pabrik mesin pakan ikan, dan coastal and ocean engineering), (10) Transportasi Laut, dan (11) Sumber Daya Alam laut non-konvensional.

"Sejauh ini, kita bangsa Indonesia baru memanfaatkan sekitar 25% dari total potensi Blue Economy diatas," katan Prof Rokhmin.

Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan Blue Economy bagi kemajuan, kemakmuran; dan kedaulatan bangsa, selain dukungan APBN, alokasi kredit per-



(jangan terkonsentrasi di P. Jawa), dan mensejahterakan seluruh rakyat secara berkeadilan. "Juga, mesti ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable)," kata ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

bankan, unfastruktur dan konektivitas, juga yang tak kalah penting adalah SDM (human capital), khususnya para insinyur dan teknolog yang dibutuhkan untuk pengembangan kesebelas sektor Blue Economy diatas. ♦

Cirebon – Indramayu Beruntung

JIKA MILIKI ANGGOTA DPR RI PROF ROKHMIN

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si meyakini bahwa dengan maju Prof Rokhmin Dahuri sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI mewakili Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu akan berdampak positif bagi perkembangan pemerintah dan masyarakat di ketiga daerah tersebut.

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si meyakini bahwa dengan maju Prof Rokhmin Dahuri sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI mewakili Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu akan berdampak positif bagi perkembangan pemerintah dan masyarakat di ketiga daerah tersebut.

Sebagaimana diketahui bersama, Cirebon dan Indramayu merupakan daerah yang sebagian wilayahnya terdiri dari lautan dan masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan Prof Rokhmin adalah seorang profesor yang ahli di bidang kelautan dan perikanan yang juga berasal dari keluarga nelayan.

Tak hanya ahli kelautan dan perikanan, Prof Rokhmin juga pernah menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan. Dia juga putra daerah yang juga tokoh nasional. Sebelum menjadi

menteri, beliau juga merupakan salah seorang Dirjen di kementerian tersebut.

"Jadi sudah pas sekali jika beliau maju sebagai caleg mewakili Cirebon dan Indramayu. Untuk itu, masyarakat Cirebon dan Indramayu perlu mendukung beliau," kata Wakil Bupati (Wabup) Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih, tentang Prof Rokhmin yang akrab dia sapa Kang Rokhmin.

Apa lagi, lanjutnya, Kang Rokhmin ingin mewujudkan cita-citanya untuk membangun pelabuhan di Cirebon dan menghidupkan kembali Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ramah bagi nelayan.

Hal ini tentu akan berdampak positif bagi Cirebon dan Indramayu merupakan dua daerah penghasil ikan terbanyak di Jawa Barat.

"Kalau sampai dua program ini saja jalan, tentunya dampaknya akan sangat baik bagi perkembangan Cirebon dan Indramayu. Ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan," tambah Wakil Bupati yang akrab disapa Wabup Ayu ini.

Tak hanya itu, tambah politisi PDI Perjuangan ini, dengan kapasitas



yang dimiliki dan dengan duduk dia sebagai anggota DPR RI, Kang Rokhmin akan mampu membawa program-program dari Pemerintah Pusat untuk di jalankan di Dapil-nya.

Berbicara mengenai Kabupaten Cirebon, Wabup Ayu mengaku bahwa daerah ini memang perlu dukungan langsung dari tokoh-tokoh seperti Kang Rokhmin yang notabene anak nelayan tulen. Cirebon perlu tokoh yang mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan mereka di tingkat nasional.

"Saya rasa Kanf Rokhim sudah selesai dengan dirinya dan keluarganya. Jika terpilih nanti dia pasti akan all out untuk memperjuangkan Dapil-nya," ujar Wabup Ayu.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Jabar. Tapi anehnya, angka stuntingnya tinggi. Begitu pula dengan angka kemiskinannya.

Berdasarkan hasil monitoring, lanjut Ayu, ada beberapa penyebab tingginya angka stunting di Kabupaten Cirebon. Pertama-pertama karena pola asuh. Banyak para orangtua tidak paham, terutama kaum ibunya tentang makan bergizi yang dibutuhkan anak mereka.

"Padahal makanan bergizi tersebut berlimpah di tempat mereka. Contohnya adalah ikan. Tapi kenapa mereka tidak memberikan ikan?," ungkap Wabup Ayu dengan nada mempertanyakan.

Ternyata ikan-ikan mereka dijual semua ke tengkulak-tengkulak yang telah menjerat mereka dengan hutang (rentenir). Mereka lebih memilih makanan lain yang lebih murah untuk dikonsumsi, seperti mie instan.

Ada pun langkah-langkah yang dilakukan Pemda Cirebon untuk mengatasi stunting tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap para orang tua, ibu hamil, dan remaja calon pengantin melalui pos yandu.

"Kita melatih dan mengajari mereka bagaimana persiapan yang perlu dilakukan pada saat mereka akan menikah, hamil, pasca hamil, disaat anak mereka masih balita dan seterusnya. Program ini tengah digencarkan oleh Pemda Cirebon guna menyukseskan program nasional menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024," terang Wabup Ayu.

Sedangkan mengenai tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon, karena banyak diantara mereka yang terjerat rentenir. Terutama pada saat Pandemi Covid 19.

Sabagai gambaran, pada saat pan-

dem, hampir 70 persen dari masyarakat Kabupaten Cirebon masuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Kementerian Sosial, karena masuk kategori miskin.

"Pasca pandemi ini kami tengah melakukan verifikasi validasi data untuk pentidaklayakan penerima bantuan. Kami akan meverifikasi mana mereka yang masih layak masuk kategori miskin dan penerima bantuan dan mana yang tidak. Karena pada waktu pandemi, ASN, TNI dan Polri pun masuk DKTS," terang



Wabup Ayu.

Dengan verifikasi validasi data penerima bantuan yang dilakukan, hasilnya cukup efektif dalam mengurangi biaya pengeluaran pemerintah. "Alhamdulillah, dari verifikasi validasi data ini kita bisa menghemat pengeluaran hingga hampir Rp 11 miliar," ungkap Wabup Ayu.

Selain mengurangi biaya pengeluaran pemerintah, Pemda Cirebon juga berupaya meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan pendapatan dari pajak.

Adapun langkah lainnya yang dilakukan oleh Pemda Cirebon untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut diantaranya adalah dengan memetakan dan mengintervensi kantong-kantong kemiskinan. Kemudian membuat program yang bisa membuka lapangan pekerjaan.

Misalnya, mereka miskin karena tidak bekerja. Penyebabnya tidak bekerja karena faktor pendidikan dan keterampilan. "Mereka kemudian kita suport dan dorong dengan program kejar paket pendidikan yang diperlukan. Misalnya program paket C (setara SMA). Biayanya ditanggung pemerintah. Setelah lulus kita salurkan un-

tuk bekerja," papar Wabup Ayu.

Misalnya lagi, lanjutnya, kemiskinannya karena faktor rumah tidak layak huni (Rutilahu). Kemudian dibantu dengan program bedah rumah yang biayanya ditanggung pemerintah.

Kemudian dibuat program-program pelatihan keterampilan bagi mereka yang usia produktif. Seperti service elektronik, kursus memasak dan mengolah makanan sehingga layak untuk dipasarkan dan pelatihan keterampilan lainnya yang sesuai dengan bakat dan minat dari yang

bersangkutan.

"Sedangkan bagi mereka yang sudah tidak produktif seperti manula (manusia usia lanjut) kita bantu dengan program bantuan makanan," ujar Wabup Ayu.

Selain itu, Pemda Cirebon saat ini terus mendorong tumbuh dan berkembangnya industri-industri kecil, industri rumah dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Saat ini jumlahnya sudah mencapai 220.000.

"Dengan adanya industri-industri ini kita berharap dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Cirebon. Dan tanda-tanda tersebut sudah terlihat. Jadi kita akan serius untuk mendorong tumbuh dan berkembang industri-industri kecil dan UMKM tersebut," ungkapnya.

"Dan jika Kang Rokhmin terpilih nanti sebagai anggota DPR RI dari Dapil Cirebon dan Indramayu, saya yakin program pengentasan kemiskinan di Cirebon dan Indramayu akan semakin cepat. Karena beliau memiliki kemampuan untuk membawa program-program dari pusat yang untuk dijalankan di Dapilnya," tandas Wabup Ayu. ♦



PESANTREN TAK LAGI HARUS PUNYA SEKOLAH FORMAL

Pondok pesantren kini lebih bebas memilih bentuk pendidikan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan santrinya, tanpa harus mendirikan sekolah formal. Dengan pengakuan pemerintah secara penuh kepada pesantren, maka apapun pendidikan yang dimilikinya akan dapat meluluskan santri yang siap kuliah atau masuk ke dunia kerja.

Hal ini ditegaskan dalam Sosialisasi UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Minggu (19/11/23). Acara bertema "Profil Santri Indonesia, Dewan Masyayikh, dan Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren" ini mengupas perjalanan pendidikan pesantren yang telah melampaui berbagai zaman dan tetap lestari sampai sekarang.

Sekretaris Majelis Masyayikh, KH. A. Muhyiddin Khotib mengatakan, saat ini pesantren tidak harus menyelenggarakan pendidikan formal secara penuh, namun dapat dilakukan dengan pendekatan pengajaran kitab. Secara legalitas saat ini sudah tidak ada masalah, karena apapun

bentuk pendidikannya akan tetap direkognisi pemerintah, sehingga ijazahnya setara dengan pendidikan formal.

Dijelaskan, pesantren telah berkontribusi mencerdaskan bangsa mulai zaman penjajahan hingga masa reformasi sampai saat ini. Namun pada era orde baru pesantren tidak diakui dan dikeluarkan dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Oleh karena itu lulusan pesantren tidak diakui ijazahnya, sehingga harus menempuh ujian persamaan apabila ingin kuliah atau melanjutkan ke jenjang formal.

Kondisi ini membuat banyak pesantren harus berkompromi dengan pemerintah, dengan cara mengubah pendidikannya menjadi formal berbentuk SD-SMA atau Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah

Aliyah. Pertaruhannya adalah metode pendidikan lama yang menjadi andalan pesantren, yaitu bandongan dan sorogan menjadi tidak terpakai. Kemudian pesantren beralih ke sekolah-sekolah formal yang mengikuti kurikulum pemerintah, sehingga kualitasnya turun.

Tetapi pada saat ini era penyeragaman sudah berakhir, dengan terbitnya UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pesantren diberi kebebasan mengatur pendidikannya sendiri tanpa harus mengikuti kurikulum Kemendikbud maupun Kemenag. Sekolahnya tidak harus formal, silabusnya bebas, sistem, jam masuk, dan aturannya juga bebas.

Maka dari itu pondok pesantren diminta menunjukkan kembali kualitas pendidikan



pesantren yang dari dulu dikenal unggul dalam ilmu-ilmu agama. “Kami merekomendasikan kurikulum pesantren tetap berbasis kitab,” kata KH. Muhyiddin Khotib. Lebih lanjut dijelaskan, era pemaksaan kurikulum saat ini telah selesai. Pemerintah telah membuka mata bahwa produk pesantren tidak lebih buruk, sehingga tak perlu ada penyetaraan. Justru produk pesantren lebih memiliki keunggulan daripada produk sekolah negeri.

Menurut Kyai Muhyiddin, isu utamanya saat ini adalah kualitas, bukan lagi pengakuan. Saat ini lulusan pesantren bisa melanjutkan pendidikan atau melamar pekerjaan di mana saja dengan menggunakan ijazah dari pesantren. Tentang kualitasnya saat ini sedang dibangun sistem penjaminan mutu oleh Majelis Masyayikh.

Majelis Masyayikh adalah lembaga independen yang keanggotaannya berasal dari para pengasuh pesantren di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, sebagai konsekuensi dari UU Nomor 18/2019 Tentang Pesantren. Majelis Masyayikh dibentuk pertama kali dengan masa khidmat 2021-2026 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1154 Tahun 2021 tentang Majelis Masyayikh dan menetapkan 9 orang anggota.

Pada kesempatan yang sama Ketua Majelis Masyayikh KH Abdul Ghaffar Rozin,

M.Ed. mengatakan, kini saatnya pesantren meningkatkan kualitas semaksimal mungkin, tanpa menoleh ke sekolah formal. Kualitas pesantren akan mengacu pada Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pesantren yang baru pekan lalu diluncurkan.

Pada dasarnya Majelis Masyayikh berusaha menerapkan tiga kata kunci dari Undang-Undang Pesantren, yaitu rekognisi, fasilitasi, dan afirmasi. Rekognisi berarti pengakuan dari negara terhadap pesantren, mulai dari kurikulum hingga ijazah lulusannya, agar tidak ada lagi penolakan dari satu pihak kepada alumni pesantren.

“Kami berharap di masa depan, tidak akan ada lagi kasus penolakan terhadap

lulusan Ma’had Aly yang ingin melanjutkan pendidikan S2 di perguruan tinggi,” ujar Gus Rozin.

Terkait fasilitasi, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membantu pesantren dalam hal-hal teknis. Sementara itu tentang aspek afirmasi, ia meminta pemerintah dan pemerintah daerah membuat kebijakan yang menguntungkan pesantren secara politis.

“Maka kami Majelis Masyayikh sedang mengupayakan agar setiap daerah memiliki Perda Pesantren. Dengan demikian ada alasan bagi Pemda untuk memberikan perhatian dan juga APBD kepada pesantren,” pungkasnya. ♦



RINCIAN USULAN BIAYA HAJI 2024

Ada banyak istilah dalam penyelenggaraan ibadah haji yang terkadang belum sepenuhnya dipahami masyarakat, termasuk jemaah haji. Terkait biaya haji, misalnya, dikenal istilah BPIH, Bipih, dan Nilai Manfaat.

Staf Khusus Menag bidang Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo mengatakan, penjelasan istilah ini bisa dilihat dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

BPIH, misalnya, adalah singkatan dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 dijelaskan, BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 44 menyebutkan bahwa BPIH bersumber dari Bipih (biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah), anggaran pendapatan dan belanja negara, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih, kata Wibowo, adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji. Nilai

Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.

Sementara Dana Efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji. "Kalau kemarin Kemenag mengusulkan biaya haji 2024 rata-rata sebesar Rp105 juta rupiah, maka itu adalah BPIH. Sedangkan yang harus dibayar langsung oleh jemaah itu namanya Bipih," terang Wibowo Prasetyo.

Wibowo mencontohkan BPIH 2023. Saat itu, Kementerian Agama mengusulkan BPIH 1444 H dengan rata-rata sebesar Rp 98.893.909,11. Setelah dibahas Panja BPIH, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dan Pemerintah, disepakati rerata BPIH 2023 sebesar Rp 90.050.637,26.

Komposisi BPIH terdiri atas: Bipih yang dibayar jemaah pada 2023 rata-rata sebesar Rp 49.812.700,26 (55,3%), dan nilai manfaat sebesar rata-rata Rp 40.237.937 (44,7%).

Lantas berapa Bipih 2024 yang harus dibayar jemaah? Wibowo menjelaskan bahwa itu belum ditetapkan. Sebab, saat ini panitia kerja (Panja) yang dibentuk Pemerintah dan Komissisl VIII masih mengkaji usulan Kemenag sebesar Rp 105 juta.

"Panja melakukan kajian setiap komponen usulan Kemenag, termasuk mempertimbangkan nilai kurs Dollar dan Riyal terhadap rupiah," papar Wibowo.

"Panja BPIH juga akan mengecek harga layanan di dalam negeri dan Saudi, mulai transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Kemenag juga mengusulkan tambahan layanan makanan di Makkah pada tahun 2024 hingga 84 kali," sambungnya.

Hasil kerja Panja, lanjut Wibowo, selanjutnya akan dibawa ke Rapat Kerja Kemenag dan Komisi VIII untuk disepakati. Setelah BPIH 2024 disepakati, baru akan dibahas komposisi Bipih yang harus dibayar jemaah dan nilai manfaat.

"Dana Nilai Manfaat dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Besaran Bipih yang dibayar jemaah, sangat tergantung juga pada besaran nilai manfaat yang bisa disiapkan BPKH," tegas Wibowo.

Hal senada disampaikan Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie. Dia msnggarisbawahi bahwa BPIH itu berbeda dengan Bipih. Usulan Rp105 juta adalah BPIH, dan itu bukan dana yang harus dibayar jemaah.

"Dana yang dibayar jemaah namanya Bipih dan itu hanya salah satu komponen BPIH. Jumlahnya berapa, belum ditetapkan," tandasnya. ♦



SOLUSI AGAR BIAYA HAJI 2024 TIDAK NAIK

Fraksi PKS DPR RI keberatan dengan tingginya biaya haji yang diusulkan pemerintah hingga mencapai Rp 105 juta per jemaah. Menurutnya biaya tersebut bisa ditekan dengan sejumlah alternatif.

"Kami memandang bahwa usulan tersebut masih bisa turun dengan cara melakukan efisiensi pada sejumlah komponen seperti menekan biaya penerbangan, mengubah pola permakanaan/konsumsi, khidmatul masyair, pemangkasan durasi haji, serta dengan menghapus sejumlah komponen yang tidak relevan," kata Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya.

Pertama, Wisnu yang juga menjadi anggota Panja BPIH, mendesak agar layanan penerbangan haji dibuka seluas-luasnya bagi seluruh maskapai.

"Layanan penerbangan perlu dibuka untuk semua maskapai sehingga nantinya ada kompetisi yang bisa menghasilkan harga bersaing sekaligus bisa memberi lebih banyak opsi atau tawaran bagi kita untuk memilih layanan yang lebih menjanjikan dan berkualitas. Pasalnya komponen penerbangan ini menjadi salah satu penyumbang biaya tinggi terhadap BPIH," jelas Wisnu, Kamis (16/11/2023).

Kedua, terkait pola permakanaan atau konsumsi. Wisnu meminta agar opsi untuk mengubah pola permakanaan dengan pemberian uang tunai kepada jemaah sebagai kompensasi biaya makan bagi jemaah perlu dipertimbangkan serius.

"Selain untuk menghindari makanan catering yang terbuang mubazir, juga akan lebih hemat dan lebih luasa bagi para jemaah haji karena mereka akan menyiapkan sendiri lauk pauk yang sesuai dengan selera dan lidah mereka, di sisi lain juga memberikan multiplier effect keekonomian bagi usaha mikro kecil di tanah air," katanya.

Wisnu menambahkan, jika memang terpaksa harus menggunakan layanan catering di sana, pihaknya meminta agar dilakukan 'open tender' catering yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Panja BPIH.

Ketiga, menyingkat durasi haji dari 40 hari menjadi 35 sampai 30 hari. Wisnu menilai hal itu dapat menekan pengelu-

aran dari komponen perhotelan, konsumsi, transportasi dan biaya hidup hingga ratusan miliar.

"Penyingkatan waktu ini sesungguhnya kembali pada kesiapan maskapai terkait. Keluhan jemaah di tahun sebelumnya adalah mereka sebenarnya ingin segera pulang namun tidak ada penerbangan. Untuk itu, kami mendorong agar terkait layanan penerbangan bisa dibuka seluas-luasnya agar kita bisa mendapatkan maskapai yang siap dengan usulan penyingkatan durasi haji tersebut," katanya.

gasinya terkait kekacauan yang mewarnai puncak haji di Armuzna. Tingginya biaya layanan masyair yang dibebankan saat itu, menurutnya, tidak sebanding dengan layanan yang diberikan kepada jemaah.

"Berkaca dari buruknya layanan masyair tahun lalu, sesungguhnya ironis jika pengelola layanan tersebut mendapat penghargaan dari Arab Saudi. Sebaliknya, ini perlu jadi alat tekan kita dalam negosiasi dengan para PT pengelola layanan masyair sehingga bisa diperoleh biaya serasional mungkin. Kita sudah dirugikan



Selain itu, Wisnu menilai pemanfaatan bandara lama dan baru di Jeddah Arab Saudi perlu dimaksimalkan sehingga durasi pengangkutan jemaah lebih banyak hingga tidak menelan waktu hingga lebih dari 25 hari.

"Termasuk bandara alternatif di Thai, Qasim, dan Yanbu. Hal ini tentu akan mendapatkan sambutan yang positif bagi Arab Saudi yang sedang menggalakkan wisatanya. Meski begitu, usul ini sesungguhnya bisa terlaksana sepanjang ada negosiasi yang sungguh-sungguh dari pemerintah dengan para pihak pemegang kebijakan di Arab Saudi, khususnya GACA," jelasnya.

Keempat, terkait komponen khidmatul masyair. Wisnu mengatakan, KPK Saudi, Nazaha, telah menyerahkan hasil investi-

tahun lalu, sehingga mestinya kita bisa menuntut lebih untuk tahun ini, baik dari segi harga maupun layanan," tegas Wisnu.

Terakhir, Wisnu kembali mendorong agar Kementerian Agama membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi mahasiswa Indonesia di Timur Tengah untuk menjadi tenaga musiman (temus) haji pada penyelenggaraan haji tahun 1445H.

"Dari tahun-tahun sebelumnya, mereka terbukti punya kapasitas dari segi bahasa maupun pengalaman kerja yang efektif di lapangan dalam melayani para jemaah. Dengan memaksimalkan dan memberdayakan mereka, diharapkan bisa menjadi alternatif atas berkurangnya tenaga petugas haji Indonesia, meskipun kita tetap mendesak agar jumlah petugas haji kita ditambah," pungkas Wisnu. ♦



Punish & Reward Kemendagri UNTUK NETRALITAS ASN DI PEMILU 2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memberikan pengarahan kepada seluruh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah dalam rangka menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun politik.

Dia menjelaskan, dasar hukum netralitas ASN telah tertuang dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN. Pasal tersebut menyebutkan, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

"Kemudian juga disebutkan di sini PP Nomor 94 Tahun 2021, pasal 5, tidak boleh memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, dengan cara ikut berkampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS," kata Mendagri,

baru-baru ini.

Mendagri menjelaskan, netralitas ASN yang telah diatur UU ASN dan aturan lain tentang pemerintahan tersebut ketika dilanggar akan mendapatkan sanksi administrasi. Bentuknya bisa berupa teguran, mutasi, hingga dalam konteks Pj. adalah penggantian Pj. kepala daerah.

Mekanisme sanksinya melalui penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang didukung oleh pihak kejaksaan dan kepolisian.

"Bawaslu bisa melakukan mediasi, menyelesaikan tanpa litigasi proses hukum, atau bisa melanjutkan ke proses hukum, penyidikan dan seterusnya, peradilan, karena ada sanksi pidananya. Di antaranya membiayai pasangan calon legislatif tertentu itu pidana," terangnya.

Mendagri membeberkan implementasi netralitas Pj. kepala daerah dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Pertama, di-

larang melakukan foto bersama peserta pemilu dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang menunjukkan keberpihakan.

Kedua, dilarang mengunggah, menanggapi, dan menyebarkan gambar, foto, video, peserta Pemilu. Ketiga, dilarang memasang baliho/spanduk yang mengarah pada keberpihakan peserta Pemilu tertentu.

Kemudian, keempat, dilarang menghadiri acara deklarasi/rapat konsolidasi dan sejenisnya dengan menggunakan atribut peserta Pemilu.

Kelima, dilarang mengalokasikan program dan anggaran yang menunjukkan keberpihakan pada peserta Pemilu tertentu. Selain itu, Pj. juga dilarang menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong.

"Saya mendagri menekankan kembali tentang netralitas ASN, termasuk terutama di (Pemerintah) daerah dalam konteks tugas saya," tandas Mendagri. ♦

CARA KEMENDAGRI SUKSESKAN SERTIFIKASI HALAL

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersinergi dengan Kementerian Agama (Kemenag) menyosialisasikan program sertifikasi halal. Salah satu langkah yang dilakukan dengan menggelar sosialisasi penyiapan anggaran fasilitasi program mandatory halal 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan menegaskan, sosialisasi tersebut merupakan kegiatan strategis untuk mendukung program sertifikasi halal.

Hal ini sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Demikian juga dengan adanya Masterplan Industri Produk Halal Indonesia (MIPHI) tahun 2022-2029. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengembangan industri halal menjadi salah satu arah kebijakan pemerintah.

"Berbagai kebijakan tersebut kiranya dapat kita jadikan selain sebagai landasan utama untuk fokus terhadap rencana aksi pengembangan industri produk halal di Indonesia, juga guna menyikapi global value chain pada era industri global melalui penguatan produk halal," kata Maurits saat sosialisasi progra, sertifikasi halal dengan tema "Akselerasi Perwujudan Ekosistem dan Industri Halal Indonesia di Tingkat Global", di Batam, Kepulauan Riau belum lama ini.

Program ini, lanjutnya, juga sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang telah menargetkan negara kita menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun 2024. Oleh karena itu, Maurits menekankan pentingnya penguatan industri produk halal untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia.

"Dibutuhkan langkah dan upaya penguatan industri produk halal, antara lain dengan meningkatkan kapasitas produksi produk halal melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH), pembentukan zona kuliner yang halal, aman, dan sehat, sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," tegas Maurits.

Maurits melanjutkan, Kemendagri telah

menetapkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024. Dalam hal ini pemerintah daerah (Pemda) diminta segera menyediakan alokasi anggaran fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan Kecil melalui APBD mas-

daerah tentang perubahan APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," terang Maurits.

Maurits berharap program sertifikasi halal dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi Pemda, tapi juga masyarakat. Menu-



Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Keuang (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan

ing-masing provinsi dan kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan dukungan pendanaan dan mengingat program sertifikasi halal tersebut merupakan program prioritas dan masuk dalam kategori kebutuhan mendesak, ungkap Maurits, maka pemerintah daerah agar dapat segera mengalokasikan anggaran fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM tersebut dalam APBD TA 2024.

"Namun, apabila belum tersedia atau belum cukup tersedia anggarannya, dapat disediakan melalui pergeseran anggaran dan ditampung dalam perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2024 mendahului peraturan

rutnya, manfaat dari program sertifikasi halal yaitu mampu meningkatkan kepercayaan konsumen atau masyarakat, terutama dalam meningkatkan pangsa pasar dan daya saing usaha.

Kemudian, produk UMKM diharapkan akan lebih diterima di pasaran terutama yang membutuhkan produk halal, baik di pasar domestik maupun Internasional.

"Selanjutnya, khusus bagi kalangan pelaku usaha, maka pemberian sertifikat halal mendorong minat dan kepercayaannya dalam melakukan kerja sama bisnis waralaba atau franchise yang diminati banyak pengusaha, karena dapat memberi nilai tambah dan mudah memperluas jaringan distribusi," tandas Maurits. ♦

APRESIASI UNTUK KINERJA PEGAWAI PEMPROV SULSEL

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin mengapresiasi kinerja seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi yang dipimpinnya tersebut. Pasalnya, berkat kerja keras dan kekompakan mereka, Pemprov Sulsel berhasil mencapai hasil yang positif dalam banyak hal.

Beberapa hasil positif yang berhasil dicapai tersebut di antaranya adalah, Pemprov Sulsel berhasil menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2024 dalam waktu singkat. Bahkan penetapan APBD Pokok 2024 tersebut merupakan yang tercepat sepanjang se-

dengan DPRD Sulsel,"kata Bahtiar dalam sambutannya saat apel pegawai lingkup Pemprov Sulsel, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur, baru-baru ini.

Hal tersebut, kata Bahtiar, hasil dari komunikasi dan koordinasi seluruh stakeholder lingkup Pemprov Sulsel. Paling penting semua kompak dalam menjalankan tugas masing-masing. Termasuk Sulsel provinsi pertama melakukan penetapan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

"Kita bisa kompak semua. Terima kasih kepada kawan-kawan semua dalam mendukung APBD untuk Pemilu. Pemprov

bisa langsung dilayani oleh tenaga kesehatan Pemprov Sulsel, kabupaten kota, dan tenaga kesehatan di TNI," jelasnya.

Apresiasi juga disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD Sulsel, Amson Padalo, atas pencapaian Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), di beberapa daerah di Sulsel.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Amson Padalo. Alhamdulillah sudah hujan Pak Amson. Ini kerjanya BPBD, dan sekali lagi terimakasih kepada Pak Amson Padalo. Ini adalah jalan tercepat untuk mendatangkan hujan dengan rekayasa penaburan garam 10 ton," tuturnya.

Dalam arahnya, Pj Gubernur Sulsel kembali mengingatkan untuk lebih mengoptimalkan lagi penanaman cabai 10 pohon di setiap rumah. Harga cabai saat ini masih cukup tinggi di pasaran.

"Saya minta tolong penanaman 10 pohon cabai di depan rumah lebih dimaksimalkan lagi. Karena saya mampir di pasar, masih tinggi harga cabai merah. Tahun depan harus ada bibitnya untuk ditanam di depan rumah masing-masing," kata Bahtiar.

Pj Gubernur Bahtiar juga mengajak para pegawai, baik ASN maupun non ASN, untuk tidak hanya berpaku pada pendapatan sebagai pegawai saja. Namun, bisa mencari pendapatan lain, dengan memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), baik pertanian budidaya pisang cavendish, tanaman cabai, rumput ikan, dan jenis KUR lainnya.

Kendati demikian, ia menyampaikan tahun depan ASN lingkup Pemprov Sulsel akan menerima kenaikan Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP). "Ada sedikit TPP tahun depan, karena ada kompensasi selama tiga bulan ini, teman-teman sudah bekerja keras. Semua harus mendapatkan 100 persen," imbuhnya.

Bahtiar juga mengingatkan agar para pegawai tidak menerima permintaan dari siapapun yang mengatasnamakan dirinya dalam segala hal, termasuk mengatasnamakan keluarganya.

"Jangan sampai ada permintaan-permintaan yang mengatasnamakan saya dan keluarga. Saya pastikan itu hoaks," tegasnya. ♦



Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin dan Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari saat penertapan APBD Pokok Sulsel 2024.

jarah penetapan APBD Pokok di Pemprov Sulsel.

Menurut Bahtiar, keberhasilan tersebut adalah berkat kerja keras dan koordinasi yang baik dari para pegawai selama ini. Terlebih untuk Sekretaris DPRD Sulsel yang sudah menjadi jembatan antara eksekutif dengan legislatif.

"Dalam sejarah Sulawesi Selatan kita pertama selesaikan APBD Pokok kita. Sekwan kita ini hebat sekali, ini bagian dari bawahan Sekda juga. Ini hebat sekali, banyak membantu, menyambungkan kita

Sulsel yang pertama tandatangani NPHD," tuturnya.

Khusus untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang, Pemprov Sulsel juga merupakan provinsi pertama menginisiasi untuk posko kesehatan di lokasi terdekat dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya. Hal tersebut sengaja diinisiasi, karena bercermin pada Pemilu 2019 silam di mana banyak petugas TPS jatuh sakit halan.

"Kalau ada petugas TPS yang drop,

KESIAPAN SIBER SULSEL HADAPI PEMILU DAN PILKADA

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin mengingatkan pentingnya keamanan siber pada penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) sangatlah penting. Apa lagi dalam menghadapi hecker dan penyebaran informasi bohong atau hoaks.

Menurut Bahtiar, jelang Pemilu dan Pilkada (Kepilihan Daerah) 2024 mendatang, stakeholder terkait perlu memperkuat proteksi sibernya. Apa lagi sejauh ini, hampir semua pemerintahan lemah keamanan sibernya.

"Kita perlu proteksi yang kuat untuk keamanan siber. Hampir semua pemerintahan lemah keamanan sibernya. Ini harus diproteksi untuk menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," kata Bahtiar dalam sambutannya saat membuka Literasi Keamanan Siber pada penyelenggaraan Pemilu, yang dilaksanakan di Hotel Gammara, Kota Makassar, Sulsel, belum lama ini.

Sebagai mantan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengaku mengetahui bagaimana kerjasama kehumasan dan penyebaran informasi, apalagi di tahun politik. Ia menyampaikan betapa pentingnya membangun narasi tunggal untuk kebutuhan tahun-tahun politik.

"Kita harus membangun narasi tunggal. Ini harus ada manajemen tunggal dalam penyebaran informasi. Anggaran humas ini cukup besar untuk penyebaran informasi. Nah jangan sampai kita kalah dari attacker (penyerang), yang sudah menjadi profesi baru saat ini," jelasnya.

Ia mengungkapkan, jumlah penduduk Sulsel 9,3 juta. Sedangkan secara non fisik bisa mencapai 90 juta. Pasalnya, satu orang bisa membuat sampai 10 akun anonim di media sosial.

"Ada satu orang bisa membuat 10 akun anonim berbeda-beda. Jadi dari 9,3 juta itu bisa menjadi 90 juta bahkan sampai 100 juta di sosial media," lanjutnya.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh stakeholder agar jangan sampai didikte oleh smartphone, terkhusus soal algoritma pencarian di mesin pencarian. Seperti google, media sosial seperti youtube, twitter, facebook, instagram dan lainnya.

"Kita didikte oleh algoritma di smartphone. Itu pentingnya wawasan untuk memahami informasi. Literasi keuangan kita semua juga masih rendah, makanya ada masih ada penipuan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk literasi keamanan siber pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Ser-

Pilkada Serentak 2024," ujarnya.

Yang terpenting, kata Andi Winarno, bagaimana semua stakeholder betul-betul bisa menyortir informasi, mana yang bisa disebar, mana yang tidak. Apalagi den-



Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin

entak 2024.

"Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap penyebaran informasi, dan pengetahuan tentang penyelenggaraan Pemilu dan

gan kemajuan teknologi saat ini.

"Bagaimana mengawasi penyebaran hoaks terkait pencegahan pengelolaan data proses Pemilu dan Pilkada serentak," pungkasnya. ♦

Waras Wasisto

TERMOTIVASI KEJAR PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BEKASI KARAWANG DAN PURWAKARTA

Mengejar percepatan pembangunan di 3 wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Purwakarta, menjadi salah satu motivasi politikus ini menjadi wakil rakyat

Dua periode duduk di parlemen Provinsi Jawa Barat, membuat Waras Wasisto, politikus PDI Perjuangan ini semakin bersemangat turut mendorong percepatan pembangunan seperti yang digelorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

"Untuk itulah saya termotivasi untuk lebih meningkatkan keterwakilan rakyat Jabar dari DPRD Provinsi Jabar ke DPR RI, agar bisa menjembatani aspirasi atau kepentingan rakyat Jabar ke pemerintah pusat," tutur pria yang akrab disapa dengan sebutan Mas Waras ini.

Hingga saat ini Waras masih anggota DPRD Provinsi Jabar daerah pemilihan Kota Bekasi dan Kota Depok, atau Jabar 8. Pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019 lalu, Waras mampu meraih perolehan suara sebanyak 89 ribu suara. Kepercayaan dari puluhan ribu masyarakat itu diperolehnya lantaran, dibalik sosoknya yang supel, Waras juga dikenal dekat dengan tokoh ulama, kiyai dan para habaib.

Namun untuk Pemilu 2024 mendatang, pria asal Jawa Timur ini bakal bertarung menuju ke Senayan dengan nomor urut 3, dan berpindah dapil menjadi Jabar 9 meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Purwakarta.

"Keputusan pindah dapil bukanlah keputusan partai, tapi memang kemauan saya sendiri," katanya.





Alasan pindah dapil, pria kelahiran Ma-diun 9 Oktober 1970 ini menjelaskan, dirinya menilai pembangunan di Kabupaten Bekasi saat ini masih terhambat, tidak greget lah, sebutnya.

Waras mencontohkan, wilayah Kabupaten Bekasi dengan 23 kecamatan, hanya mampu menghasilkan anggaran pengeluaran dan belanja daerah (APBD) sebesar 6 Triliun, dinilainya masih sangat kurang untuk memajukan pembangunan.

"APBD Kabupaten Bekasi itu terbatas, hanya sekitar 6 Triliun, anggaran yang terbatas itu untuk Kabupaten Bekasi yang sangat luas dengan 23 kecamatan, lalu untuk belanja tidak langsung, kemudian untuk PNS dan lainnya, siasanya hanya sekitar 2,5 atau 3 Triliun untuk pembangunan. Itu tidak cukup untuk mengejar percepatan pembangunan," ucapnya.

APBD, kata Waras, tidak bisa dinaikkan begitu saja, upaya meningkatkan bisa dilakukan dengan menggenjot PAD atau Pendapatan Asli Daerah melalui pajak atau retribusi sehingga bisa mengerek APBD. Kemudian cara lain yang cukup penting menurut Mas Waras adalah dengan memilih kepala daerah yang kreatif, inovatif, dan mampu melakukan terobosan-terobosan, sehingga bisa mendapatkan anggaran bantuan dari Pemerintah Pusat.

Salah satu cara untuk melakukan percepatan pembangunan menurut Waras, adalah dengan meminta perhatian dari Pemerintah Pusat. Waras pun mencontohkan di Kota Bekasi, yang saat ini dipimpin Wali Kota Tri Adhianto, kader PDIP. Kepala Daerah di tingkat Kota atau Kabupaten harus mampu menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat. Artinya harus mempunyai akses agar mendapat anggaran tambahan untuk percepatan pembangunan.

"Seperti di Kota Bekasi, contohnya folder air, itu tidak ada dari anggaran Pemkot Beka-

si, semua dari APBN. Begitu juga revitalisasi kali Bekasi sebesar 4 Triliun juga dari APBN, Fly over di Rawapanjang itu anggarannya berasal dari bantuan Pemda Provinsi DKI, karena memang uangnya [APBD Kota Bekasi] tidak cukup. Satu lagi, pembangunan underpass di Bulak Kapal Bekasi Timur itu anggaran dari APBD Provinsi Jabar," bebernyanya.

Artinya, Waras menjelaskan, di sini diperlukan kelihaihan kepala daerah untuk membuat terobosan-terobosan, sehingga mempunyai anggaran yang cukup untuk melakukan percepatan pembangunan di



wilayahnya.

Untuk itulah, lanjut dia, bila terpilih menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bekasi, maka ia akan mendorong percepatan pembangunan di 3 wilayah dapilnya, yakni Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

"Dan jika perlu, kepala daerah yang memimpin Kabupaten Bekasi atau Bupati Bekasi nanti yang terpilih pada Pilkada serentak nanti adalah kader PDI Perjuangan," ujarnya.

Untuk menggenjot PAD, Waras menambahkan, satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan pajak. Selama ini Kota dan

memiliki lahan pertanian yang luas begitu pun dengan Karawang dan Purwakarta.

Infrastruktur pertanian menurut dia membutuhkan anggaran, dan ini yang akan diperjuangkan Waras dengan menjembatani ke pemerintah pusat.

"Salah satu misi saya adalah memperjuangkan adanya bantuan anggaran terhadap infrastruktur pertanian demi kemashlahatan masyarakat dan penopang pertumbuhan perekonomian global kelak akan saya perjuangkan di kursi Senayan sana membagikan Anggaran tersebut sesuai kebutuhan pangan," paparnya.

tuk pertumbuhan bisnis di wilayah greater Jakarta. Ini tidak terlepas potensi economic based di sepanjang wilayah tersebut yang didukung dengan berbagai proyek seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, Bandara Internasional Kertajati, Pelabuhan Patimban, Jalan Tol, LRT dan sebagainya," jelasnya.

"Demi mewujudkan konsep pembangunan yang lebih baik dan saling mendukung, sambung Waras, kita berharap ketiga wilayah tersebut bisa terintegrasi satu sama lain. Artinya, Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta harus menjadi satu kesatuan wilayah," tandasnya.



Kabupaten Bekasi pajak penyumbang PAD terbesar adalah dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Motivasi lainnya yang mendorong Waras ingin mengambil posisi keterwakilan masyarakat Kabupaten Bekasi di DPR RI, kata dia, melihat wilayah Kabupaten Bekasi, yang selain memiliki kawasan industri cukup luas dengan pertumbuhan yang pesat juga

Selain itu, meningkatkan potensi kawasan sebagai pusat bisnis dengan integrasinya ke berbagai kawasan industri mulai Bekasi, Karawang hingga Purwakarta untuk menjadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam membangun Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

"Koridor Bekasi, Karawang dan Purwakarta sendiri telah menjadi primadona un-

Bicara soal keterwakilan di parlemen, Waras menjelaskan, seorang wakil rakyat yang baik adalah berpihak kepada rakyat. Caranya, antara lain dengan kembali ke konstituen. Karena itu di setiap jenjang anggota dewan, baik DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi maupun DPR RI, ada kegiatan reses.

"Reses itu, anggota dewan kembali ke konstituen untuk mendengarkan keluhan

masyarakat, kemudian mencari solusinya, juga menampung aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah. Dari aspirasi itu, akan diwujudkan dalam langkah kongkret, melalui tahapan APBD,” papar Waras.

Kalau anggota dewan tidak pernah meres, lanjutnya, berarti bukan dewan yang baik. Bagaimana bisa mendengar langsung keluhan masyarakat bila tidak pernah turun dan bertemu dengan masyarakat. Selain itu, dewan juga harus mau menerima aspirasi dari semua kelompok masyarakat

“Alhamdulillah, sepuluh tahun jadi anggota dewan saya selalu turun meres. kemu-

dan Kota Depiok selama 2 periode di DPRD Jabar, Waras mencontohkan sejumlah pembangunan yang didorongnya, baik melalui APBD maupun APBN, seperti pembangunan sekolah-sekolah di Kota Bekasi dan Depok salah satunya adalah SMAN 14 Kota Bekasi.

“Kemudian di Depok yang tadinya ada beberapa kecamatan tidak ada SMA, sekarang ada. Lalu pembangunan foler-folder air yang mampu meminimalisir banjir di Kota Bekasi, sehingga sekarang banjir sudah berkurang. Peer kami tinggal banjir di satu titik yang belum teratasi, yaitu di Pondok

“Tolak ukurnya adalah melihat jumlah kursi yang merosot. Pada periode 2014-2019, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan dapil Kabupaten Bekasi ada 2 kursi, tapi pada periode 2019-2024 merosot jadi 1 kursi. Ini salah satunya yang ingin saya benahi, supaya kursi PDIP bisa bertambah, minimal tahun 2024 nanti kembali menjadi 2 kursi di DPR RI,” beber Waras.

“Begitu pula kursi di DPRD Jabar, baik Kabupaten Bekasi, Purwakarta, Karawang apalagi, merosot semua, karena itu ini menjadi tantangan saya,” sambungnya.

Waras sendiri optimis pada Pileg 2024



dian sudah banyak yang saya lakukan untuk membantu masyarakat di Kota Bekasi ini yang kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Terkadang memang campur tanga saya tidak kelihatan oleh masyarakat, tapi tidak masalah, yang penting asyarakat di dapil saya bisa terbantu,” ungkapny.

Tentang kerjanya untuk Kota Bekasi

Gede Permai. Itu pun saat ini sedang dilakukan revitalisasi Kali Bekasi yang dibantu Kementerian PUPR. Kalau revitalisasi itu selesai, maka banjir di PGP itu juga akan selesai,” papar Waras.

Lebih jauh diungkapkannya, alasan lain yang mendorong Waras berpindah dapil, lantaran dirinya melihat PDIP di dapil Jabar 9 ini seperti tidak terurus.

nanti akan mampu meraih 350.000 suara. Sebagai mantan aktifs di Bekasi dan ketua perserikatan buruh di Jawa Barat ini mengaku dekat dengan berbagai elemen masyarakat baik di Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

“Dengan komunikasi yang baik, maka saya yakin bisa menarik suara yang tadiya bukan PDIP menjadi PDIP,” pungkasnya. ♦

ISTITHA'AH DAN TIPU DAYA SETAN DALAM HAJI



Islam seperti agama-agama lainnya mempunyai pilgrimage atau perjalanan suci yang disebut Hajj atau Haji. Secara bahasa, Hajj berarti berniat, bertujuan, bermaksud.

OLEH KHOLILI KHOLIL
ALUMNI PESANTREN LIRBOYO-
KEDIRI

Haji atau Haji dilakukan menuju Makkah dan berisi ritual-ritual yang sarat akan tradisi Abrahamik, alias bersifat Ibrahim. Haji ini kewajiban, tiang agama, sesuatu yang pokok atau inti. Haji masuk Rukun Islam, berada di posisi kelima.

Rukun Islam terdiri dari 1. Syahadat, 2. Shalat, 3 Zakat, 4. Puasa, 5. Haji. Haji adalah wajah atau Islam seperti rukun Islam yang lain. Jadi, memang sangat penting.

Namun demikian, sejak awal tradisi Haji hanya dimaksudkan bagi mereka yang mampu, kuat, dan tahan, seperti termaktub dalam Surat Ali Imran ayat 97, artinya: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam"

Ayat di atas menekankan kewajiban berhaji, tetapi pada saat bersamaan membatasi man istath'a ilayhi sabila, bagi yang sanggup dan mampu melakukan perjalanan.

Artinya, kewajiban haji bagi yang mampu atau sanggup. Sebaliknya, yang

tidak mampu hukumnya tidak wajib. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah: Apa yang dimaksud dengan "mampu"?

Para ulama menyebutkan setidaknya ada sebelas standar seseorang disebut mampu. Dari sebelas standar kelayakan itu, menurut penulis hanya ada enam yang relevan dengan zaman sekarang.

PERTAMA, memiliki ongkos pulang-pergi. KEDUA, tersedianya transportasi yang memadai. KETIGA, rutenya aman. KEEMPAT, tersedianya konsumsi di tempat-tempat tujuan (atau tempat istirahat di tengah perjalanan). KELIMA, adanya



mahram, suami, atau rombongan yang membuat wanita aman melakukan perjalanan. KEENAM, ini yang juga tak kalah penting dan sering dilupakan, adalah kesehatan jasmani.

Jika salah satu dari keenam syarat ini tidak mampu dipenuhi oleh calon jamaah haji, maka kewajiban Haji sudah gugur baginya.

Para ulama menyebutkan bahwa memaksakan pergi berhaji padahal prasyarat tidak terpenuhi adalah suatu bentuk ghurur, ditipu oleh setan, meskipun hajinya sendiri sah, berpahala, dan menggugurkan kewajibannya.

Namun demikian, orang yang demikian ini—selain mendapat pahala—juga mendapat dosa dikarenakan ia ghurur, alias terkena tipu daya setan. Haji yang semacam ini sangat sulit diberi predikat mabrur.

Di zaman dulu, perjalanan haji sangatlah jauh, melelahkan, risiko tinggi.

Maka tak heran jika banyak ulama-ulama yang tidak berhaji. Maka tak mengherankan bila beberapa ulama berfatwa bahwa ahl magrib alias penduduk Maroko dan sekitarnya, di zaman dulu, tidak wajib berhaji.

Ulama Malikiyah terkemuka, Al-Thurthusi, berfatwa dengan tegas bahwa penduduk Maroko dan sekitarnya (sekali lagi saya tegaskan: di zaman dulu!) tidak wajib berhaji. Alasannya tak lain dan tak bukan adalah jarak yang sangat jauh.

Ia menulis: "Jika seseorang terus memaksa berhaji, maka kewajiban haji tetap tertunaikan namun ia mendapat dosa sebab ia tanpa sadar terperangkap tipu daya setan (gharar)."

Oleh sebab itu, jika haji tidak terlaksana maka hal itu bukanlah akhir dari segalanya. Banyak jalan ibadah lain yang bisa dilaksanakan.

Bagaimanapun, menjaga keselama-

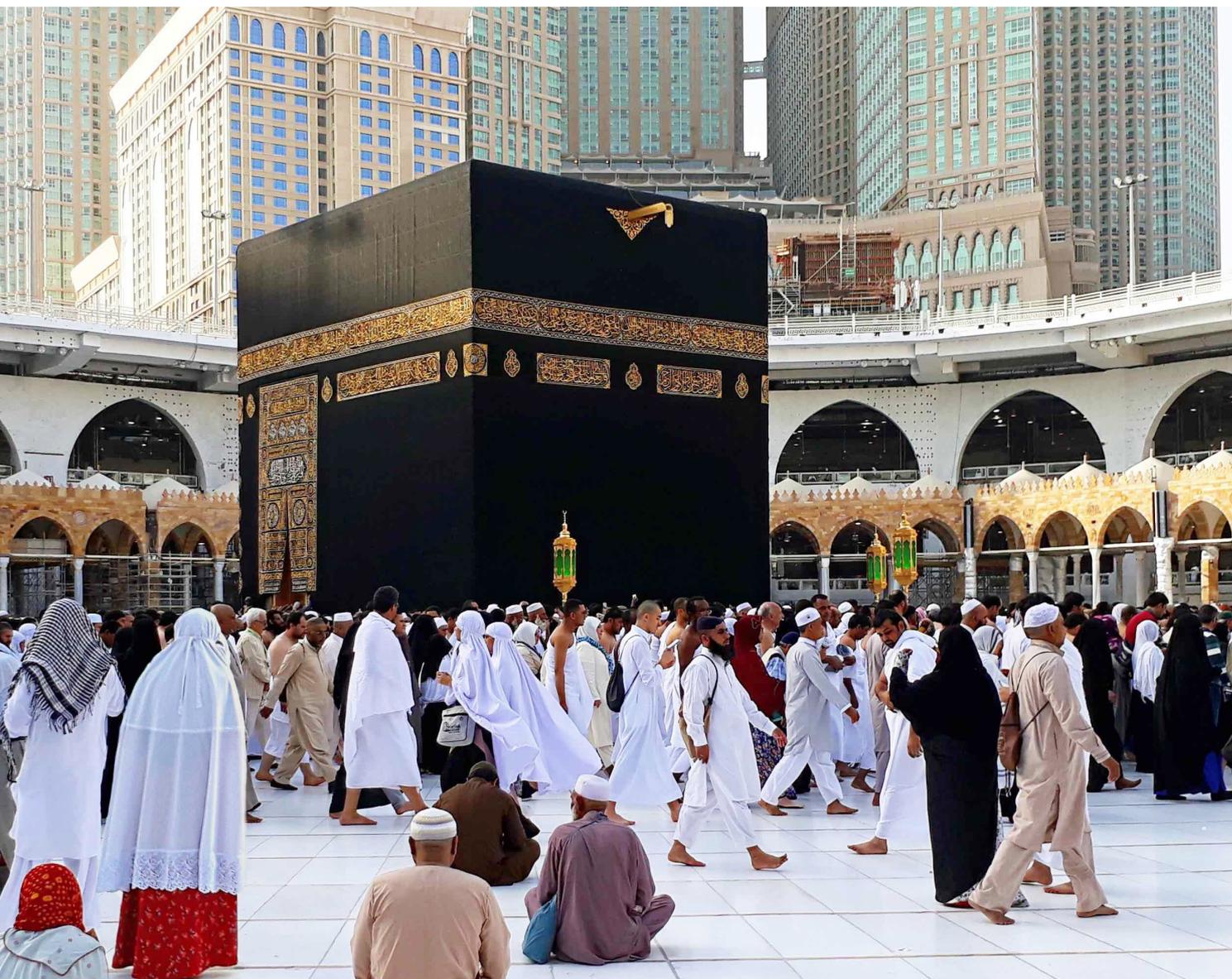
tan diri lebih didahulukan oleh agama dari pada ajaran-ajaran agama yang bersifat ritual (idza ta'aradla ifdhun-nafs 'ala ifdhid-din quddima ifhhun-nafs).

Bahkan yang bersifat akidah, jika keselamatan diri terancam, maka seseorang boleh untuk 'berpura-pura' melepaskan akidah untuk menyelamatkan diri.

Tentu saja logika yang sama bisa kita gunakan untuk Haji; jika kesehatan terancam, tak perlu bersedih, menjaga kesehatan juga jauh lebih bernilai ibadah dari pada Haji.

Begitu pula sebaliknya; memaksa diri untuk terus berangkat Haji tidak membuat seseorang lebih dianggap teguh ibadahnya dari pada yang mendahulukan keselamatan. ♦ dilansir dari laman nu online]

Kholili Kholil, alumni Pesantren Lirboyo-Kediri. Saat ini mengajar di Pesantren Cangaan Pasuruan, Jawa Timur.





Menuju Pilgub Kalbar 2024

INI DERETAN FIGUR YANG BERPELUANG LAWAN PETAHANA

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) 2024 mendatang, diprediksi akan ketat. Nama-nama Bakal Calon Kepala Daerah (Bacalonkada) masih terus bermunculan, salah satunya dari Ketua-ketua Partai Politik di Kalbar.

Nama-nama mereka disebut-sebut berpeluang besar maju, dibandingkan nama-nama lain. Lalu siapa saja mereka?

Yang pertama, tentu saja, petahana Sutarmidji-Ria Norsan. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar itu telah mengakhiri masa jabatannya pada September lalu. Dan Sutarmidji pun memastikan akan kembali 'bertarung' pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar, yang artinya juga siap mengabdikan diri, jika terpilih untuk periode kedua.

"Saya tidak maju sebagai calon anggota DPRD atau DPR RI, tidak. (Pilgub) Ya kita lihat nanti, tapi sampai hari ini saya

tetap berpikir, karena masih boleh maju, saya pasti akan maju. Makanya yang mau, ingin maju gubernur ya siap-siap. Karena saya pun harus siap-siap juga dari sekarang kan," kata Sutarmidji, Selasa (13/6/2023).

Meski Sutarmidji bukanlah ketua partai politik, namun kansnya besar, karena didorong partai politik untuk maju masih cukup besar. Pertama alasannya, karena masih ada pamor, dan kekuatan sebagai kepala daerah aktif. Sehingga diprediksi akan banyak partai yang merapat kembali.

Begitu pun dengan nama Ria Norsan, Wakil Gubernur Kalbar periode 2019-2024 ini. Tak sedikit juga partai politik di Kalbar

mendorongnya maju kembali. Hanya saja, waktu akan menjawab, apakah pasangan Sutarmidji-Ria Norsan ini masih erat atau justru terpecah menjelang pendaftaran Bacalonkada Pilgub Kalbar 2024 mendatang.

Sebagai petahana, Midji-sapaan karibnya merasa dirinya tidak harus lebih banyak melakukan persiapan dalam menghadapi Pilgub 2024 kelak. Justru menurutnya, jika ada calon atau tokoh baru yang berniat ikut dalam kontestasi politik itu, harus lebih bersiap-siap dari dirinya.

Selanjutnya, ada nama Lasarus, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar, sekaligus Ketua Komisi V DPR RI. Ia akan menjadi

lawan tangguh pasangan Midji-Norsan. Politisi PDI Perjuangan dari dapil Kalbar II ini, disebut-sebut akan menjadi kontestan Pilgub Kalbar 2024 mendatang.

Namanya banyak disebut-sebut sejumlah lembaga survei, sebagai salah satu kandidat terkuat. Perolehan 15 kursi legislatif 2019-2024, menjadi buktinya.

Dalam sebuah pernyataannya pada awal Oktober 2021, Lasarus menegaskan, bahwa dirinya tidak ingin menjadi calon Wakil Gubernur. Andai maju Pilkada 2024 mendatang, ia menghendaki maju sebagai Bacalonkada Gubernur dan tidak ingin menjadi orang nomor dua.

"Skenarionya gak ada cerita kita wakil. Kita kalau maju, ya kita ambil gubernurnya. Tapi ini dinamikanya masih panjang. Kita hitung-hitungan dulu. Gak mudah ini," kata saat diwawancarai awak media, beberapa waktu lalu.

Nama ketua DPD Golkar Kalimantan Barat, Maman Abdurahman pun kini terus mencuat. Politisi muda ini, memang didukung kader-kader Partai Golkar untuk maju sebagai Bacalonkada Gubernur Kalbar pada Pilkada 2024 mendatang.

Meski begitu, Maman memastikan bahwa partainya tetap akan membuka peluang sama untuk kader terbaik lainnya. Maman juga mengapresiasi dukungan masing-masing DPD tingkat II Partai Golkar kepada dirinya untuk maju sebagai calon Gubernur.

"Dengan tegas, saya katakan, saya senang, saya bangga, dan saya mengapresiasi," ucap Maman Abdurahman, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah sepakat mengusung Maman Abdurahman di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalbar tahun 2024.

Maman juga mendapat mandat penuh menentukan bakal Calon Wakil Gubernur yang akan mendampingi.

Nama lain yang juga disorot bakal mau di kontestasi Pilgub Kalbar adalah Syarif Abdullah Alkadrie, Ketua DPW Nasdem Kalbar, yang sekaligus juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Syarif berpeluang besar bertarung di Pilgub Kalbar 2024 mendatang. Di bawah kepemimpinannya, perolehan 8 kursi DPRD Kalbar dan unsur pimpinan dapat diperoleh. Hanya saja, Ami Dollah sapaan karibnya, belum menjawab secara terbuka.

"Belanda Masih Jauh"," katanya, seperti dilansir dari Pontianak Post.

Nama Syarif Abdullah Alkadrie alias Bang Doel sendiri, disebut-sebut berpeluang besar maju di Pilkada Kubu Raya. Tandanya, bahwa politisi Nasdem dari Dapil Kalbar 1 ini, sangat rajin turun ke lapangan.

"Jika masyarakat Kubu Raya menghendaki dan menginginkan saya maju,

pimpinan DPRD tingkat Kabupaten/Kota termasuk Provinsi," ungkap Yuliansyah.

Nama Boyman Harun, Ketua PAN Kalbar dan anggota Komisi V DPR RI, juga menjadi salah satu kontestan yang perlu diperhitungkan. Boyman memiliki prinsip kuat mengenai Pilgub Kalbar 2024. Baginya yang tidak boleh dalam politik yaitu kalah.

"Kalau buat saya, berpolitik sudah profesi. Cita-citanya tentu, kalau tidak duduk sebagai legislatif, ya sebagai eksekutif," tegasnya.

"Sebagai kader, saya selalu siap tapi menurut hitung-hitungan matang. Justu yang tidak boleh itu adalah kalah," im-



maka saya akan maju," katanya waktu itu.

Nama ketua partai lain, yang juga patut diperhitungkan adalah Yuliansyah, Ketua DPD Gerindra Kalbar, sekaligus Pengusaha Kawakan. Sesuai

instruksi dari DPP Gerindra, bahwa masing-masing Ketua Partai di daerah, memang diharapkan maju Gubernur, Walikota, Bupati atau Wakilnya.

"Kami (Gerindra Kalbar) fokus dulu di Pileg dan Pilpres. Targetnya adalah

buhnya.

Nama tokoh sekaligus ketua partai politik lain, yang juga patut diperhitungkan, adalah Ermin Elviani. Ia adalah Ketua DPD Partai Demokrat dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalbar.

Namanya sangat layak dipertimbangkan di Pilgub Kalbar 2024 mendatang. Ermin tak banyak bicara, ia hanya mengatakan bahwa koordinasi, pembenahan partai dan mensolidkan partai menjadi salah satu tugasnya sebagai Ketua Demokrat Kalbar yang baru.

"Untuk ke Pilgub Kalbar nanti dululah. Tetapi sebagai kader, saya siap seandainya ditugaskan partai," katanya.

Yang terakhir, tentu saja Arief Joni Prasetyo. Menurut ketua DPW PKS Kalbar, yang juga anggota DPRD Kalbar ini, bahwa sebagai kader partai politik, dirinya siap maju di Pilgub Kalbar 2024 mendatang.

"Kalau DPP PKS mendorong kita maju, seluruh kader harus diminta senantiasa menaikan popularitas dan elektavilitas.

Sehingga ketika disurvei memang memiliki tingkat keterpilihan tinggi," tegasnya. ♦





MENUJU PILKADA KALSEL 2024, SIAPA YANG PANTAS?

Dinamika politik menjelang Pemilu 2024 di Kalimantan Selatan (Kalsel) pun sudah mulai terasa, hal ini terlihat dari beberapa partai politik yang mulai merapatkan barisan atau melakukan konsolidasi untuk menyiapkan kader-kadernya sebagai kontestan calon legislatif maupun kepala daerah.

Dipastikan Gubernur petahana Sahbirin Noor, tidak akan mencalonkan diri kembali Pilgub Kalsel 2024, karena telah menjabat selama dua periode.

Saat ini, sejumlah nama yang bakal maju dipertarungan Pilkada Gubernur Kalsel 2024 sudah mulai bermunculan. Tentunya, mereka bukanlah orang-orang sembarangan.

Di antaranya adalah Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar yang merupakan Ketua DPW PKB Kalsel. Zairullah sudah dua kali maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalsel, yaitu pada Pilkada 2010, namun kalah dari Rudy Arifin dan lima tahun kemudian kalah dari Sahbirin Noor.

Lalu, bagaimana dengan 2024, akan kah ia mencobanya lagi? Jawabannya, Zairullah masih fokus membangun Tanah Bumbu. Tetapi tanpa menutup habis peluang ke 2024.

"Sementara saya fokus menunaikan tugas di sini dulu... untuk Pilgub, kita lihat saja bagaimana respons masyarakat. Dan tentu perlu dukungan ulama dan pengusaha," kata Zairullah, seperti dilansir dari Radar Banjarmasin, beberapa waktu lalu.

Selain itu, muncul pula nama anggota DPRD, HM Rosehan Noor Bachri, yang juga tak bisa diremehkan. Nama anggota DPR RI, Pangeran Khairul juga disebut-sebut akan maju dalam pertarungan ini.

Namun yang paling menonjol adalah

nama Wakil Gubernur Kalsel, H Muhidin, yang juga Ketua DPW PAN Kalsel. H Muhidin, selain memiliki modal politik, juga memiliki modal ekonomi dengan jaringan pengusahanya. Ia juga dikenal sangat dekat dengan beberapa ulama di Kalsel yang memiliki basis massa besar.

Selain itu, H Muhidin juga adalah calon Gubernur Kalsel yang hampir menjadi pemenang pada Pilgub sebelumnya, yakni pada Pemilu tahun 2015.

H Muhidin sendiri telah menyatakan kesiapannya maju di Pilgub 2024 mendatang.

"Kita siap maju sebagai Calon Gubernur Kalsel tahun 2024, kalau Allah SWT mengijinkan," kata H Muhidin, seperti



dilansir dari matabanua.co.id beberapa waktu lalu.

"Kita maju untuk meneruskan pembangunan yang sudah dilaksanakan Paman Birin (Sahbirin Noor -red) dan kita laksanakan kembali, kalau ada kekurangan akan ditutupi dimasa yang akan datang," tambahnya.

Nama Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, pun juga disebut-sebut berpeluang maju.

Kita siap maju sebagai Calon Gubernur Kalsel tahun 2024, kalau Allah SWT mengijinkan.

Walikota Banjarmasin dua periode itu, bahkan sudah mendapatkan dukungan internal dari partainya untuk maju pada Pilgub 2024.

Selain nama-nama tersebut, muncul juga nama H Hasnuryadi Sulaiman. Pengamat Politik dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muhammad Riduan-syah Syafari, mengungkapkan, bahwa H Hasnuryadi Sulaiman sudah mendapat

restu dari DPD partai Golkar Kalsel untuk maju di Pilkada Kalsel.

Yang tak kalah menariknya, nama Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rifqinizamy Karsayuda, yang mengaku tengah dalam istikharah politik, juga muncul sebagai salah satu kontestan.

Keputusannya pada 2024 nanti sangat tergantung pada restu dari Haji Isam alias Andi Syamsuddin Arsyad, seorang pengusaha terkenal di Kalsel.

Meski begitu, Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) itu mengaku, telah siap maju pada Pilkada Kalimantan Selatan (Kalsel) 2024.

"Saya sedang fokus untuk menjadi Gubernur Kalsel 2024," kata Rifqinizamy.

Rifqinizamy sendiri, kini telah resmi m u n d u r

dari PDIP dan keanggotaan DPR RI per Rabu, 23 Agustus 2023. Ia pun menghaturkan terima kasih kepada PDIP dan masyarakat Kalsel, yang telah kurang lebih 4 tahun memberikan kepercayaan sebagai anggota DPR RI.

Jika benar sejumlah tokoh Kalsel itu siap berlaga di Pilkada 2024, maka peta politik demokrasi di Banua pun akan semakin berwarna. ♦



Pilgub Kaltim 2024

ELEKTABILITAS MELEJIT, ISRAN NOOR KEMBALI MAJU?

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 memang masih 12 bulan lagi. Namun beberapa figur bakal calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) sudah mulai bermunculan. Lalu, siapa saja yang berpotensi sebagai bakal calon Gubernur Kaltim?

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan digelar usai pelaksanaan Pemilu 2024 selesai. Pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024, yang akan memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota

Gubernur.

Selain Rudy Mas'ud, Ketua DPD Gerindra Kaltim, Andi Harun juga diprediksi berpotensi menjadi calon Gubernur Kaltim.

Menurut hasil survei perusahaan konsultan politik, Charta Politika Indonesia,

Mulyadi menempati posisi ketiga dengan 12,4 persen.

Dengan memiliki elektabilitas yang tinggi inilah, Isran Noor mulai memperhatikan tanda akan kembali maju sebagai calon Gubernur, yang juga akan kembali



DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pilkada serentak dijadwalkan pada 27 November 2024.

Meski pelaksanaannya masih satu tahun lagi, namun beberapa figur sudah mulai bermunculan. Bahkan beberapa partai politik sudah berancang-ancang menyiapkan bakal calonnya. Seperti pengurus DPD Partai Golkar Kaltim, yang akan mengusung Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas'ud sebagai bakal calon

pada 4-12 Maret 2022, elektabilitas Andi Harun cukup tinggi di Kaltim. Andi Harun berada di posisi kedua setelah Gubernur Kaltim, Isran Noor.

Survei Charta Politika Indonesia menyebutkan, Isran Noor yang telah berakhir masa jabatannya pada 1 Oktober 2023, memperoleh tingkat keterpilihan (elektabilitas) 19,4 persen suara, menyusul Wali Kota Samarinda, Andi Harun dengan 14,4 persen. Sementara Wakil Gubernur, Hadi

menggandeng Hadi Mulyadi. Hal tersebut diketahui dari ungkapan Hadi Mulyadi di acara Program Patnership Trip Media Kaltim.

Hadi Mulyadi sendiri, menunjukkan komitmennya untuk kembali mendampingi Gubernur Isran Noor di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 mendatang. Kendati saat ini, dirinya memiliki aspirasi politik di tingkat Nasional.

"Nah ini pertama kalinya di depan pub-

lik Pak Isran menyampaikan akan maju kembali dengan saya. Nah, kalau sudah diajak, tentu saya siap maju bersama beliau,” ungkap Hadi Mulyadi.

Pernyataan ini, menunjukkan kesediaan Hadi Mulyadi untuk kembali berpasangan dengan Isran Noor, meskipun ia memiliki tugas di partai yang kini dipimpinnya, Partai Gelora, dan aspirasi untuk mendapatkan kursi parlemen di Senayan.

Hadi Mulyadi juga menegaskan bahwa jika dipinang kembali, ia akan memilih untuk tetap bersama Isran Noor.

“Kalau begitu keinginan beliau, terpilih atau tidak terpilih November 2024 saya akan maju lagi,” tegasnya.

Pada peringatan HUT Kemerdekaan ke-78 RI, di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Isran Noor menyatakan untuk kembali maju dalam Pilgub Kaltim mendatang.

“Terima kasih, *I love you all, with mister vice governor* (Wakil Gubernur) terima kasih juga atas dukungannya selama ini,” kata Isran Noor dalam pidatonya.

Ungkapan ini disambut dengan tepuk tangan meriah dari hadirin yang memenuhi acara tersebut.

“Yang akan datang tidak usah memaksakan dukungan, kalian dukung atau tidak dukung, kami maju. Yang lain pelengkap, ora bisa ngalahkan,” tambahnya sambil berkelakar.

Figur lainnya, ada Mahyudin, Wakil Ketua DPD RI. Ia membuka peluang maju di pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur di 2024, apabila masyarakat menginginkannya maju. Ia mengatakan, akan lebih dulu melihat animo masyarakat, seperti di antaranya melalui hasil survei.

“Kalau banyak teman-teman saya, minta saya untuk kembali ke daerah, ke Kaltim 1, akan kita pertimbangkan,” kata Mahyudin kepada media di Yens Delight, Jalan Ir H Juanda, Samarinda, Minggu (15/10/2023).

“Kalau memang saya dibutuhkan untuk membawa Kaltim jadi lebih baik, saya siap, tidak ada masalah. Selama manusia masih bernafas, jangan pernah berhenti berbuat baik. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya,” tambah Mahyudin.

Kemudian ada juga Rudy Mas’ud, yang sekarang ini anggota DPR RI dan ketua DPD Golkar Kaltim, yang konon diplot menjadi calon gubernur Kaltim. Nama itu sudah menjadi pembicaraan umum.

Ketua Partai yang diperkirakan bakal maju kembali di Pilgub adalah Irjen Pol (Purn) Safaruddin, mantan

Kapolda Kaltim, yang sekarang menjadi ketua DPD PDIP Kaltim.

Sekretaris DPD PDIP Ananda Emir Moeis mengakui, Safar salah satu kandidat kuat dari partainya.

“Kalau melihat hasil Pileg 2019 lalu, Pak Safar menjadi anggota DPR RI dengan 86.528 suara, maka cukup kuat alasan mencalonkan beliau,” jelasnya.

Safar sendiri pernah menyatakan bahwa dirinya lebih nyaman menjadi anggota DPR RI.

“Tapi saya ada di partai, jadi keputusan apa pun dari partai termasuk soal gubernur, saya siap melaksanakan,” tandasnya.

Masih ada satu Ketua Partai lagi yang bisa masuk ke bursa Pilgub. Yakni Dr H Andi Harun, Ketua DPD Gerindra Kaltim, yang saat ini menjadi Walikota Samarinda. Dalam sebuah survei, Andi termasuk tokoh yang memperoleh dukungan sangat tinggi.

Namun belum diketahui, apakah Andi Harun akan loncat ke Pilgub? Ada yang mengatakan segala hal mungkin saja terjadi, meski Andi pernah juga mengatakan akan fokus sebagai walikota.

Andi Harun, yang pernah menjadi anggota DPRD Kaltim tiga periode ini, diketahui banyak mendapat dukungan, terutama dari Said Amin, pengusaha batubara yang juga ketua MPW Pemuda Pancasila Kaltim.

Namun Andi Harun mengaku belum memikirkan untuk maju dalam pemilihan gubernur (pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim).

“Waduh, wali kota saja belum selesai. Itu nanti. Saya konsentrasi dulu untuk pemilihan legislatif dan pilpres,”

kata Andi Harun, di Samarinda, seperti dilansir dari antara, Sabtu (19/8/2023).

Andi mengaku masih fokus untuk penyelesaian tugas sebagai wali kota hingga masa jabatan berakhir pada 2025 dan tidak ingin terburu-buru untuk mengambil keputusan politik terkait pilgub Kaltim.

Sementara itu, PKB Kaltim, secara tegas menyampaikan bakal mengusung kader sendiri di Pilgub Kaltim 2024.

PKB memiliki dua sosok kader yang dinilai mempunyai untuk berlaga di Pilgub Kaltim 2024. Dua sosok itu adalah Bupati Paser, dr Fahmi Fadli dan Wali Kota Bontang, Basri Rase.

Keduanya merupakan kader PKB, yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah. Jika keduanya sukses menjalankan tugas dan berhasil meraih popularitas, tidak menutup kemungkinan bakal berpeluang diusung PKB, bahkan gabungan partai politik di Pilgub Kaltim 2024.

“Komunikasi dengan sejumlah tokoh terkait Pilgub Kaltim 2024 sudah ada, termasuk dengan petinggi partai politik. Tapi kami saat ini ingin agar kader sendiri yang diusung,” kata Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, seperti dilansir dari kaltimtoday.co, beberapa waktu lalu.

Syafruddin yakin kedua sosok kader PKB yang saat ini menjabat kepala daerah tersebut bakal diperhitungkan di Pilgub Kaltim 2024. ♦



HUKUM MINUM SAMBIL BERDIRI DALAM ISLAM

Alkisah pada 1500 tahun yang lalu, Rasulullah SAW memperingatkan keluarga dan para sahabatnya, untuk tidak minum sambil berdiri. Hal itu murni karena perintah Allah SWT, dan tidak ada alasan lain yang lebih khusus. Kemudian reaksi para sahabat? Mendengar, taat dan patuh.

Namun setelah beberapa abad setelah perintah Rasulullah tersebut, para ilmuwan zaman sekarang menemukan fakta-fakta ilmiah, terkait tidak diperbolehkannya minum sambil berdiri.

Dalam sebuah Hadits, dari Anas dan Qatadah *radhiallaahu 'anhuma*, dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam*, yang artinya:

"Sesungguhnya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri." Qotadah berkata: "Bagaimana dengan makan?" Beliau menjawab: "Itu lebih buruk lagi," (HR. Muslim dan Turmidzi).

Nabi *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Jangan kalian minum sambil berdiri! Apabila kalian lupa, maka hendaknya ia muntahkan!" (HR. Muslim).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam *shohihnya*, seperti berikut:

Yang Artinya: Dikatakan kepada kami oleh Adam berkata; dikatakan kepada kami oleh Syu'bah berkata; dikatakan kepada kami oleh Abdul Malik bin Maisarah berkata: Aku mendengar An-Nazzal bin Sabrah bercerita tentang Ali *-radhiallaahu 'anhu*, bahwa ketika itu setelah sholat Dhuhur, dia duduk di antara orang-orang di Kufah (untuk membantu kebutuhan-kebutuhan mereka) sampai datangnya waktu ashar.

Kemudian diberikan kepadanya air, maka beliau meminumnya dan mencuci muka dan tangannya, disebutkan juga mencuci kepala dan kakinya, kemudian berdiri dan meminum sisa air itu dalam keadaan berdiri.

Kemudian berkata: Sesungguhnya orang-orang membenci untuk minum berdiri, dan sesungguhnya Rosulullah *-sholallaahu 'alaihi wasallam* pernah berbuat sebagaimana yang aku perbuat.

Hadist ini menunjukkan bahwa minum sambil berdiri adalah mubah/diperbolehkan. karena Ali mengatakan bahwa Rosulullah *sholallaahu 'alaihi wasallam*, juga pernah berbuat sebagaimana yang dia perbuat yaitu minum sambil berdiri.

Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam *Fath Al-Bari fi Syarh Shohih Al-Bukhori* tentang diperbolehkannya minum sambil berdiri (tanda udzur) sebagaimana itu adalah pendapat kebanyakan ulama.

Adapun hadits-hadits yang menandakan pelarangan minum sambil berdiri begitu juga makan, itu pelarangan jika sekelompok orang diberikan air, dan salah seorang berdiri untuk meminum terlebih dahulu sebelum yang lain. Begitu Ibnu Hajar menjelaskan.

Beliau melanjutkan: "Adapun hadits yang memerintahkan untuk memuntahkan, tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa memuntahkan kembali tidaklah wajib bagi orang yang minum berdiri. sebagian ulama mengatakan: Hadits itu mauquf (hanya sampai) Abu Hurairah (perkataan Abu Hurairah)."

Adapun hadits Anas yang mengandung pelarangan makan sambil berdiri, maka para ulama tidak ada yang berbeda pendapat bahwa makan sambil berdiri adalah mubah/boleh dan pendapat paling kuat adalah mubah/bolehnya minum sambil berdiri.

Sedangkan hadits-hadits tentang pelarangan minum sambil berdiri mengkabarkan akan sesuatu yang lebih baik dan utama yaitu minum dengan duduk, juga ditakutkan dalam minum sambil berdiri akan menyebabkan sakit.

Ini 3 Alasan Mengapa Minum Sambil Berdiri Dilarang:

1. Pendapat Ilmuwan Muslim

Dr. Abdurrazzaq Al-Kailani berkata: "Minum dan makan sambil duduk, lebih sehat, lebih selamat, dan lebih sopan, karena apa yang diminum atau dimakan oleh seseorang akan berjalan pada dinding usus dengan perlahan dan lembut.

Adapun minum sambil berdiri, maka akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus, menabraknya dengan keras, jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu lama maka akan menyebabkan melar dan jatuhnya usus, yang kemudian menyebabkan pernah sekali minum sambil disfungsi pencernaan.

Begitu pula makan sambil berjalan, sama sekali tidak sehat, tidak sopan, tidak etis dan tidak pernah dikenal dalam Islam dan kaum muslimin."

Sementara itu, Dr. Ibrahim Al-Rawi melihat bahwa manusia pada saat berdiri, ia dalam keadaan tegang, organ keseimbangan dalam pusat saraf sedang bekerja keras, supaya mampu mempertahankan semua otot pada tubuhnya, sehingga bisa berdiri stabil dan dengan sempurna.



2. Berdampak pada Saraf

Ini merupakan kerja yang sangat teliti yang melibatkan semua susunan syaraf dan otot secara bersamaan, yang menjadikan manusia tidak bisa mencapai ketenangan yang merupakan syarat terpenting pada saat makan dan minum.

Ketenangan ini bisa dihasilkan pada saat duduk, dimana syaraf berada dalam keadaan tenang dan tidak tegang, sehingga sistem pencernaan dalam keadaan siap untuk menerima makanan dan minum dengan cara cepat.

Dr. Al-rawi menekankan bahwa makanan dan minuman yang disantap pada saat berdiri, bisa berdampak pada refleksi saraf yang dilakukan oleh reaksi saraf kelana (saraf otak kesepuluh) yang banyak tersebar pada lapisan endotel yang mengelilingi usus.

Refleksi ini apabila terjadi secara keras dan tiba-tiba, bisa menyebabkan tidak berfungsinya saraf (Vagal Inhibition) yang parah, untuk menghantarkan detak mematkan

bagi jantung, sehingga menyebabkan pingsan atau mati mendadak.

Begitu pula makan dan minum berdiri secara terus-menerus terbilang membahayakan dinding usus dan memungkinkan terjadinya luka pada lambung. Para dokter melihat bahwa luka pada lambung 95% terjadi pada tempat-tempat yang biasa bebenturan dengan makanan atau minuman yang masuk.

3. Mekanisme Minuman dan Makanan yang Masuk ke Dalam Tubuh

Air yang masuk ke dalam tubuh dengan cara duduk, maka akan disaring oleh sfringer. Sfringer adalah suatu struktur maskuler (berotot) yang bisa membuka (sehingga air kemih bisa lewat) dan menutup.

Setiap air yang kita minum akan disalurkan pada 'pos-pos' penyaringan yang berada di ginjal. Nah, jika kita minum sambil berdiri, maka air yang masuk atau yang kita minum tidak akan disaring lagi.

Dan langsung menuju kandung kemih.

Ketika langsung menuju kandung kemih, maka terjadi pengendapan disaluran ureter. Karena banyak limbah-limbah yang menyisa di ureter. Inilah yang bisa menyebabkan penyakit kristal ginjal. Salah satu penyakit ginjal yang berbahaya. Susah kencing itu penyebabnya.

Sebagaimana kondisi keseimbangan pada saat berdiri disertai pengerutan otot pada tenggorokan yang menghalangi jalannya makanan ke usus secara mudah, dan terkadang menyebabkan rasa sakit yang sangat yang mengganggu fungsi pencernaan, dan seseorang bisa kehilangan rasa nyaman saat makan dan minum.

Jadi kesimpulannya:

a. Minum sambil berdiri adalah mubah/ boleh dalam keadaan apapun, begitu juga makan.

b. Memuntahkan air yang diminum sambil berdiri, tidaklah wajib.

c. Larangan minum sambil berdiri, tidak menandakan pengharamannya akan tetapi lebih pada persoalan adab. Wallahu alam. ♦

HUKUM MEMINTA MAHAR/MAS KAWIN TINGGI DAN KETENTUAN MENURUT QURAN & HADITS

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak penuh kepadanya, seperti hak dalam menerima mahar. Dalam beberapa nash sudah jelas bahwa hak seorang istri harus diberikan dan ini merupakan pemberian yang wajib bagi seorang calon suami, yang hendak menikahi seorang istri, akan tetapi dalam pemberian mahar tidak serta merta ditentukan oleh pihak perempuan dalam menentukan jumlahnya.

Mahar atau mas kawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat akan menjalani pernikahan.

Masalah mahar ini harus diperhatikan dengan baik dan jelas, karena pada zaman sekarang, banyak laki-laki yang merasa dipersulit dalam melaksanakan pernikahan, dikarenakan tidak mengetahui aturan Islam, khususnya dalam hal mahar yang sebenarnya.

Lalu, bagaimana sebenarnya mahar menurut Islam?

Berikut Ayat-ayat Al Quran Tentang Mahar (Mas kawin)

1. Surat An Nisaa' ayat 4: "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisaa' : 4)

2. Surat An Nisaa' ayat 20 : "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?" (QS. An-Nisaa' : 20)

3. Surat An Nisaa' ayat 21 : "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. An-Nisaa' : 21)

3. An Nisaa' ayat:34: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....". (QS. An Nisaa' : 34)

Berikut Hadits Nabi SAW Tentang Mahar (Mas Kawin):

1. Hadits Rasulullah Saw dari Amir bin Rabi'ah.

Artinya: "dari Amir bin Rabi'ah bahwa

seorang perempuan bani fazarah dinikahkan dengan sepasang sandal. Kemudian Rasulullah Saw bersabda : "Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal ? jawabnya: "Ya" lalu Nabi membolehkannya." (HR. Ibnu Majah dan turmuzi).

2. Hadits Rasulullah Saw dari Aisyah.

Artinya: "dari Aisyah bahwa Nabi Saw bersabda : "Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling mudah maharnya" dan sabdanya pula "Perempuan yang baik hati adalah yang



murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya serta baik akhlaknyanya, sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang mahal maharnya, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknyanya.”

3. Hadits Rasulullah Saw dari Ibnu Abbas.

Ibnu Abbas meriwayatkan “bahwa Nabi Saw melarang Ali mengumpulkan Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya : “Saya tidak punya apa-apa” Maka Rasulullah bersabda : “Dimanakah baju besi (hutaniyah) mu ?” lalu berikanlah barang itu kepada Fatimah.” (HR. Abu Daud, Nasaa’l dan Hakim dan disahkan olehnya).

Dari ayat-ayat Al Quran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa memberikan mahar kepada para istri merupakan pem-

berian wajib, bukan sebagai pembelian atau sebagai ganti rugi.

Dan kemudian, apabila istri telah menerima maharnya dengan tanpa paksaan ataupun tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepada suami, maka bagi suami tersebut diperbolehkan menerimanya.

Apabila sang istri ketika akan memberikan mahar tersebut, karena malu atau takut pada suaminya, maka bagi suami tidak halal untuk menerimanya.

Mahar yang dimaksudkan di atas ini hukumnya wajib diberikan kepada istri, agar supaya menjadikan istri senang dan ridha atas pemberian suami terhadap dirinya.

Bukan hanya itu, akan tetapi mahar juga diberikan supaya memperkuat hubungan serta menumbuhkan tali kasih sayang dan

cinta mencintai.

Begitu pula dengan hadits-hadits di atas, yang menjelaskan bahwa dalam hal mahar, Islam tidak menetapkan jumlah besar kecilnya, dikarenakan adanya perbedaan kaya dan miskin, luas dan sempit rizki seseorang.

Oleh karena itu, menurut Islam dalam menyerahkan mahar berdasarkan kemampuannya masing-masing, atau keadaan dan tradisi keluarganya.

Semua nash yang menjelaskan tentang mahar ini, menunjukkan atas pentingnya nilai mahar bukan pada besar kecilnya jumlah mahar, jadi boleh saja memberi mahar dengan cincin besi, segantang kurma atau bahkan dengan beberapa ayat Al Quran. Karena yang terpenting adalah sudah disepakati oleh kedua belah pihak. ♦





ALFRED WILLIAM BEST JR alias ALFIE BEST JR MULANYA, IA KE MASJID ANTAR IBU TEMANNYA UNTUK BERSYAHADAT

Jual permen karet di sekolah ketika masih kecil, lalu tawarkan perlengkapan kantor door to door, dan punya klub malam sendiri waktu remaja, kini jadi multi miliarder Muslim taat.

Maret 2023 Alfred William Best yang populer dengan nama Alfie Best Jr mengejutkan dunia. Sebab multi miliarder ini membagikan video di YouTube, yang berisi pengakuan bahwa dia sudah berpindah ke Agama Islam.

Lebih mengejutkan lagi, ia mualaf justru pada 2017 namun ia sengaja baru membagikan kabar gembira itu sekarang. Tampaknya, Alfie ia merasa sudah saatnya ia mengabarkan kepada publik bahwa dirinya seorang Muslim.

Yaitu saat ia sudah benar-benar mantap dengan pilihan batinnya itu dan menjalaninya dengan penuh keikhlasan dan ketaatan. Di sisi lain, sudah banyak kisah yang dapat dibagikannya sebagai bagian dari dakwah dan syiar Islam.

Multi miliarder kondang Inggris merupakan salah satu orang terkaya di Inggris, juga masuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Salah satu postingan di akun Instagram miliknya @alfie_best18, ia mem-

posting foto dirinya mengenakan gamis berada di sebuah masjid di Kota London, Inggris.

Foto itu disertai tulisannya yang merupakan makna salah satu ayat dalam Kitab Suci Al Quran berbunyi, "Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkan, dan siapa pun yang disesatkan-Nya, tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk."

Dalam posting lainnya, Alfie Best membagikan video Ranger barunya. Dalam video terlihat ia begitu bersemangat sambil minum kopi, dan untuk kendaraan barunya itu ia menuliskan "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah".

Alfie Best Jr membagikan potongan video podcast di postingan Instagram terbarunya. Dia terlihat menanggapi pertanyaan pembawa acara tentang memakai emas.

Dia berkata, "Tentu saja, saya berhenti memakai emas. Karena saya ingin menjadi

Muslim terbaik."

"Saya telah menjual semua jam tangan emas saya dan lihat pergelangan tangan saya, saya memakai jam tangan yang terbuat dari baja tahan karat, yang halal," ungkapnya.

Penting untuk disebutkan di sini bahwa menurut perintah Syariah, laki-laki tidak diperbolehkan memakai perhiasan emas dalam Islam.

Iam akun Youtube 'Islam The Ultimate Peace', Alfie Best Jr menceritakan awal mula dirinya memeluk Agama Islam. Tak pernah terduga oleh siapapun, termasuk oleh dirinya sendiri.

"Saya dan tiga teman tengah tur helikopter. Seorang bilang, dia akan terlambat. Ibunya akan mengucapkan Syahadat malam itu, dia ia harus pergi dan mengantarnya," tutur Alfie Jr.

Alfie pun ikut mengantar sang teman mendampingi ibunya ke masjid, "Saya merasakan sesuatu di dalam masjid yang belum pernah saya rasakan di manapun".

"Saya pergi dan melihat ibu teman saya membaca Syahadat. Sungguh saya merasakan sesuatu di masjid yang belum pernah saya rasakan di tempat lain," ucapnya lagi.

"Saya mengambil Al-Qur'an dan mulai membacanya, saya menyukai moral di dalamnya, rasa hormat dan bimbingan yang diberikan..." tuturnya lagi.

Semua berawal dari situ, dan pada akhirnya Alfie Jr menerima Islam dalam hidupnya.

Kini Hidup Tenang Sebagai Muslim Taat

ALFIE adalah putra dari Alfie Best Sr, pemilik Perusahaan Parkir Wyldcrest Parks. Pada tahun 2019 saja, kekayaan bersih ayahnya sebesar £700 juta, sekitar



kurang lebih Rp 13 triliun, menurut laporan Sunday Times Rich List.

Sebagai penerus Wyldcrest Parks, perusahaan properti, investasi, dan keuangan. Kekayaan Alfie Jr tidak dari situ saja. Ia dikenal sebagai bintang TV show, yang acara tenarnya antara lain My Big Fat Gypsy Fortune dan Rich Kids Go Shopping bersama ayahnya. Ia juga petinju terkenal.

Gipsi Romani muda itu mengikuti jejak kewirausahaan sang ayah. Usaha bisnis pertamanya adalah menjual permen di sekolah, diikuti dengan menjual perlengkapan kantor dari pintu ke pintu.

Saat remaja, dirinya mulai menjamu para wisatawan, sebelum membeli dan memiliki klub malamnya sendiri. Dia menjual klub malamnya pada usia 17 tahun untuk membeli tempat parkir, dan menjadikan dirinya pemilik tempat parkir ter-

muda di Inggris.

The Sun menyebut, saat sedang tidak sibuk maka Alfie Jr menekuni profesinya sebagai super-featherweight boxer.

Begitulah kehidupan pria gipsi Romany, yang sejak kecil berkeinginan untuk menjadi miliarder gipsi pertama di Inggris. Ayahnya sudah membuktikan diri jadi multi miliarder Gipsi Romany pertama itu, dilanjutkan oleh sang putra Alfie Best Jr.

Kerajaan bisnis keluarga Alfie diperkirakan bernilai sekitar £1,2 miliar. Dia diketahui tinggal di sebuah rumah mewah se-

don, Inggris.

Semula ia ikut masuk masjid hanya untuk melihat-lihat, namun begitu berada di dalam ia justru merasakan perasaan yang tidak dapat dilukiskannya dengan kata-kata.

Ketika sudah bulat tekadnya untuk memeluk Agama Islam, Alfie ditanya Imam masjid tentang apa yang membuat ia memutuskan mualaf.

Ia menjawab apa yang dirasakannya, "Hanya Tuhan yang bisa menjawab pertanyaan itu. Dia memberikan perasaan yang belum pernah saya rasakan di tempat



nilai £6 juta di Surrey.

Dalam sebuah unggahan, dia menuliskan dalam keterangan: "Apa pun yang saya lakukan, niat saya adalah untuk menjadi yang TERBAIK!!!".

Banyak kejadian yang sangat mengesankan terjadi setelah dirinya menjadi seorang Muslim. dengan kekayaan keluarganya, ia bisa melakukan apapun yang ia mau, tapi Alfie Best merasa ada yang hilang dalam hidupnya.

Seperti diceritakannya di atas, ia pertama kali masuk masjid saat ikut temannya mendampingi sang bunda mengucapkan Syahadat di sebuah masjid di Kota Lon-

manapun sepanjang hidup saya."

Dia mengaku, sebelum masuk Islam, hidupnya hampa. Hari-harinya dipenuhi dengan minuman keras mabuk-mabukan, berkencan dengan banyak wanita, bermewah-mewah, apapun yang dia mau dia lakukan.

Namun ketika menjadi Muslim, semuanya telah berbalik 180 derajat. Islam telah menjadikan hidupnya jauh lebih baik. Pada 2018, ia melaksanakan umrah, satu ibadah sekaligus perjalanan religi yang sangat dinikmatinya. Kini ia dikenal sebagai sosok pengusaha Muslim dan dermawan. ♦



MANFAAT PISANG UNTUK KESEHATAN

Disamping kaya vitamin B6, pisang merupakan sumber vitamin C, serat makanan, dan mangan serta kaya serat, bebas lemak dan kolesterol.

ALHAMDULILLAH! Allah SWT menjadikan pisang tumbuh subur dan berbuah sepanjang tahun di Indonesia. Pisang merupakan salah satu makanan yang menyenangkan karena kaya vitamin B6, vitamin C, serat makanan, dan Mangan. Pisang juga bebas lemak, bebas kolesterol, dan hampir bebas natrium.

"Pisang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan menjadi bagian dari gaya hidup sehat," kata Peggy Tan, Ahli Diet di Pusat Kesehatan Masyarakat Tiong Bahru, Singapura, dilansir laman HealthXchange.

Anggota Grup SingHealth ini memberi

penjelasan mengapa mengapa pisang baik untuk semua orang dan kapan pisang boleh dikonsumsi. Menurutnya, pisang bisa dimakan setiap hari dan setiap orang.

Manfaat Pisang bagi Kesehatan:

1. Pisang merupakan salah satu buah sumber vitamin B6 terbaik

Vitamin B6 dari pisang mudah diserap oleh tubuh. Pisang berukuran sedang dapat memenuhi sekitar seperempat kebutuhan vitamin B6 harian kita.

Vitamin B6 membantu tubuh;

- ▶ menghasilkan sel darah merah,
- ▶ memetabolisme karbohidrat dan

- ▶ lemak, mengubahnya menjadi energi,
- ▶ memetabolisme asam amino,
- ▶ menghilangkan bahan kimia yang tidak diinginkan dari hati dan ginjal an
- ▶ menjaga kesehatan sistem saraf.

Vitamin B6 juga baik untuk ibu hamil karena membantu memenuhi kebutuhan tumbuh kembang bayinya.

2. Pisang adalah sumber vitamin C yang baik

Pisang berukuran sedang menyediakan sekitar 10% dari kebutuhan vitamin C harian kita.

Vitamin C membantu:

- ▶ melindungi tubuh dari kerusakan sel dan jaringan,
- ▶ tubuh Anda menyerap zat besi lebih baik,
- ▶ tubuh Anda memproduksi kolagen - protein yang menyatukan kulit, tulang, dan tubuh
- ▶ mendukung kesehatan otak dengan memproduksi serotonin, hormon yang memengaruhi siklus tidur, suasana hati, dan pengalaman stres dan nyeri.

3. Mangan dalam pisang baik untuk kulit

Satu buah pisang berukuran sedang menyediakan sekitar 13% kebutuhan mangan harian kita. Mangan membantu tubuh kita membuat kolagen dan melindungi kulit dan sel-sel lain dari kerusakan akibat radikal bebas.

4. Kalium dalam pisang baik untuk kesehatan jantung dan tekanan darah

Pisang berukuran sedang akan menyediakan sekitar 320-400 mg potasium, yang memenuhi sekitar 10% kebutuhan potasium harian kita.

Kalium membantu tubuh menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Selain itu, pisang juga rendah sodium. Kombinasi rendah natrium dan tinggi kalium membantu mengendalikan tekanan darah tinggi.

5. Pisang dapat melancarkan pencernaan dan membantu mengatasi masalah pencernaan

Pisang ukuran sedang akan menyediakan sekitar 10-12% kebutuhan serat harian. Dewan Promosi Kesehatan Singapura merekomendasikan asupan serat makanan harian sebesar 20 gram untuk wanita dan 26 gram untuk pria.

Serat larut dan tidak larut memainkan peran penting dalam kesehatan. Serat larut membantu tubuh mengontrol kadar gula darah dan membuang zat lemak seperti kolesterol. Serat tidak larut menambah berat dan kelembutan tinja, sehingga memudahkan Anda buang air besar secara teratur. Ini membantu menjaga usus Anda tetap sehat dan aman

dari bakteri berbahaya.

Pisang, terutama yang baru matang, mengandung pati yang tidak dapat dicerna (pati resisten) di usus halus dan mampu masuk ke usus besar. Pisang seperti itu membantu mengatur berat badan dengan lebih baik karena kita tetap kenyang lebih lama.

Konon, pisang dapat membantu mengatasi masalah pencernaan seperti:

- ▶ sembelit,
- ▶ sakit maag
- ▶ asam lambung

6. Pisang memberi energi tanpa lemak dan kolesterol

Pisang mengandung tiga gula alami - sukrosa, fruktosa, dan glukosa - yang

memberi sumber energi bebas lemak dan kolesterol. Oleh karena itu, pisang sangat ideal, terutama bagi anak-anak dan atlet, untuk sarapan, sebagai camilan siang hari, atau sebelum dan sesudah olahraga.

Kapan waktu terbaik makan pisang?

Waktu terbaik mengonsumsi pisang bergantung pada kebutuhan nutrisi dan preferensi Anda.

Secara umum, rasa dan nilai gizi pisang berubah seiring dengan kematangannya. Pisang yang baru matang cenderung kurang manis dibandingkan pisang yang matang karena pati belum sepenuhnya terurai menjadi gula sederhana.

Keuntungan makan pisang yang baru matang adalah Anda tetap kenyang lebih



lama dan menikmati manfaat pati resisten di dalamnya.

Di sisi lain, pisang yang matang dengan sedikit bercak hitam di kulitnya lebih mudah dicerna dan dapat memberi Anda tambahan energi yang Anda perlukan sebelum berolahraga.

Bisakah semua orang makan pisang?

Beberapa kondisi medis dapat menyebabkan seseorang memiliki kadar potasium yang tinggi dalam darahnya. Dalam hal ini, sebaiknya hindari mengonsumsi pisang.

Dan bertentangan dengan anggapan umum, penderita diabetes boleh makan pisang asalkan kandungan karbohidratnya diperhitungkan. ♦



SEMOGA PEMILU 2024 BERLANGSUNG DAMAI

KPU dan Bawaslu menggelar Deklarasi Pemilu Damai. Sehari menjelang awal kampanye Pemilu dan Pilpres 2024.

Penghargaan Museum Rekor Indonesia untuk Komisi Pemilihan Umum mengawali acara deklarasi itu. Juga atraksi Drum Band Gita Abdi Praja IPDN dan parade bendera Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang dibawa oleh Jagad Saksana KPU. Beriringan dengan itu Bawaslu juga menggelar acara serupa.

Sebelum pembacaan Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024, KPU menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk Rekor Kirab Bendera Partai Politik Peserta Pemilu Secara Estafet Melalui Darat yang Terbanyak di Dunia. Piagam penghargaan MURI tersebut diterima langsung Ketua KPU, Hasyim Asy'ari dari Pendiri MURI, Jaya Suprana.

"Saya telah berkunjung lebih dari 80 negara di planet bumi ini dan di beberapa

negara demokrasi, kami telah menyaksikan penyelenggaraan pemilihan umum dengan cara dan budaya masing-masing. Tapi, terus terang saya belum pernah menyaksikan suatu penyelenggaraan pemilu seperti yang hari ini saya saksikan. Terima kasih kepada KPU, membuat saya bangga menjadi warga bangsa Indonesia. Rekor hari ini jelas bukan rekor sembarang rekor dan bukan rekor Indonesia, tetapi rekor dunia," kata Jaya Suprana di acara yang berlangsung di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin, 27 November 2024.

Menurut Jaya Suprana, meskipun belakangan ini terjadi krisis kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan bangsa Indonesia, tapi dirinya yakin jika KPU benar-benar berhasil menyelenggarakan pemilu secara damai, maka KPU akan memulihkan

kepercayaan bangsa Indonesia kepada pemerintahnya.

Lanjut Jaya Suprana, KPU tidak mungkin bekerja sendiri, keberhasilan ini juga tergantung kepada para peserta pemilu dan terutama kepada enam putra terbaik Indonesia yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024 masa bakti 2024-2029.

"Maka pada Anda semua para capres dan cawapres, enam putra terbaik ini, kami mohon berkenan Anda untuk mendukung KPU memulihkan kepercayaan bangsa Indonesia pada lembaga pemerintahan," ungkapnya.

Penandatanganan Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024 merupakan komitmen yang dinyatakan oleh para peserta pemilu untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang sehat, melaksanakan



kampanye yang sehat, tidak saling menggambar ke negatif-an lawan politiknya, tapi mempromosikan diri, menunjukkan hal-hal baik.

"Pada dasarnya kampanye adalah upaya untuk meyakinkan pemilih, untuk memilih peserta pemilu karena aspek-aspek positif keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing peserta pemilu, apakah itu partai politik, apakah itu pasangan dalam presiden dan wakil presiden," kata Hasyim mengawali sambutan.

Menurut dia, KPU meyakini salah satu tagline yang digunakan oleh KPU: Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa. Tagline ini dirumuskan KPU, karena di antara yang paling penting adalah nanti pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, semua partai politik di semua tingkatan, apakah DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pasti saling bersaing, saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati, dukungan dan suara dari rakyat yang bisa dikonversi menjadi perolehan kursi, baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.

Lanjut Hasyim, semua peserta Pemilu 2024 saling bersaing, berkompetisi pada 14 Februari 2024 mendatang. Tetapi dalam jangka waktu 35 hari ke depan, sekitar tanggal 20 Maret 2024 sudah ada kegiatan, yakni penetapan hasil pemilu

nasional, dalam hal ini adalah hasil berupa perolehan suara semua partai politik untuk semua tingkatan lembaga perwakilan, semua pasangan calon presiden yang ditetapkan oleh KPU.

Hasyim mengemukakan pula, pada saat itu akan diketahui partai politik apa di DPRD provinsi dan kabupaten mana, memperoleh suara dan memperoleh kursi berapa. Ini akan digunakan sebagai modal untuk pencalonan kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024. Ukuran untuk mendapatkan tiket dapat mencalonkan Pasangan calon kepala daerah adalah minimal perolehan perolehan kursi 25

persen untuk DPRD atau suara sah untuk DPRD tempatnya, masing-masing minimal 25 persen.

"Betul bahwa pada 14 Februari 2024 peserta akan saling berkompetisi, selain untuk meraih simpati, untuk mendapatkan suara dan kursi sebanyak-banyaknya. Namun demikian kami meyakini gesekan-gesekan tidak akan terjadi secara keras, karena nanti begitu tanggal 20 Maret 2024, partai politik masing-masing akan sama-sama memeriksa, apakah memperoleh suara atau kursi batas minimal untuk pencalonan kepala daerah. Bila tidak maka kemudian harus mencari partner, mencari



kawan untuk berkoalisi atau mendapatkan gabungan dalam pencalonan kepala daerah," ujarnya.

Menurut Hasyim, jika dalam Pemilu 2024 tepatnya untuk pemilu legislatif gesekan atau kompetisinya keras, pasti akan sulit sekali mencari kawan untuk pencalonan kepala daerah. Kompetisi Pemilu 2024 yang berbarengan atau serentak di tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pilkada 2024, bisa menjadi modal terutama bagi partai politik untuk bersaing berkompetisi secara sehat, karena pada dasarnya, nanti yang sekarang ini di 14 Februari 2024 menjadi lawan politik, bisa jadi nanti menjadi kawan berpolitik dalam

ni para pasangan calon presiden dan wakil presiden niatnya hanya satu untuk menjaga kedamaian ibu pertiwi dan untuk membangun negeri tercinta Indonesia raya ini," tegas Hasyim.

Pada akhir sambutan Hasyim mengingatkan, penyelenggaraan kampanye dalam waktu 75 hari ke depan, penyelenggaraan pemungutan penghitungan suara, sampai hasil akhir Pemilu 2024 tidak bisa dikerjakan oleh KPU sendirian. KPU harus bekerja sama, berkolaborasi antara penyelenggara Pemilu, KPU Bawaslu, DKPP dan juga peserta pemilu, baik partai politik maupun peserta pemilu presiden, pimpinan pemerintahan, para

urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Tiga paslon capres-cawapres 2024 menandatangani Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 yang digelar KPU RI. Deklarasi ini juga turut ditandatangani perwakilan parpol peserta Pemilu.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kemudian memimpin pembacaan deklarasi Pemilu Damai yang diikuti oleh perwakilan parpol lainnya di panggung. Tiga paslon dan para perwakilan parpol kemudian menandatangani prasasti Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 secara bergantian.

Penandatanganan itu disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jak-



pilkada.

"Kami meyakini bapak-bapak para peserta pemilu presiden, para calon presiden, wakil presiden, semua ini bersahabat, semua berteman dan semua bersaudara. Bahkan dalam kabinet yang sama dalam satu periode yang sama, sehingga sama-sama punya dan tahu persis program-program yang dilaksanakan dalam satu periode," ujar Hasyim.

Demikian juga, para calon presiden, wakil presiden sama-sama pernah punya pengalaman sebagai kepala daerah, intinya adalah aktif di pemerintahan. Dengan demikian sindir menyindir juga saya kira juga pasti akan sedikit berkurang, karena sama-sama tahu titik lemah dan titik kuat masing-masing.

"Dan yang paling penting kami meyakini

penegak hukum, semuanya berkolaborasi bekerja sama dengan komitmen yang sama melaksanakan Pemilu 2024 dengan Damai.

"Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan diberikan kekuatan dan diberikan kesabaran dan semoga apa yang kita kerjakan dihitung sebagai kontribusi kita bersama dalam pengembangan pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

Naskah Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024 ditandatangani oleh tiga pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan pasangan nomor

sa Agung ST Burhanuddin, Anggota Bawaslu RI Puadi, Ketua DKPP Heddy Lugito.

Adapun Naskah Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peserta Pemilu

1. Mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Melaksanakan kampanye Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA dan tanpa politik uang
3. Melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beriringan dengan itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rakornas Sentra Gakkumdu bersama tiga pasangan capres-cawapres Hotel Grand Sahid

Jaya, Jakarta.

"Saya hormati dan hadir di sini, pasangan presiden nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3, terima kasih atas kehadirannya. Sebagai pimpinan atas Pemilu, dalam Rakornas selaku pengawas Pemilu mengucapkan syukur atas kegiatan acara meningkatkan koordinasi dalam penegakan Pemilu," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam sambutannya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin, 27 November 2023.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan rangkaian demi terciptanya Pemilu adil dan makmur. Tanpa adanya kecuran-

publik ini dengan menawarkan visi misi," ucap Bagja.

"Saya harap fungsi Bawaslu bisa dibantu peserta Pemilu, kami tidak menginginkan pelanggaran pada pasal 280 KUHP, kami mengundang untuk menghadapi kerawanan bisa terjadi, gakkumdu tindakan upaya hukum terakhir. Upaya pencegahan dan pengawasan dan menjadi titik tolak pengawasan pemilu kali ini," tutur Bagja.

Dia menegaskan kepada peserta pemilu, seluruh jajaran Bawaslu sudah disumpah dan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga perlu menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan pe-

Sebelum penandatanganan deklarasi, dilakukan lebih dulu pembacaan komitmen yang dibacakan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi sebagai perwakilan parpol.

"Kami peserta pemilu tahun 2024 mendeklarasikan diri berkomitmen untuk, satu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menghormati keberagaman serta mewujudkan suasana aman tertib dan damai selama penyelenggaraan pemilu," kata Aboe Bakar, Senin, 27 November 2023.

"Melaksanakan kampanye pemilu dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain tidak meli-



gan dalam penyelenggaraan Pemilu. Bagja menyebut, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Bawaslu Daerah demi menegakkan keadilan dalam Pemilu.

"Pemilu terdapat penegakan nota kesepahaman Gakkumdu telah melakukan koordinasi pusat dan daerah, pelatihan dan panwas luar negeri oleh sentra gakkumdu," kata Bagja.

Bagja pun mempersilakan ketiga capres-cawapres untuk melakukan kampanye selama 75 hari ke depan. Dia berharap Pemilu berjalan dengan lancar tanpa adanya kecurangan.

"Tahun 2023 daftar pemilu dan pencalonan kiranya tanggal 28 November kampanye peserta Pemilu seluas-luasnya dan ajang peserta meyakinkan re-

rundang-undangan. Oleh sebab itu Bagja meminta dukungan dari seluruh peserta Pemilu untuk meningkatkan tugas dan fungsi Bawaslu.

"Kami berterima kasih kepada peserta pemilu dan juga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah hadir di sini, ini menandakan Pemilu kita pada tahapan utamanya ke depan akan saling bersinergi seperti duduknya Bapak-bapak yang hadir di sini," ujarnya.

Sebanyak 18 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 menandatangani Deklarasi Kampanye Damai Tertib dan Taat Hukum Peserta Pemilu 2024. Deklarasi Kampanye Damai dilakukan sehari sebelum dimulai tahapan kampanye yang mulai berlangsung pada Selasa, 28 November 2023.

batkan pihak yang dilarang selama masa kampanye pemilu," lanjut Aboe.

Poin selanjutnya, Aboe Bakar mewakili parpol lain juga sepakat untuk tidak melakukan politisasi sara serta melakukan kampanye di tempat ibadah.

"Tiga, tidak melakukan politisasi sara menyebarkan hoax ujaran kebencian dan perbuatan politik yang selama politik uang selama penyelenggaraan pemilu," ujarnya.

"Keempat, tidak memanfaatkan tempat ibadah dalam melaksanakan kampanye," jelas Aboe Bakar.

Setelah komitmen dibacakan, perwakilan parpol pun menandatangani deklarasi secara bergiliran. Setelahnya, penandatanganan deklarasi serupa juga dilakukan tiga pasangan capres-cawapres yang merupakan kontestan Pilpres 2024. ♦

POLITIK ISLAM DAN ISLAM POLITIK

MASYA Allah Tabarakallah. Menjelang Pemilu 2024 yang terdiri dari Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, Prof Dr M Quraish Shihab menghadirkan buku Islam & Politik; Perilaku Politik Berkeadaban.

Buku ini sangat mencerahkan siapa saja yang membacanya. Buku ini sangat baik dibaca oleh semua masyarakat Indonesia, baik politisi maupun masyarakat biasa. Buku ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana berpolitik dalam Islam, serta bagaimana Islam menggariskan aturan dan etika politik.

Jika politisi dan rakyat memahami dengan baik aturan dan adab berpolitik dalam Islam, maka takkan ada lagi praktik politisasi agama. Di sisi lain, takkan ada lagi kecurigaan-kecurigaan bahwa agama dijadikan kendaraan politik oleh politisi tertentu.

Prof M Quraish Shihab mengajak kita semua merujuk pada sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah SAW. Dalam kiprahnya sebagai pemimpin, Rasulullah terus mempraktikkan politik sesuai yang digariskan Agama Islam. Politik yang Nabi SAW praktikkan tentunya untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Lebih dari itu, untuk kebesaran Islam.

Impelementasi sikap politik Nabi Muhammad SAW tercermin dalam antara beberapa peristiwa besar seperti Perjanjian Hudaibiyah, perang-perang yang terjadi di masa beliau hidup, strategi yang dikeluarkan dalam menghadapi musuh hingga beberapa musyawarah dan pertimbangan yang dilakukan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya.

Buku Islam & Politik; Perilaku Politik Berkeadaban ini benar-benar membuka wawasan kita tentang sebenarnya politik dan Islam itu sejalan. Tidak bertentangan. Karena Islam sudah memberikan garis dan aturan bagaimana seharusnya politik dilakukan.

Apalagi buku tulisan Prof M Quraish Shihab enak dibaca dan mudah dipahami, tidak terlalu tebal, disajikan dengan

JUDUL:
ISLAM DAN POLITIK; PERILAKU POLITIK BERKEADABAN
PENULIS:
M. QURAISH SHIHAB
CETAKAN:
PERTAMA, SEPTEMBER 2023
PENERBIT:
LENTERA HATI
JUMLAH HALAMAN:
XVII + 203

bahasa yang ringan dan tidak bertele-tele, pembahasannya pun relevan dengan kondisi perpolitikan di Indonesia. Menjelang Pemilu, Pilpres, dan Pilkada Serentak 2024.

Salah satu bahasan di buku ini KAMPANYE. Sebagian pakar Hukum Islam menghukumkan Kampanye dilarang, sebab merupakan bentuk meminta jabatan.

“Demi Allah, sesungguhnya kami tidak menyerahkan pekerjaan (jabatan) ini kepada orang yang memintanya atau orang yang berambisi mengejanya.” (HR Muslim).

Ada ulama yang membolehkan Kampanye dengan alasan kebutuhan akan pengenalan visi misi yang akan menjadi pertimbangan bagi para pemilih.

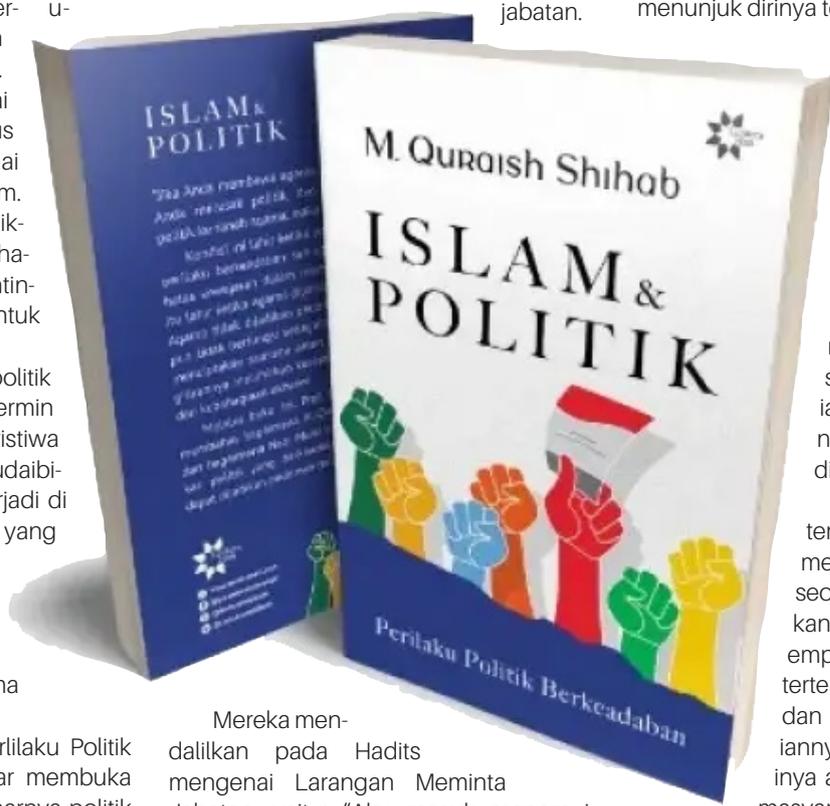
Dalam buku ini beliau melampirkan beberapa dalil kebolehan berkampanye menurut para ulama, yang di antaranya adalah firman Allah dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 55: “Berkata Yusuf, ‘Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.’” (QS Yusuf : 55).

Meskipun ayat di atas menyatakan secara gamblang bahwa Nabi Yusuf AS meminta suatu kedudukan di sisi Raja Mesir kala itu, namun Quraish Shihab memberi catatan kritis bahwa sebelum Nabi Yusuf mengatakan hal tersebut, sang raja telah menunjuk dirinya terlebih dahulu.

Sang raja menunjuk Nabi Yusuf AS untuk menduduki posisi yang tinggi dengan mengerjakan beragam bidang penting dalam tata natan kerajaan. Nabi Yusuf AS pun menerima, namun dengan memilih bidang yang sesuai dengan keahliannya saja sebagaimana terpatri pada ayat 55 di atas.

Berangkat dari ayat tersebut, Quraish Shihab menyimpulkan bahwa seseorang boleh mencalonkan dirinya untuk menempati suatu kedudukan tertentu yang dikuasanya dan sesuai dengan keahliannya, selama motivasinya adalah untuk kebaikan masyarakat.

Di sisi lain, dari ayat di atas pula, ketika proses berkampanye dan mencalonkan diri, seseorang dilarang melakukan kebohongan dan propaganda yang tidak sesuai dengan realita, sehingga nanti masyarakat tidak objektif dalam memilihnya. ♦



Mereka mendalilkan pada Hadits mengenai Larangan Meminta Jabatan, yaitu: “Aku masuk menemui Nabi saw bersama dua orang sepupuku. Lantas salah satu dari keduanya mengatakan, ‘Wahai Rasulullah! Angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebagian wilayah yang Allah ‘Azza wa Jalla kuasakan kepadamu.’ Yang lain juga mengatakan ucapan seperti itu. Maka beliau bersabda,



x



syariah
Jago

CO-LOCATED WITH



Catat tanggalnya & Ajak Keluargamu

8 - 10 December 2023 | ICE BSD Tangerang

14 TREND TOPICS



Halal
Culinary



Halal Travel
& Tourism



Sharia
Banking
& Finance



Islamic
Education
& Book



Muslim
Fashion
& Apparel



Startup
& Tech



Syariah
Wedding



Maternity
& Baby
Product



Home
Appliances
& Kitchenware



Herbal



Halal
Pharmaceutical



Halal Beauty
& Cosmetic



Sharia
Property



FMCG

The Most Inspiring Halal Event

Mengharukan! Kisah Dramatis Pelaku Zina

MENGAKU DI HADAPAN NABI

Dalam Islam, zina dikategorikan sebagai dosa besar kedua setelah perbuatan syirik (menyekutukan Allah SWT). Zina juga merupakan perbuatan yang sangat tercela.

Hukuman untuk pelaku zina pun sangat berat, yaitu dirajam sampai meninggal, jika pelakunya sudah memiliki istri (muhsan); dan dicambuk sebanyak 100 kali jika belum menikah (ghairu muhsan).

Berkaitan dengan hal tersebut, ada sebuah kisah dramatis antara dua orang sahabat yang mengaku di hadapan Nabi telah berbuat zina.

Dilansir dari NU online, Dikisahkan, ada dua sahabat. Mereka adalah Ma'iz bin Malik dan perempuan dari kabilah Ghamidiyah. Tanpa ragu dan takut, keduanya menyerahkan diri dan minta dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya.

Diriwayatkan dari Buraidah, sekali waktu Ma'iz bin Malik datang menemui Rasulullah SAW, dan berkata,

"Sucikanlah aku, wahai Rasulullah!" Rasulullah menjawab, "Apa-apaan kamu ini! Pulang dan mintalah ampun serta bertaubat kepada Allah!" Ma'iz pun pergi.

Nmaun belum lama kemudian, dia kembali kepada Nabi dan berkata, "Sucikanlah aku, wahai Rasulullah!" Rasulullah menjawab sebagaimana jawaban sebelumnya.

Hal ini berlangsung berulang-ulang. Sampai keempat kalinya, Rasulullah bertanya, "Dari apa kamu harus aku sucikan?" Ma'iz menjawab, "Dari dosa zina."

Rasulullah pun bertanya kepada sahabat lain yang ada di situ, "Apakah Ma'iz ini mengidap gangguan jiwa?"

Lalu dijawab bahwa Ma'iz tidak gila. Beliau bertanya lagi, "Apakah Ma'iz sedang mabuk?"

Salah seorang kemudian berdiri untuk mencium bau mulutnya, namun tidak ada bau khamr. Beliau kemudian bertanya kepada Ma'iz, "Betulkah kau telah berzina?" Ma'iz menjawab, "Ya, benar."

Kemudian, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menegakkan hukum rajam, yang berlaku efektif pada waktu itu, terhadap Ma'iz hingga akhirnya ia meninggal.

Setelah Ma'iz meninggal, orang-orang terpecah dalam dua pendapat mengenai kesan terhadap Ma'iz. Sebagian mengatakan bahwa Ma'iz telah celaka akibat dosa yang telah diperbuatnya.

Sementara sebagian yang lain memiliki kesan positif bahwa Ma'iz merupakan orang yang beruntung, karena telah bertaubat secara sangat baik, yaitu dengan

mendatangi Rasulullah, mengakui kesalahannya, dan ikhlas untuk menjalani hukuman rajam.

Sampai selang tiga hari setelah kematian Ma'iz, kedua kubu itu masih dalam pendapatnya masing-masing. Hingga akhirnya Rasulullah meminta mereka untuk memohon ampunan kepada Ma'iz.

Lalu beliau bersabda, "Sungguh Ma'iz telah bertaubat dengan sempurna, dan seandainya taubatnya dapat dibagi untuk satu kaum, pasti taubatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut."

Kisah ini dicatat oleh Imam Bukhari dalam Shahih-nya pada bab Merajam Pelaku Zina di Mushala, hadits nomor 6434.

Setelah dihukum rajam sampai meninggal, kemudian wanita yang dari Ghamidiyah, juga mengakui perbuatannya telah



berbuat zina di hadapan Nabi.

Diriwayatkan dari Buraidah, sekali waktu seorang perempuan dari suku Ghamidiyah menemui Rasulullah, dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, sucikanlah aku dari dosaku." Rasulullah kemudian memintanya untuk pulang.

Esok harinya, wanita Ghamidiyah itu datang lagi.

"Mungkin engkau enggan untuk menjatuhkan hadd (hukuman) untukku sebagaimana yang engkau lakukan terhadap Ma'iz bin Malik. Demi Allah, aku telah hamil (dari hasil zina)," kata wanita itu mencoba meyakinkan.

"Aku tetap menjawab tidak, pergilah sampai kau melahirkan," jawab Rasulullah.

Setelah sekian lama dan wanita itu telah melahirkan, ia kembali mendatangi Rasulullah sambil menggendong bayinya sebagai bukti, dan berkata, "Ini bayinya, aku telah melahirkannya." Rasulullah menjawab, "Pergilah dan susui dia sampai engkau selesai menyapihnya."

Setelah sekian lama dan wanita itu sudah menyapih anaknya, ia kembali men-

datangi Rasulullah dengan menggendong anaknya yang sedang memegang roti.

Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyapihnya dan ia sudah bisa makan."

Rasulullah pun meminta wanita untuk menyerahkan bayinya kepada salah seorang sahabat yang hadir di situ, ia kemudian dibawa ke tempat eksekusi rajam.

Sampai kemudian Khalid bin Walid ikut merajamnya. Mukanya terkena cipratan darah wanita itu. Ia pun mencela si wanita.

Mendengar apa yang baru saja Khalid ucapkan, Rasulullah menegur, "Jaga ucapanmu, Khalid! Demi Allah, ia telah sungguh-sungguh bertaubat dengan taubat yang seandainya seorang penarik pajak bertaubat maka akan diampuni."

Wanita itu pun dishalati dan dikamarkan. Kisah ini dicatat Imam Muslim dalam Shahih-nya dalam Bab Pengakuan Orang yang Berzina, nomor hadits 4528.

Kisah dramatis pengakuan dua sahabat Nabi ini memiliki sejumlah pesan moral.

Pertama, ketegasan seorang pemimpin. Kendati Nabi terkenal sebagai kepala negara yang sangat penyayang, beliau

tetap menjalankan hukum seadil-adilnya, bahkan kepada dua sahabat yang dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab mengakui kesalahannya. Bagi Nabi, keadilan adalah harga mati.

Lalu yang kedua, sebesar apapun dosa yang telah diperbuat manusia, ia akan diampuni, jika mau bertaubat dengan sungguh-sungguh.

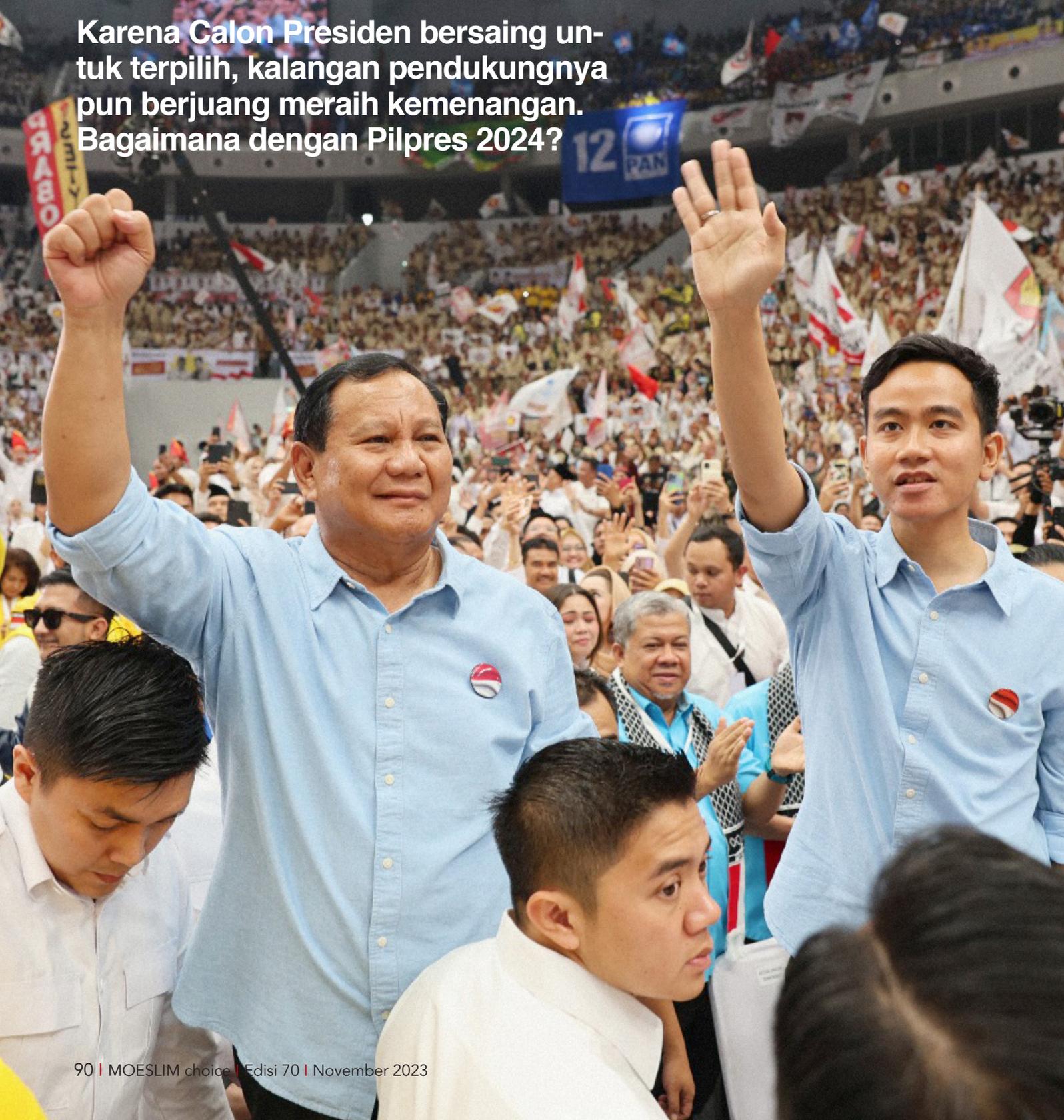
Ma'iz dan wanita Ghamidiyah adalah teladan baik dalam hal ini. Berkat keseriusannya dalam bertaubat, kedua sahabat ini mendapat kedudukan mulia di sisi Allah, kendati sebelumnya dicap sebagai pelaku dosa besar.

Kemudian yang ketiga, keberanian dan kejujuran. Pengakuan Ma'iz dan wanita Ghamidiyah ini, sangat layak diapresiasi. Dengan mengakui kesalahannya, keduanya tahu, bahwa mereka akan kehilangan nyawa dengan menerima hukuman. Akan tetapi, dengan penuh rasa tanggung jawab dan kejujuran, mereka tak gentar sedikit pun. Bagi mereka, jujur lebih baik daripada harus menanggung siksa pedih di akhirat. Wallahu a'lam. ♦



BERSAING SEJAK MENYUSUN TIM PEMENANGAN

Karena Calon Presiden bersaing untuk terpilih, kalangan pendukungnya pun berjuang meraih kemenangan. Bagaimana dengan Pilpres 2024?



Para elite pendukung Capres (dan Cawapres) umumnya berhimpun di Tim Pemenangan Nasional (TPN). Jika kerja timnya berhasil, jabatan politik di sekitar presiden biasanya menjadi imbalannya.

Keberhasilannya terkait dengan pelaksanaan tugas memenangkan persaingan dalam Pilpres. Dalam konteks ini, landasan hukumnya adalah Pasal 269 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi,

gas pokok dan fungsi TKN adalah menjalin komunikasi dengan KPU. Maksudnya, agar supaya jalur komunikasi terkait pilpres terbuka, mudah, dan lancar.

Untuk Pilpres 2024, Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan pengumuman TKN dari masing-masing pasangan Capres-Cawapres pada 13 November 2023. Namun, sebelum pengumuman berlangsung, banyak dinamika yang terkait dengan pembentukan TKN itu.

Sedangkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjuk Wakil Menteri BUMN Rosan Perkasa Roeslani sebagai ketua tim pemenangan. Penunjukan Rosan ini disampaikan langsung oleh Prabowo usai mendeklarasikan Gibran sebagai cawapresnya.

Rosan merupakan pengusaha kelahiran Jakarta, 31 Desember 1968. Berdasarkan laporan majalah Globe Asia pada 2018 lalu Rosan sempat men-



Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Tim teknis inilah yang berwujud TPN dan kemudian berjenjang hingga tingkat pemerintahan daerah: provinsi, kabupaten, dan kota.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari pernah mengemukakan, di dalam Undang-Undang ditentukan siapa pelaksana kampanye pasangan calon. "Nah, salah satunya yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan atau pelaksanaan kampanye pasangan calon adalah tim kampanye," ungkapnya.

Selain menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres, tu-

Paling tidak siapa saja yang akhirnya berada dalam TKN masing-masing pasangan Capres.

Dari tiga kandidat capres-cawapres 2024, baru pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md tampak paling artikulatif mengumumkan anggota TKN-nya. Koalisi partai politik yang menghimpun PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura itu membentuk Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud. Malah penunjukan Arsjad sebagai Ketua TPN sudah diketahui sebelum deklarasi Mahfud Md sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar.

duduki peringkat ke-88 orang terkaya di Indonesia. Pada saat itu, ia tercatat memiliki harta kekayaan sebesar US\$460 juta atau setara dengan Rp6,9 triliun (kurs Rp 15.000/dolar AS).

Sejumlah jabatan penting pernah dia pegang di antaranya Ketua Umum Kadin pada 2015-2021 dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Terakhir, Rosan menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, hingga akhirnya mundur setelah resmi diumumkan menjadi Ketua TKN Prabowo-Gibran.

Susunan lengkap TKN Prabowo-Gibran selain Rosan Roeslani akhirnya diumumkan lebih dulu dari pasangan kandidat Capres-Cawapres lainnya "Atas izin Bapak Bacawapres dan Ketua, kami

diminta untuk membacakan susunan TKN KIM pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusrin Wahid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin, 6 November 2023.

Berikut daftar lengkap tim kampanye Prabowo-Gibran

Pembina: Habib Luthfi bin Yahya- Jenderal (Purn) Wiranto- Aburizal Bakrie-

Jabo Priyono- Hashim Djojohadikusumo- Mahfudhoh Ali Ubaid- Jenderal (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo- Laksamana Madya (Purn) Muhammad Jurianto- Marsekal (Purn) Ida Bagus Putu Dunia

Penasihat:

Ketua:- Jenderal (Purn) Sutanto
Anggota:- Jenderal (Purn) Sutarman- Marsekal (Purn) Imam Sufaat- Letnan

jono Harjanto- Amir Syamsudin- Andi Alfian Mallarangeng- Muzakir Manaf- Theo Sambuaga- Cicip Sutardjo- Badaruddin- Achmad Hafisz Tohir- KMS Umar Halim- Nasrullah- Dhoir Farisi (suami Yenny Wahid)- Giring Ganessa- Irma Hutabarat- Ustaz Syaifuddin- Deddy Miing Gumelar- Ratih Sanggarwati- Mayjen (Purn) Musa Bangun- Irjen (Purn) Adnas- Komjen (Purn) Boy Rafli- Irjen (Purn) Moeckhas Sidik- Irfan Yusuf Hasyim- Laksda (Purn) Iskandar Sitompul- Habib Umar Assegaf- IDA RSI Agung Wayahan- Habib Ahmad bin Hasan Alaydrus- KH Misbahul Munir Cholil- KH Zuhri Yacob- TGKH Lalu Muhammad Zainuddin Atsani- KH Muslich Abbas- KH Hamdi Hasan Al Maliki- KH



Jadi intinya saya pesan ke Mas Anies 'mas titip cari ketua tim pemenangan benar-benar hati-hati, kalau menteri bisa direshuffle kalau ketua tim pemenangan tidak benar tidak menang kita' gitu loh.



Hatta Rajasa- Asep Saifuddin Chalim- Laksamana (Purn) Widodo AS- Jenderal (Purn) Agum Gumelar- Letnan Jenderal (Purn) E.E Mangindaan- Siti Hardjanti Wismoyo Aris Munandar- Jeffry Geovani

Pengarah:

Ketua: Airlangga Hartarto
Wakil Ketua: Sufmi Dasco Ahmad- Agus Harimurti Yudhoyono- Zulkifli Hasan- Yusril Ihza Mahendra- Anis Matta- Kaesang Pangarep- Ridho Sahbana- Agus

Jenderal (Purn) Sjafrie Syamsudin- Nur-mala Kartini Sjahrir- Ridwan Kamil- Putri K Wardani- Akbar Tanjung- Agung Laksono- Laksamana (Purn) Achmad Sucipto- Mayor Jenderal (Purn) R Gautama Wiranegara- KH Abdul Ghofur- KH Adib Rafiuddin Izza- RKH Karror Aschal- Sjari-fuddin Hasan- Edhie Baskoro Yudhoyono- Linda Agum Gumelar- Buya Zulfi Syukur- Deddy Mizwar- Fadli Zon- Komjen (Purn) Muhammad Iriawan (Iwan Bule)- Maher Algadri- Siti Hediati Soeharto- Wid-

Zaini Zulfa- KH Agus Masna Shofa- KH Masrur Anhar- KH Muzhaffar- Tjokorda Gde Agung Sumara Wisesa- Andi Thaswin Abdullah
Dewan Pakar:- Burhanuddin Abdul-lah- Soedradjad Djiwandono- Budiman Sudjatmiko- TB Ace Hasan Syadzily- Mohammad Jafar Hafsa- Drajad Hari Wibowo- Asman Abnur- Bima Arya Sugianto- Helmy Yahya- Totok Lusida- Norman Zainal- Yanda Zaihifni Ishak- Prijanto- Fuad Zakaria- Ihsan Jauhari- Rinda Adeline- Sarah Handayani- Benny P Octavianus- Fuad Bawazier- Rauf Purnama- Sudjarwadi- Laode Masihu Kamaluddin- Beny Kabur Herman- Rudy Irawan- Nachrowi Ramli- Sarjan Tahir- Vera Febyanthi- Sitaesmi Soekanto- Henwira Halim- Rully Syumanda- Tengku Zulkifli Usman- Abrory Djabar- Agus Gunawan- Agus Riyanto- Andi Kurniawan- Chairil Abdini- Dadan Gunawan- Norman Zainal- Yuanita Indriani- Helmi Hasanudin- Kemal Taruc- Laksdya (Purn) Arie Soedewo- Marsma (Purn) Dwi Badarmanto- Mulya Amri- Panangian Simanungkalit- Sadar Subagyo-

Edi Slamet- Syamsul Bahri- Andy Fefta Wijaya- Mangku Purnomo- Darwin Ginting- Sukmo Harsono- Joko Suranto- Panji Irawan- Ferry Latuhihin- Kuat Hermawan Santoso- Imanuel Cahyadi- Muhammad Sirod- Arief Budhy Hardono- Purba Hutapea- Mohamad Hekal

Ketua Umum TKN:

Rosan Perkasa Roeslani
 Ketua Koordinator Strategis:- Sufmi Dasco Ahmad
 Wakil Ketua:- Ahmad Muzani- Lodewijk Freidrich Paulus- Teuku Riefky Harsa- Eddy Soeparno- Mahfudz Siddiq- Alfiansyah Noor- Raja Juli Antoni- Dominggus Oktavianus- Komjen (Purn) Ari Dono Sukmanto- Komjen (Purn) Condro Kirono- Juli Ardiantoro- Arifah Fauzi- Erwin Akasa- Wisnu Wardana- Fauzan- Akbar Himawan Buchary- Ali Masykur Musa- Panel Barus- Utje Gustaaf Patty- Sylvester Matutina- Grace Natalie
 Sekretaris:Nusron Wahid
 Wakil Sekretaris:- Saleh Partaonan Daulay- Renanda Bakhtiar- Fadli Tri Hartono- Azanil Kelana- Keke Pahlawansjah- Sulistyaningsih- Aminuddin Maruf- Michael Umbas
 Bendahara Umum:Thomas Muliatna Djwandono
 Wakil Bendahara Umum:- Pandu Sjahrir- Setiawan Ikhlas- Hari Zunaldi- Athari Gauthi Ardi- Moh Idrus- Moh Faiz Rozin- Chandra Setiawan- Aryo Djojohadikusumo- Imam Kusumo
 Komandan Teritorial:- Ahmad Dolly Kurnia
 Wakil Komandan:- Prasetyo Hadi- Irvan Herman- Irman Hairon- Satria Chandra Wiguna
 Komandan Komunikasi:- Budi Djiwandono- Nurul Arifin- Eko Patrio- Herzaky Mahendra Putra- Fahri Hamzah- Cheryl Tanzil
 Komandan Galangan:- Susanto- Andi Ahmad Dara- Julianto- Umar Arsal- Abdul Rohim
 Komandan Supporting:- Irjen (Purn) Yovianes Mahar- Erwin Izharruddin- Tatyana Sutara
 Komandan Hukum Advokasi:- Hince Pandjaitan- Habiburokman- Supriansa- Adies Kadir- Syarifudin Sudding- Fahri Bachmid- Francine Widjodo

Komandan Pemilih Muda:- Muhammad Arief Rosyid Hasan- Rahayu Saraswati Djojohadikusumo- Dyah Roro Esti- Jerry Sambuaga- Verrel Bramasta- Sigit Purnomo Said (Pasha Ungu)- Zita Anjanidr. Irene- Ulta Levenia Nababan- Rizky Natakusuma- Osco Olfriady Letunggamu- Doni Saputra- Akmal Farhansyah- Wawan Sugiabto- Dedek Prayudi- Ryano Pandjaitan- Ahmad Romzi- Anggawira- Arief Muhammad- Reza Oktovian (Reza Arap)- Willie Salim- Sona Maesana
 Komandan Relawan:- Haris Rusli Moti- Imanuel Ebenezer- Wahab Talaohu- Dinuk Ashaf- Fauzi Abdillah- Mangapul Silalahi- Syarif- Imelda Sari- Gojali Harahap- David Pajung- dr. Sutomo- Maret Suaken- Roy Maningkas- Dewi Mutiara Lubis- Kaylani- Agus Teddy- Thurman Simanjuntak.

Gibran Rakabuming Raka mengakui timses TKN Prabowo-Gibran sangat gemuk untuk Pemilu 2024 kali ini. Meski begitu, ia mengaku senang ada banyak tokoh nasional yang mendukung dirinya dan Prabowo yang tergabung dalam TKN Prabowo-Gibran.

Terlebih, menurut Gibran, sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam TKN Prabowo-Gibran saat ini memiliki keahlian masing-masing baik di sektor akademisi, hukum hingga kiai. "Saya merasa bersyukur dibantu oleh orang-orang hebat dan orang-orang yang ahli di bidang masing-masing," ungkapnya.

Selanjutnya Gibran meminta agar ratusan orang tersebut berjuang agar dirinya memenangkan Pemilu 2024 nanti. "Satu pesan saya untuk semua yang bergabung ke dalam TKN ini.

Saya pesan pastikan kapal besar Koalisi Indonesia Maju (KIM)

ini berlabuh di dermaga kemenangan," tandasnya.

Pasangan lain, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang pertama mendaftar ke KPU malah belum mengumumkan siapa ketua TKN. Partai Keadilan Sejahtera sebagai salah satu parpol pengusung mengemukakan, akan ada kejutan mengenai figur ketua atau kapten Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN).

Ketua DPP PKS Mardani Alisera menitipkan pesan kepada Anies agar hati-hati memilih sosok yang akan memimpin tim pemenangan. Kapten Timnas Amin, sambungannya, harus orang yang bisa mengatur pemenangan sampai ke pedesaan.

"Jadi intinya saya pesan ke Mas Anies 'mas titip cari ketua tim pemenangan benar-benar hati-hati, kalau menteri bisa direshuffle kalau ketua tim pemenangan tidak bener tidak menang kita' gitu loh. Karena ini kerja besar dan kerja raksasa, mengatur mesin pemenangan yang sampai ke pedesaan. Jadi seksama," ucapnya.

Sedangkan pasangan Ganjar-Mahfud yang lebih dulu menyusun TPN secara bertahap, ternyata didahului oleh pasangan Prabowo-Gibran. Namun, bukan siapa lebih dulu menyusun kelengkapan tim masing-masing yang menentukan, melainkan bagaimana tim itu bekerja meraih dukungan pemilih.

Hasilnya baru diketahui setelah hari H pemilihan yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Insyallah. ♦





KINERJA TIM YANG MENENTUKAN

Ketiga pasangan Capres-Cawapres sudah menyusun tim kampanye masing-masing. Kinerjanya akan ikut menentukan hasil Pilpres 2024.

Beriringan dengan pengumuman nomor urut pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk oleh Komisi Pemilihan Umum, semakin jelas pula susunan tim kampanyenya. Untuk Pemilihan Presiden 2024, Tim Ganjar-Mahfud bernama Tim Pemenangan Nasional (TPN), Timnas AMIN untuk pasangan Anies-Cak Imin, dan Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk pasangan Prabowo-Gibran.

TKN Prabowo-Gibran tampak paling gemuk karena jumlah personelnya paling banyak. Menyusul kemudian TPN Ganjar-Mahfud. Sedangkan Timnas AMIN tampak paling ramping.

Wacana persaingan antartim pun sudah mengemuka. Untuk mempengaruhi opini publik pemilih tentunya.

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, misalnya, mewacanakan bahwa demokrasi pada Pilpres 2024 dimulai dengan luka serius. Kaitan wacana ini adalah tanggapan terhadap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

"Pada dasarnya MKMK menyatakan bahwa putusan MK nomor 90 lahir dari sebuah pelanggaran etik berat. Ini adalah mendung, masa berkabung untuk demokrasi kita," kata Arsjad dalam jumpa pers di Kantor TPN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 8 November 2023.

Namun, sambungnya, walaupun sudah terbukti terjadi pelanggaran etik berat, putusan MK Nomor 90 terkait soal usia capres-cawapres tetap sah. "Artinya, rakyat harus menerima proses demokrasi pilpres

ini telah dimulai dengan luka serius, sejarah mencatat ini," ujar Arsjad.

Toh ia mengaku TPN tak akan larut dengan keadaan dinamika politik seperti itu. TPN, kata dia, dipastikan akan memperjuangkan kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang memperjuangkan kepentingan rakyat melalui proses yang demokratis. "Mas Ganjar dan Prof Mahfud berkomitmen penuh dalam menjaga demokrasi bangsa Indonesia," tegasnya.

Ia pun meminta agar perjuangan mengawal demokrasi ini terus dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia. Hal itu untuk memastikan agar proses demokrasi tetap bebas tanpa diintervensi siapapun.

"Dengan ini saya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk turut menjaga demokrasi. Awasi dan kawal proses



pilpres dan kampanye, awasi dan kawal proses pengambilan suara di TPS,” tandasnya.

Arsjad menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk mengawasi proses demokrasi pada pemilu mendatang. Ia meminta kepada masyarakat agar tak perlu takut terhadap berbagai bentuk tekanan yang mengancam demokrasi.

“Jangan takut, jangan takut terhadap tekanan-tekanan yang dihadapi. Kita akan back up dan berjuang bersama, kita berjuang bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyatakan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam perkara uji materi terkait syarat capres cawapres dari unsur kepala daerah. Menurut Jimly, Anwar terbukti membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan perkara nomor: 90/PUU-XXI/2023.

Putusan ini dianggap telah membuka jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Anwar pun dijatuhi sanksi pencopotan dari jabatan Ketua MK. Namun, terdapat dissenting opinion atau pendapat berbeda dari majelis etik MKMK Bintang Regen Saragih.

Bintang menilai Anwar mestinya bukan hanya dicopot sebagai ketua, namun juga

sebagai hakim konstitusi. Menurut dia, tak ada sanksi pemberhentian jika hakim konstitusi melakukan pelanggaran berat.

Seiring dengan dinamika politik yang kian rumit itu, TPN Ganjar-Pranowo pun semakin melengkapi susunan personelnnya sebagaimana daftar berikut:

Ketua TPN: Arsjad Rasjid

Wakil Ketua TPN: Jenderal (Purn) Andika Perkasa, Laksamana Madya (Purn) Desi Albert Mamahit, Marsekal Madya (Purn) Tatang Harlyansyah, Letjen (Purn) Joni Su-

priyanto, Komjen (Purn) Gatot Eddy, Tuan Guru Bajang M Zainul Majdi, Bagas Adhadi-irga, Mustar Bona Ventura, Rambun Tjajo, Eko Sulisty, Nita Yudi, Ahmad Basarah, Usman M Tokan, Benny Rhamdani, Angela HM Tanoesoedibjo, Ammarsjah, Andi Gani Nena Wea

Sekretaris Eksekutif: Heru DewantoSekretaris: Hasto KristiyantoWakil Sekretaris: Moh Arwani Thomafi, Kodrat Shah, Ahmad Rofiq, Sumantri Suwarno, Hotasi Nababan Bendahara Umum: Orias Petrus Moedak



>> LAPORAN KHUSUS

Wakil Bendahara: Rudianto Tjhen, R Arya Permana Graha, Sarah, Henry Suparman, Djauhar Maulidi

Kepala Staf Pimpinan TPN: Regi Wahyu

Deputi Politik 5.0: Andi Widjanto

Deputi Kinetik Teritorial TPN: Komjen (Purn) Luki Hermawan

Deputi Operasi 247: Denon Prawiraatmadja

Deputi Komunikasi 360: Prabu Revolusi

Deputi Hukum: Todung Mulya Lubis

Ketua Tim Pemenangan Muda (TPM): Dharmaji Suradika

Direktur TPM: Fitria Aldiani.

Menurut Arsjad, TPM muda yang inklusif ini adalah simbol pergerakan bersama untuk mewujudkan Indonesia Unggul. TPM

Muda yang mendukung Ganjar-Mahfud mengajak seluruh anak muda untuk turun, bergerak bersama dengan cara yang menyenangkan dan merangkul semua pihak.

"TPM akan dipimpin oleh CEO, Dharmaji Suradika (Aji). Aji merupakan seorang profesional muda, juga pengusaha, consultant dan juga aktivis," kata Arsjad.

Sementara itu, CEO TPM Dharmaji Suradika mengatakan, sebagai orang yang bergerak cukup lama di bidang leadership, dia percaya bahwa pemimpin yang paham betul dengan kondisi masyarakat adalah yang memperjuangkan nilai-nilai dan punya hati untuk masyarakat.

Aji percaya untuk mencapai level kepemimpinan tertinggi, harus ada proses

yang dilewati. Karena kebijaksanaan pemimpin dibentuk dengan proses.

Ia teringat saat kuliah di Jerman untuk memenuhi kebutuhan, harus bekerja paruh waktu dengan menjadi kuli di pasar dan bekerja di gudang. "Anak muda harus diajarkan tentang proses tidak ada yang instan," ungkapnya.

Dia melihat Ganjar dan Mahfud adalah duet yang tepat untuk menjadi presiden dan wakil presiden yang tidak hanya mendengar suara anak muda. Namun juga diturunkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang akan membantu generasi muda menyongsong masa depan yang lebih baik. Juga memberikan ruang kepada anak muda untuk



berproses.

Di TPM Ganjar-Mahfud, Aji tidak sendirian, salah satu Direktur yang membantunya adalah Fitria Aldiani yang memiliki latar belakang di NGO Nasional dan Internasional.

Saat ini Fitria bekerja sebagai peneliti yang menangani Bappenas. Fitria selalu berhadapan dengan kelompok-kelompok rentan.

Sejak berkuliah di Universitas Indonesia, dia memiliki kepedulian, terutama pada perempuan yang selalu mendapatkan ketidakadilan dalam berbagai macam faktor.

Sebagai seorang ibu muda dari generasi millennial, Fitria mau turut berkontribusi

untuk mewujudkan negara yang mendukung kesejahteraan, kesehatan ibu dan anak.

“Meningkatkan kualitas pendidikan. Karena ibu dan anak-anak adalah kunci dari keberhasilan sebuah keluarga yang melahirkan putra-putri terbaik bangsa,” kata Fitria.

Nah, dalam perkembangan berikutnya, sebelum penentuan nomor urut pasangan Capres-Cawapres oleh KPU, Timnas AMIN pun terbentuk. Tim ini diketuai oleh Marsekal Madya Muhammad Syaugi Alaydrus yang pernah menjadi Ketua Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas).

Anies menganalogikan Timnas Amin

seperti tim sepak bola, dengan line up yang diharapkan dapat memperluas, bukan malah mempersempit gerakan perubahan. “Ini sebagaimana seperti tim sepak bola itu adalah line up-nya, ketika sudah bertanding bola mengalir kemana saja, maka ambil bola itu, tendang bola itu oper bola itu, dan bisa macam-macam cara mengaturnya,” ungkapnya di Jakarta, Selasa, 14 November 2023.

Dia mengemukakan, semua pertandingan yang berlangsung akan bersifat fairplay, penuh sportivitas. Sebagaimana Anies melihat Pilpres sebagai kompetisi, semangatnya adalah penuh dengan semangat kebersamaan, pertandingan yang bukan penuh lawan tapi semua adalah teman dalam demokrasi, lawan dalam sepak bola adalah teman dalam olahraga dan prinsip itu akan terus dibawa.

Anies pun mengungkapkan alasan Koalisi Perubahan menunjuk mantan Kepala Basarnas Muhammad Syaugi Alaydrus sebagai Kapten Timnas Pemenangan AMIN. Ia menyebut Syaugi merupakan sosok yang penuh dengan pengalaman. Antara lain, Syaugi pernah memimpin sebuah organisasi sebesar Basarnas.

“Beliau punya pengalaman di dalam kegiatan pengelolaan SAR, punya pengalaman kepemimpinan, kalau anda liat CV-nya, hampir di semua tempat memimpin,” kata Anies di Jalan Diponegoro 10, Jakarta, Selasa, 14 November 2023.

Berikut susunan Timnas Amin:
 Captain: Muhammad Syaugi Alaydrus
 Co-captain 1: Sudirman Said
 Co-captain 2: Thomas Trikasih Lembong
 Co-captain 3: Al Muzzammil Yusuf
 Co-captain 4: Nihayatul Wafiroh
 Co-captain 5: Azrul Tanjung
 Co-captain 6: Nasirul Mahasin
 Co-captain 7: Leontinus Alpha Edison
 Co-captain 8: Yusuf Muhammad Martak
 Co-captain 9: Ki KRT H Lebdo Nagoro Anom Suroto (Ki Anom Suroto)
 Co-captain 10: Muhammad Jumhur Hidayat
 Co-captain 11: Maksum Faqih
 Co-captain 12: Suyoto
 Sekjen: Novita Dewi
 Bendahara: Gede Widiade
 Tim Hukum Nasional: Ari Yusuf Amir

Bagaimana kinerja TKN Prabowo-Gibran, TPN Ganjar-Mahfud, dan Timnas AMIN, akan terlihat pada masa periode kampanye Pilpres 2019. Sedangkan KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Berlanjut dengan hari H pemungutan suara yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024. ♦



MINJEM DULU SERATUS

DALAM kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami situasi di mana tiba-tiba seorang teman mendekati kita dengan permintaan yang tidak terduga: "Minjem dulu seratus."

Pasti mengejutkan bukan? Bahkan perkataan si teman bisa menjadi dilema bagi orang-orang, terutama yang sudah memiliki pengalaman kurang menyenangkan terkait pemberian pinjaman uang kepada teman-teman.

Namun harus diingat. Dalam Islam, memberikan bantuan kepada mereka yang kesulitan adalah tindakan yang sangat dianjurkan.

Salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam adalah saling tolong-menolong dan peduli terhadap sesama.

Ketika seorang teman datang kepada kita dengan permintaan pinjaman uang, ini adalah peluang untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut.

Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling membantu dan berbagi dengan sesama, terutama ketika mereka berada dalam kesulitan.

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa melampangkan seorang mukmin dari suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan melampangkannya dari kesusahan pada hari kiamat; barangsiapa yang memudahkan bagi orang yang sedang mendapatkan suatu kesulitan, Allah akan memudahkan orang itu di dunia dan di akhirat; dan barangsiapa yang menutup cela seorang



oleh Ilham Ibrahim

muslim, Allah akan menutup kesalahannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya." [HR. Muslim].

Namun, lebih dari sekadar memberikan pinjaman uang, Islam juga mengajarkan nilai-nilai keuangan yang penting. Salah satunya adalah kewajiban untuk melunasi utang.

Melunasi utang adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang berutang. Bahkan lebih lanjut, Islam mendorong agar orang yang sudah mampu untuk melunasi utang secepat mungkin.

Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang telah memiliki kemamp-

uan untuk melunasi dikategorikan sebagai sebuah kezaliman dalam Islam. Ini menekankan pentingnya berpegang teguh pada komitmen keuangan dan memahami tanggung jawab kita terhadap orang lain.

"Diriwayatkan dari Hamam ibn Munabih, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda: Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman." [HR. al-Bukhari].

Ketika kita memberikan pinjaman uang kepada teman, kita juga harus mengingatkan mereka tentang tanggung jawab untuk melunasi utang tersebut sesegera mungkin. Jika mereka sudah mampu melakukannya, maka sepatutnya tidak menunda-nunda pembayaran utang tersebut.

Dalam Islam, hubungan keuangan antara teman-teman harus didasarkan pada kejujuran, saling percaya, dan tanggung jawab. Dalam sebuah tongkrongan atau dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai ini.

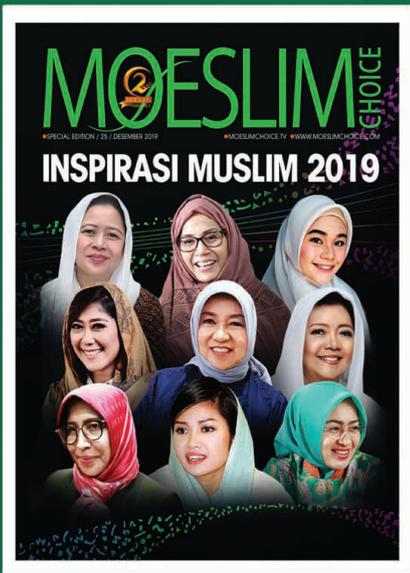
Sebagai umat Islam, kita diharapkan untuk berusaha memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari kita.

Dalam memberikan pinjaman uang kepada teman dan dalam melunasi utang kita sendiri, kita dapat menghormati nilai-nilai agama dan mengambil langkah-langkah yang baik untuk menjaga hubungan baik dengan sesama dan menjalankan kewajiban keuangan kita dengan benar. ♦ dikutip dari laman muhammadiyah.or.id





IKLAN 1 HALAMAN FC
Rp. 50.000.000



IKLAN BACK COVER FC
Rp. 75.000.000



IKLAN 1/2 HALAMAN FC
Rp. 25.000.000

Media Yang Tepat Untuk Promosi Usaha Anda

MOESLIM CHOICE

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC) 1 ALAMAN
UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN 1/2 CENTERSPREAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC) (186 X 124 MMK)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC), UKURAN 186 X 124 MMK (HORIZONTAL), 90 X 250 MMK (VERTIKAL)
- IKLAN ADVERTORIAL (FC) 1 HALAMAN UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN CENTERSPREAD (FC) DILUAR EDISI KHUSUS, 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297MMK
- IKLAN COVER 2 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297MMK
- IKLAN COVER 3 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297MMK
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297MMK
- IKLAN DISPLAY (FC) 1 HALAMAN 210 X 297MMK
- IKLAN HALAMAN 13, 15, 17 (FC)
1 HALAMAN UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297 MMK
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297 MMK

MANFAAT PLUS BERIKLAN DI MAJALAH MOESLIM CHOICE:

- Lebih Akurat dengan Target Pesan Iklan Sesuai Dengan Topik Bahasan.
- Pilihan Halaman Iklan Yang Mudah Disimak Pembaca
- Harga Iklan Yang Bertabur Diskon Untuk Para Pelanggan



IKLAN CENTER SPREAD FC Rp. 80.000.000

● Contact Person : ZULFAHMI JAMBA

▶ **021 - 79196781**

▶ **081380196507**

▶ Email : moeslimchoice@gmail.com



MOESLIM CHOICE

PERSAINGAN
TIM KAMPANYE
CAPRES

PEMILU DAN
PILPRES 2024
HENDAKNYA DAMAI

WARAS WASISTO
DI KARAWANG,
BEKASI, DAN
PURWAKARTA

NETRALITAS ASN
DI PEMILU DAN
PILKADA 2024

AKTIVITAS PENDIDIKAN
PONPES DI MUBA
DAPAT PERHATIAN LEBIH

ISSN_2614-2783



Rp 75.000



HERMAN DERU 2 PERIODE
DUNIA UNTUK
AKHERAT